

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**MASA PEMERINTAHAN  
KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I ( 1953-1955 )**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EVISIANTY**

NIM : 92 214 020

NIRM : 920052010604120019



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1997**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**MASA PEMERINTAHAN  
KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I ( 1953-1955 )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan  
Sejarah**

Oleh :

**EVISIANTY**

**NIM : 92 214 020**

**NIRM : 920052010604120019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1997**

**MASA PEMERINTAHAN  
KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I ( 1953-1955 )**

**SKRIPSI**

Oleh :

**EVISIANTY**

NIM : 92 214 020

NIRM : 920052010604120019

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal ... 30 September 1997.

Pembimbing II



Drs. J. Adisusilo J.R.

Tanggal ... 2 Oktober 1997.

**MASA PEMERINTAHAN  
KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I ( 1953-1955 )**

**SKRIPSI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**EVISIANTY**

NIM : 92 214 020

NIRM : 920052010604120019

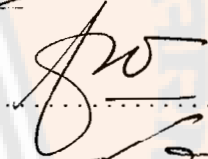
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 18 Oktober 1997  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

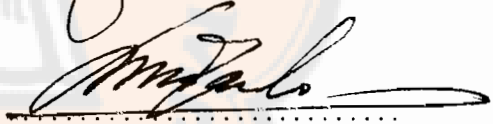
Ketua : Drs. A.K. Wiharyanto



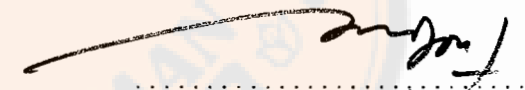
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.



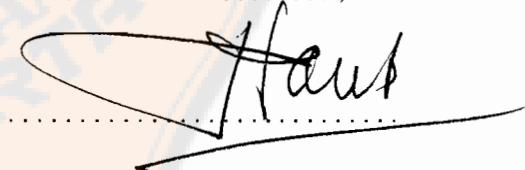
Anggota : 1. Drs. G. Moedjanto, M.A.



2. Drs. S. Adisusilo J.R.

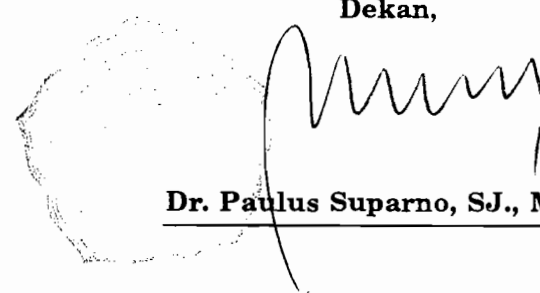


3. Drs. A.K. Wiharyanto



Yogyakarta, 24 November 1997

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Paulus Suparno, SJ., M.S.T

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

M O T T O

ALL GLORY COMES FROM DARING TO BEGIN





Kupersembahkan skripsi ini untuk :  
Keluargaku tercinta  
Papa, Mama, Kakak, dan Adik-adik  
Sahabatku terkasih  
Almamaterku USD dan  
Teman-teman Pend.Sejarah 1992

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Penulis

Evisianty

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) ini memuat tiga pokok permasalahan : pertama proses pembentukan kabinet, kedua pelaksanaan program kerja, ketiga jatuhnya kabinet. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintahan di Indonesia selama kabinet Ali Sastroamidjojo I memegang kekuasaan. Sejalan dengan studi yang ditekuni, maka dalam penulisan ini digunakan metode sejarah yang mencakup : penemuan sumber, kritik sumber (ekstern dan intern), analisis sumber, sintesis, interpretasi, koraborasi, dan historiografi.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga dengan Kabinet Ali I, merupakan kabinet yang paling lama memerintah dalam masa demokrasi parlementer/liberal di Indonesia. Kabinet ini baru terbentuk setelah melewati masa krisis selama 58 hari dengan pergantian formatur sebanyak 5 kali. Percobaan pertama dilakukan oleh Sarnidi Mangunsarkoro (PNI) dan Muhammad Roem (Masjumi) kemudian diganti oleh Mukarto Notowidigdo (PNI) yang ditunjuk sampai dua kali dengan tugas yang berbeda. Presiden kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap (Masjumi) tapi usahanya juga gagal. Kemudian ditunjuk Wongsonegoro (PIR) dan dia berhasil membentuk kabinet baru yang berkoalisi dengan PNI, NU, dan Partai Nasional kecil lainnya. Mereka memulai tugas pada tanggal 1 Agustus 1953 yang dikenal juga sebagai kabinet Ali-Wongso-Arifin sesuai dengan nama Perdana Menteri dan wakilnya.

Untuk melaksanakan tugasnya kabinet mempunyai empat pokok program yaitu : Dalam Negeri (Keamanan, pemilu, kemakmuran dan keuangan), Irian Barat, Luar Negeri (Politik bebas aktif, peninjauan kembali perjanjian KMB), Kebijakan pemerintah mengenai masalah penambangan minyak di Sumatera Utara dan pembagian tanah



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di Sumatera Timur.

Untuk bidang keamanan pemerintah dihadapkan dengan pemberontakan Daud Beureuh di Aceh, demikian juga di bidang pemilu. Kritik lainnya dilancarkan terhadap kebijaksanaan ekonomi yang dikenal dengan kebijaksanaan Indonesianisasi. Masalah Irian Barat pemerintah berusaha untuk merebutnya kembali dengan memasukkannya ke dalam agenda sidang umum PBB.

Politik Luar Negeri dapat dikatakan berhasil walaupun ada yang kurang memuaskan. Sukses terbesar adalah diselenggarakannya KAA di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan Dasa Sila Bandung. Kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah di Sumatera Timur, pemerintah meminta Gubernur Medan untuk menghentikan pentraktorasi pemukiman dan menyediakan pemukiman baru. Mengenai penambangan minyak di Sumatera Utara pemerintah tidak dapat memutuskan apakah penambangan tersebut dikembalikan kepada Belanda atau tidak.

Setelah memerintah sekitar 2 tahun Kabinet Ali I akhirnya jatuh juga. Hal itu dimulai dengan adanya oposisi terhadap kebijaksanaan perekonomian Indonesianisasi. Akibat oposisi ini banyak partai yang menentang kabinet termasuk PIR yang menjadi pendukung utama kabinet. Masalah yang benar-benar menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah Angkatan Darat. Setelah Kolonel Bambang Sugeng mengundurkan diri, pemerintah menunjuk Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD yang baru. Penunjukan ini di boikot oleh Kolonel Zulkifli Lubis dan perwira lainnya yang tidak setuju dengan pengangkatan tersebut. peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Masalah itu tidak dapat diselesaikan dan kabinet terpaksa mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955 kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta.

**ABSTRACT**

**THE ERA OF THE GOVERNMENTAL CABINET  
OF ALI SASTROAMIDJOJO I (1953-1955)**

There are three important points on the thesis entitled "The Era of the Governmental Cabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) namely the Process of the Forming Cabinet, the Run of Cabinet's Work Program and the Fall of the Cabinet. It is generally aimed to find out and analyze the Ali I Cabinet in Indonesia. The historical method was use which included: source finding, source criticism (external and internal), source analysis, synthesis, interpretation, corroboration, and historiography.

The Ali Sastroamidjojo cabinet, known as the Ali I cabinet, was longest governmental cabinet in the era of parliamentary/liberal democracy in Indonesia. The new cabinet was formed after passing through the 58 days crisis with the formateur changing for about five times. The first trial was done by Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) and Mohammad Roem (Masjumi). Later, Mukarto Notowidigdo (PNI) replaced them as the new formateur, chosen twice with different job. The President appointed Burhanuddin Harahap (Masjumi) then but also failed. Next, Wongsonegoro (PIR) was appointed and he succeeded in forming the new cabinet which unified with PNI, NU, and other small National Parties. It started its work on August 1<sup>st</sup> 1953, known as Ali-Wongso-Arifin cabinet which based on the names of Prime Minister and the Vice.

For doing the job, the cabinet had four fields of work namely Internal Affairs (Security, General Election, Prosperity and Finance), West Irian, Foreign Affair (Nonblock and Active Politic, the Review of KMB Agreement), the Governmental Policy of Oil Mining in

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

North Sumatera and the Land Distribution in East Sumatera. When doing this, there were many interruption from the oppositions, for example, PUSA rebellion of Daud Beureuh in Aceh and the same for General Election.

The next criticism was for economic policy which known as the Indonesianization. About West Irian, the government tried to retake over it by proposing this matter to the General Court schedule of UNO. The Foreign affairs program might succeed though there was something unsatisfying. The greatest success in this cabinet era was the Asia-Africa conference on 18-24 April 1955 in Bandung which was attended by 29 countries and produced the document of Dasa Sila Bandung.

The governmental policy about the land distribution in East Sumatera was, the government asked the Governor of Medan to stop tractorizing wild housing and then supply it with the new residences. About mining in North Sumatera, the government could not decide whether the oil mining would be handled by the Dutch or not.

Running for about two years, the Ali cabinet finally fell down. It began with the criticism for the Minister of Economy policy about its Indonesianization. Many parties became the opposants, even PIR, the primary supporter of Ali I cabinet. The problem which really it down was the Army. After General Bambang Sugeng resigned, the government appointed Colonel Bambang Utojo to replace him. The appointment was boycotted by Colonel Zulkifli Lubis and other officer who disagreed. It was known as the "Incident of June 27th 1955". The government could not maintain cabinet because of being heavily pushed from Army and parties. On Juli 24'th 1955 the Prime Minister gave mandate back to Mohammad Hatta and it became the end of Ali I cabinet.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan bimbinganNya-lah penulisan skripsi yang berjudul Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam mencari dan mengolah data untuk skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun, yang telah diberikan kepada penulis sejak proses awal penulisan sampai selesainya skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Jurusan PIPS yang telah memberikan ijin dan mendukung penulisan skripsi ini.
2. Kaprodi Pendidikan Sejarah yang telah mendukung penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. G. Moedjanto.M.A., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi bantuan berupa masukan dan referensi yang sangat menunjang dalam penyusunan skripsi ini, serta bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan ini.
4. Bapak Drs. S. Adisusilo J.R, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. A.A. Padi, selaku Pembimbing Akademik yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi, serta Bapak Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah tanpa kecuali.
6. Staf Perpustakaan USD yang dengan sabar menangani dan membantu penulis dalam mencari referensi-referensi yang dibutuhkan.
7. Staf Perpustakaan Wilayah DIY dan Perpustakaan Kolsani yang juga telah membantu penulis dalam mencari referensi yang dibutuhkan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa penghargaan terhadap mereka.

Penulis menyadari akan keterbatasan baik pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki, yang sudah barang tentu akan menjadikan skripsi ini mengandung kelemahan dan kekurangan. Untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun dari semua pihak. Namun penulis sepenuhnya akan bertanggungjawab akan keaslian dan kebenaran skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi peminat sejarah Indonesia pada periode terkait pada khususnya dan perkembangan sejarah Indonesia pada umumnya.

Yogyakarta, Oktober 1997

Penulis

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSRTACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Sumber .....	13
F. Landasan Teori .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	28
H. Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan .....	37

<b>BAB II. PROSES PEMBENTUKAN KABINET ALI I</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Kabinet Ali I.	44
B. Susunan dan Program Kerja Kabinet Ali I	
1. Susunan Kabinet Ali I .....	63
2. Program Kerja Kabinet Ali I ....	67
C. Sekilas Tentang Ali Sastroamidjojo.	71
<b>BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KABINET ALI I</b>	
A. Dalam Negeri .....	77
1. Masalah Keamanan .....	83
2. Pemilihan Umum .....	91
3. Perekonomian .....	99
B. Irian Barat .....	103
C. Politik Luar Negeri .....	108
D. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pem- bagian Tanah di Sumatera Timur dan Tambang Minyak di Sumatera Utara...	120
<b>BAB IV. JATUHNYA KABINET ALI I</b>	
A. Perpecahan Dalam PIR .....	124
B. Masalah Angkatan Darat .....	129
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang masih muda usianya apabila dibanding dengan negara-negara di Eropa. Dalam kemerdekaannya yang telah mencapai setengah abad ini, Indonesia masih terus memperkokoh identitas diri sebagai suatu bangsa dalam perjalanannya. Sebagai dasar dari kehidupan di negara, Indonesia mempunyai Pancasila dan UUD 1945 yang digunakan sebagai pedoman hidup. Walaupun Indonesia telah mempunyai satu pedoman, bukan berarti perjalanannya selalu mulus sejak kemerdekaan hingga saat ini. Waktu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Tapi dalam perkembangan selanjutnya baik bentuk negara maupun bentuk pemerintahan banyak mengalami percobaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia.

Cobaan terbesar yang datang dari dalam adalah percobaan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti pemberontakan PRRI-Permesta, PKI, RMS, DI-TII Kartosuwiryo, sedangkan cobaan dari luar adalah keinginan pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan kekuasaannya di Indonesia, dengan dilancarkan



Agresi I dan II yang juga membawa akibat perubahan bentuk dari negara Indonesia. Akibat dari Agresi Belanda II, negara kesatuan kita berubah menjadi serikat (RIS) dengan UUD RIS. Tapi sejak tahun 1950 kembali lagi ke dalam bentuk kesatuan dengan menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan UUDS 1950 yang berlangsung sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial yang kemudian diubah menjadi sistem parlementer berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dengan maklumat tersebut, Komite Nasional Pusat mempunyai kekuasaan legislatif sebelum DPR terbentuk dan ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk MPR. Maka lahirlah Garis-Garis Besar Haluan Negara pertama pada tanggal 1 November 1945.<sup>1)</sup>

Kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945 yaitu Maklumat Wakil Presiden yang berisi anjuran pembentukan partai politik. Pokok pikiran maklumat menyatakan pemerintah menyukai timbulnya banyak

---

1) H.Roeslan Abdulgani," Beberapa Catatan Tentang Pengamatan Pancasila Dengan Penekanan Kepada Sila Ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila dan G.Moedjanto," Demokrasi di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis) dalam Subadhi (ed), *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi Koperasi dan Kebudayaan* ( Yogyakarta: Yayasan Widya Patria,1995),hlm. 15.

partai politik karena dalam partai politik segala aliran yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur yang bersifat untuk memperkuat perjuangan. Pemerintah berharap pembentukan partai politik dilakukan sebelum pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.<sup>2)</sup> Dengan seruan itu terbentuklah partai-partai seperti Masjumi, PNI, Parkindo, PKI, Partai Sosialis, Partai Katolik, Partai Buruh, dan sejumlah ormas pemuda dan wanita yang berafiliasi dengan salah satu partai. Masjumi ( Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia ) berdiri pada tanggal 7 November 1945, Partai Sosialis pada bulan Desember 1945 yang merupakan gabungan antara Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Amir Sjarifuddin, dengan Partai Rakyat Sosialis (Paras) pimpinan Soetan Sjahrir. Partai Kristen Indonesia pada tanggal 10 November 1945 dan Partai Katolik pada tanggal 8 Desember 1945. PKI berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945 yang diketuai oleh Mr. Mohammad Jusuf, Barisan Buruh Indonesia pada tanggal 9 November 1945 membentuk Partai Buruh Indonesia. Dalam bulan November 1945 berdiri Partai Rakyat Djelata pimpinan Soetan Dewanis yang dibentuk dari mereka yang simpati

---

2)Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman* ( Jakarta: LP3ES, 1995),hlm.14; lihat juga H. Roelan Abdulgani, *loc.cit.*, Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memoir* ( Jakarta: PT Tintamas,1979),hlm.473.

pada Tan Malaka.<sup>3)</sup>

Penggunaan demokrasi parlementer sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pandangan luar negeri terhadap kemerdekaan kita yang menganggap kemerdekaan kita merupakan hadiah dari Jepang, pimpinan yang punya citra negatif dikatakan sebagai kolaborator Jepang, ingin mendemokrasikan kehidupan rakyat, sehingga dengan sistem parlementer memberi kesan bahwa Republik Indonesia bukanlah kepanjangan tangan dari bentukan fasisme Jepang.<sup>4)</sup> Banyaknya wakil politik dalam parlemen tidak dengan sendirinya mengikis kesan fasisme yang ingin dihapuskan itu. Kesan demikian baru akan terhapus bilamana partai-partai politik itu berfungsi sebagaimana mestinya di dalam lembaga legislatif. Dalam rangka pemberian fungsi kepada partai politik terjadi pula perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ditransformasikan dari bentuk presidensial ke bentuk parlementer. Dalam bentuk itu kekuasaan presiden menjadi kecil, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, sementara kekuasaan eksekutif dija-

---

3) Ben Anderson, *Revolusi Pemuda* ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 231-260; Daniel Dhakidae, " Partai Politik dan Sistem Kepartaian", *Prisma*, tanggal 12 Desember 1981.

4) Syamsuddin Haris, *loc.cit.*, lihat juga H. Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, hlm. 40, Ben Anderson, *op.cit.*, hlm. 198-202.

lankan oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem itu yang dikenal sebagai Demokrasi Parlemerter atau yang disebut pula Demokrasi Liberal.<sup>5)</sup>

Hal yang menonjol dalam melaksanakan prinsip demokrasi pada saat itu adalah dihormatinya parlemen sebagai badan perwakilan rakyat. Karena itu kabinet memerlukan dukungan mayoritas dalam parlemen, dalam hal ini Komite Nasional Pusat. Jika Komite Nasional tidak lagi mempercayai kabinet maka kabinet mengembalikan mandat kepada Presiden. Hal itu dapat dilihat pada Kabinet Sjahrir I,II,III, Kabinet Amir Sjarufuddin I,II. Kabinet Sjahrir III yang menghasilkan Perjanjian Linggajati ( 15 November 1946) kehilangan kepercayaan Komite Nasional Pusat karena kegagalannya melaksanakan perjanjian itu dengan bukti Agresi Belanda I yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Kabinet Amir II kehilangan kepercayaan Komite Nasional karena Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dinilai sangat merugikan pihak Republik Seminggu kemudian kabinet mengembalikan mandat kepada presiden.<sup>6)</sup>

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mempraktekkan

---

5)Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta;PT Gramedia,1989),hlm.132.

6) Subadhi (ed),*op.cit.*,hlm.43.

sistem politik demokrasi liberal. Kurun waktu percobaan demokrasi liberal meliputi tahun 1950-1959 dari mulai pemberlakuan UUDS 1950 sampai Dekrit Presiden yang menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan berlaku kembali UUD 1945.<sup>7)</sup> Pada masa kurun waktu tersebut terjadi tujuh kali pergantian kabinet dengan masa pemerintahan tiap kabinet sangat singkat. Setelah percobaan demokrasi liberal dirasakan gagal, pemerintah mencoba menerapkan demokrasi model lain yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin yang dipersiapkan dari tahun 1957-1959, yang dikenal juga dengan masa transisi. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden maka negara kita kembali kepada UUD 1945.

Jadi ada tiga sistem politik yang berbeda yang masing-masing mengatasmakan demokrasi telah dicoba ditegakan selama setengah abad terakhir. Setelah merdeka kita menggunakan sistem Demokrasi Parlementer yang kemudian hari dianggap liberal. Menjelang berakhirnya dekade 1950-an dicoba pula sistem politik dengan nama Demokrasi Terpimpin yang ternyata bukan saja sangat tidak demokratis melainkan juga condong ke arah otoritarian. Dan yang berlaku setelah itu sampai sekarang adalah Demokrasi Pancasila yang diproklamirkan dengan tekad hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

---

7) Ibid., hlm.44.

murni dan konsekuen.<sup>8)</sup>

Dalam tulisan ini akan dibahas Indonesia pada masa Demokrasi Parlemeter atau yang disebut juga Demokrasi Liberal, karena pada awal kemerdekaannya Bangsa Indonesia baru mencoba untuk menjalankan sistem politik yang lepas dari pengaruh atau campur tangan negara lain. Adapun alasan pemilihan Demokrasi Liberal pada awal kemerdekaan sudah dijelaskan di depan. Yang menarik pada masa itu adalah sering terjadinya pergantian kabinet dengan masa pemerintahan yang sangat singkat. Mengapa hal seperti itu dapat terjadi ? Hal itulah yang akan dicoba untuk dibahas, dengan menitikberatkan pada salah satu kabinet yang memerintah pada kurun waktu tersebut. Kabinet yang dimaksud adalah kabinet Ali Sastoadidjojo I yang dikenal juga dengan nama Kabinet Ali I.

Pemilihan kabinet Ali I disebabkan kabinet Ali I merupakan kabinet yang paling lama memerintah di Indonesia, sekitar dua tahun yaitu mulai Agustus 1953 sampai Juli 1955, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dijalankan. Disamping masa pemerintahan yang lama, pembentukan kabinet Ali I juga mengalami suatu proses yang panjang yang didahului dengan adanya krisis kabinet selama 58 hari. Hal itu disebabkan antara partai - partai besar

---

8) Syamsuddin Haris, *op.cit.*, hlm.8.

Pada masa tersebut ingin menguasai pemerintahan dengan menteri dan program kerja yang sesuai dengan pandangan mereka. Pembentukan kabinet baru tersebut baru berhasil setelah mengalami lima kali percobaan pergantian formatur secara terpisah.<sup>9)</sup> Keberhasilan pembentukan kabinet baru tersebut dilakukan oleh Wongsonegoro (Ketua PIR), merupakan partai kecil yang menurut kebiasaan tidak akan diberikan kesempatan untuk membentuk kabinet. Banyak yang ragu - ragu apakah Wongsonegoro mampu membentuk kabinet baru yang terdiri dari PNI, NU, dan PIR, ditambah dengan beberapa partai kecil sedangkan Masjumi untuk pertama kalinya tidak ikut serta dalam pemerintahan.<sup>10)</sup>

Untuk mengetahui jalannya pemerintahan maka kita dapat melihat melalui program kerja yang mereka tetapkan. Dari program kerja tersebut kita dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan kabinet Ali I dalam melaksanakan program kerja yang telah mereka tetapkan.

---

9) Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (New York: Ithaca, 1962), hlm. 331. Pergantian formatur sebanyak lima kali disebabkan karena mereka gagal melaksanakan tugasnya, kesempatan pertama diberikan kepada Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Moh. Roem (Masjumi), kemudian diganti oleh Mukarto Notowidigdo (PNI) yang ditunjuk sampai dua kali, kemudian diganti oleh Burhanuddin Harahap (Masjumi) dan terakhir Wongsonegoro (PIR) yang berhasil membentuk kabinet baru.

10) *Ibid.*, lihat juga Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* (Jakarta: PT Kinta, 1974), hlm. 304.

Adapun program kerja Kabinet Ali I terdiri atas 4 pasal pokok:

1. Dalam negeri ( antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran, pemilu segera dilaksanakan )
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya
3. Luar negeri ( antara lain politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB)
4. Penyelesaian pertikaian politik.<sup>11)</sup>

Namun program kerja yang telah ditetapkan mendapat ujian, seperti pemberontakan Daud Beureuh di Aceh (pada tanggal 19 September 1953) yang mengganggu program dalam negeri yaitu meningkatkan keamanan. Untuk menghadapi masalah ini pemerintah berusaha memadamkan pemberontakan secara militer.<sup>12)</sup>

Usaha untuk meningkatkan kemakmuran boleh dikatakan gagal. Salah satu masalah berat yang dihadapi pemerintah adalah masalah administrasi negara yang belum tersusun baik sehingga menimbulkan korupsi dan birokrasi dimana-

---

11) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.309-317; G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.90; Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah atas Program Kabinet Ali Sastroamidjojo di DPR Jakarta* (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1954); Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1945-1970* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970), hlm.16-18.

12) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.345-348; Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.316-317; Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.139-140.



mana. Begitu merajalelanya korupsi dan birokrasi ini, Kabinet Ali I membentuk Kemetrian Urusan Kesejahteraan Negara yang bertujuan memberantas hal - hal buruk itu. Usaha itu gagal bahkan semakin menggila. Dalam memperbaiki administrasi negara ini Indonesia antara lain telah menerima bantuan dari Colombo Plan untuk melatih pegawai negeri. Dalam bidang ekonomi moneter dijumpai berbagai sistem impor - ekspor dan peraturan - peraturan yang berbelit - belit. Pada masa kabinet Ali I ini terkenal adanya lisensi istimewa yang menyebabkan makin meluasnya inflasi tahun 1954 dan 1955.<sup>13)</sup>

Pengisian jabatan tidak ditentukan oleh kecakapan dan kejujuran tetapi oleh kesetiaan pada partai. Berbagai penyelewengan terjadi karena partai - partai sedang menghadapi pemilu dan untuk melaksanakan kampanye banyak biaya yang diperlukan. Itu semua menyebabkan perekonomian kacau.

Pertentangan politik juga meruncing terutama antara PNI dan Masjumi serta Masjumi dan PKI. Kampanye Pemilu dengan menyelenggarakan rapat - rapat raksasa antara ketiga partai itu berjalan seru. Mereka saling mencela, kadang - kadang dengan nada yang sangat tajam, tidak peduli apakah seseorang sedang menjabat menteri.

---

13) Ariwiadi, *Ichtisar Sejarah Nasional Indonesia (Awal-Sekarang)* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 116.

anggota parlemen atau orang biasa.<sup>14)</sup>

Keberhasilan dari program kabinet Ali I, adalah politik luar negeri Indonesia dengan diselenggarakan Konferensi Asia - Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18-25 April 1955 di Bandung. Konferensi ini disponsori oleh lima negara Colombo yaitu India, Pakistan, Sialan, Burma, Indonesia yang menyetujui gagasan penyelenggaraan itu dalam konferensi lima Perdana Menteri di Colombo pada bulan Maret - April 1954. Konferensi ini kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai Dasa Sila (semangat) Bandung.<sup>15)</sup> Sedangkan dalam menghadapi Belanda (peninjauan kembali persetujuan KMB) kurang mendapat hasil yang memuaskan. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat mendapat dukungan kuat dalam KAA terutama dari sponsor-sponsornya. Dengan demikian di antara program kerja yang telah ditetapkan ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil dilaksanakan. Tingkat keberhasilannya lebih kecil dibanding dengan tingkat ketidakterhasilannya, hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan pelaksanaan program kerja yang telah

---

14) G.Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 91.

15) *Ibid.*, lihat juga Kahin, *The Asian-African Conference, Bandung, Indonesia April 1955* (New York: Ithaca, 1956); Roebelan Abdulgani, *The Bandung Connection Konferensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955* (Jakarta: Gunung Agung, 1980); *Sejarah, Cita-Cita, dan Pengaruh KAA Bandung* ( Jakarta : Yayasan Idayu, 1975).

ditetapkan seperti yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya mengenai pelaksanaan program kerja tersebut. Itulah yang menyebabkan kabinet Ali I mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden, yang ditambah juga dengan masalah di dalam tubuh TNI-AD di mana Ali tidak mampu melaksanakan kontrol atas ABRI terutama penolakan mayoritas pejabat senior untuk menerima calon pemerintah untuk menduduki KSAD.

## B. Rumusan Permasalahan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemerintahan kabinet Ali I maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembentukan kabinet Ali I ?
2. Bagaimana pelaksanaan program kerja kabinet Ali I ?
3. Mengapa kabinet Ali I menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tahun 1955 ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini mempunyai dua tujuan. Secara umum untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemerintahan kabinet Ali I dari tahun 1953 - 1955. Secara khusus untuk mendeskripsikan dan menganalisis situasi politik pada saat pembentukan kabinet Ali I, politik luar negeri dan politik dalam negeri Indonesia pada masa pemerintahannya, serta masalah yang menyebabkan kabinet Ali I mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, menambah informasi tentang sejarah nasional yang Indonesia sentris khususnya tentang Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
2. Bagi perkembangan pengetahuan sejarah diharapkan penulisan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan sejarah tentang pemerintahan Kabinet Ali I mengenai sejarah terbentuknya, pelaksanaan program kerja yang meliputi keadaan dalam negeri baik politik maupun sosial-ekonomi dan politik luar negeri, serta masalah - masalah yang menyebabkan Kabinet Ali I mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
3. Bagi para pembaca pada umumnya yang berminat pada sejarah Indonesia pada periode terkait, diharapkan dapat memperluas cakrawala dan pengetahuan khususnya mengenai sejarah Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Ali I.

**E. Tinjauan Sumber**

Guna membahas masalah yang dikemukakan maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh orang/ lembaga sejaman atau hasil rekaman sejaman dengan

peristiwanya. Sumber tersebut tidak berasal dari sumber lain (baik pandangan mata baik sebagai pelaku maupun sebagai pengamat). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang/lembaga yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (sumber dari tangan kedua).<sup>16)</sup>

Adapun sumber utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* karya Ali Sastroamidjojo (berupa autobiografi), surat kabar seperti *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Merdeka* tahun 1953-1955, *Keterangan Pemerintah Atas Program Kabinet Ali Sastroamidjojo* yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan RI tahun 1954, buku tentang penyelenggaraan KAA di Bandung karya H.Roeslan Abdulgani *Sejarah, Cita-Cita, dan Pengaruh KAA Bandung*. Adapun sumber pendukung yang digunakan antara lain : *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* karya Herbert Feith yang berbicara tentang Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 - 1965* oleh Herbert Feith dan Lance Castle (ed), *The Asian-African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955* karya Kahin, *Mengapa Aceh Bergolak* karya Hassan Saleh, *Sejarah Nasional Indonesia VI* karya Marwati Djoened

---

16) Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto)(Jakarta:Universitas Indonesia,1975),hlm.35.

Poesponegoro dan Nograho Notosusanto, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3* karya A.H. Nasution, *Politik Militer Indonesia 1945 - 1967* karya Ulf Sundhausen, *Pekembangan Militer Dalam Politik di Indonesia* karya Yahya A. Muhaimin dan beberapa literatur penunjang lainnya.

#### F. Landasan Teori

Berbicara tentang judul tersebut di atas ada beberapa konsep yang harus dipahami sebagai landasan berpikir, yaitu :

1. Sistem pemerintahan adalah pola pengaturan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya atau bila disederhanakan adalah hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan ini meliputi baik hubungan hukum, hubungan organisasi, hubungan kekuasaan, maupun hubungan fungsi.<sup>17)</sup>

2. Sistem Pemerintahan Parlementer ( *Parliamentary Executive Cabinet System* )

Esensi sistem ini adalah pertanggungjawaban badan eksekutif kepada badan legislatif (tidak peduli nama badan-badan tersebut). Yang menjadi titik sentral pembahasan sistem pemerintahan parlementer

---

17) Ruedi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* ( Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm.140.

terbatas pada hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif saja. Badan eksekutif bertanggungjawab kepada badan legislatif, karena eksekutif dibentuk atas persetujuan dan kepercayaan yang diberikan legislatif. Berapa lama eksekutif memegang kekuasaan tergantung pada adanya mayoritas dalam legislatif yang mendukungnya. Pertanggungjawaban eksekutif ini disebabkan oleh karena eksekutif dipilih dan diangkat badan legislatif baik dari luar maupun dari kalangan parlemen sendiri. Badan eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan mandataris parlemen dan setiap waktu mandat yang diberikan dapat dicabut. Pencabutan mandat ini merupakan tindakan terakhir parlemen yaitu apabila eksekutif tidak dapat memberikan pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya dinilai tidak memuaskan mayoritas dalam parlemen.<sup>18)</sup>

3. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang mendasarkan pada prinsip kebebasan individu. Pemerintah hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali menyangkut kepentingan umum. Kebebasan yang menyangkut individu tidak mendapat campur tangan dari pemerintah akan tetapi yang menyangkut kepen-

---

18) Ibid., hlm.141.

tingan umum tetap dilakukan oleh negara. Maka ada kemungkinan yang minoritas bisa menguasai yang mayoritas. Pelaksanaannya dalam pemerintahan menggunakan sistem parlementer yang berarti pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen. Setiap kali ada ketidakcocokan maka DPR bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, sehingga dalam demokrasi ini wajar bila dalam waktu singkat kabinet dapat berganti - ganti. 19)

4. Menurut Locke yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno, kekuasaan negara liberal adalah penguasa menerima kekuasaannya dari masyarakat demi suatu tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat. Maka penggunaan kekuasaan itu hanya sah dalam rangka tujuan itu dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi negara tidak berhak untuk mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencampuri segala bidang kehidupan masyarakat. Negara tidak mempunyai legitimasi untuk mengurus segala-galanya. Inti paham liberal tentang negara adalah bahwa kekuasaan negara harus seminimal mungkin. 20)

---

19) Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: Gramedia,1993),hlm.50.

20) Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* ( Jakarta:PT Gramedia,1987),hlm.229



5. Sistem Kabinet Parlemonter, dengan ciri-ciri dasarnya adalah : 21)
- a. Parlemen merupakan satu - satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
  - b. Anggota dan pemimpin kabinet ( perdana menteri ) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet biasanya juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda yakni legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti yang memerintah adalah partai yang memenangkan pemilihan umum atau koalisi partai - partai manakala tidak ada satu partai mencapai suara mayoritas. Apabila dikonfirmasi dengan UUDS 1950 terdapat perbedaan, menurut UUDS 1950 dalam pembentukan kabinet baru memerdekakan presiden dalam penunjukan dan juga dalam jumlah yang ditunjuk karena menetapkan, presiden menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet ( pasal 51 ayat 1). Presiden mengangkat seorang dari pada menteri - menteri yang

---

21) Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* ( Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 170.

dicalonkan menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri - menteri yang lain ( pasal 51 ayat 2 ). Demikian juga dengan pasal 61 mengatakan kenggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung, Ketua dan Wakil Ketua atau anggota Dewan MA, Ketua dan Wakil Ketua atau anggota Dewan Pengurus Keuangan, Presiden Bank-sirkulasi dan jabatan - jabatan yang ditentukan dengan undang-undang, seorang anggota DPR yang merangkap menjadi menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melaksanakan kewajibannya sebagai anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan menteri.<sup>22)</sup>

- c. Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan dari parlemen. Hal itu berarti parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala dari kelompok anggota tidak mendapat dukungan mayoritas dalam DPR.
- d. Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, perdana menteri dapat minta kepada Presiden untuk membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru, menurut UUD 1950

---

22) A.K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam Teori dan Praktek* ( Jakarta :Pembangunan,1956), hlm.27-28 dan 73.

lamanya 30 hari. 23)

e. Fungsi kepala pemerintahan (Perdana Menteri) dan fungsi kepala negara (Presiden/Raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

6. Menurut Henry B. Mayo yang dikutip Mahfud, sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas persamaan prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>24)</sup>

7. Ideologi Liberal dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>25)</sup>

- a. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
- b. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
- c. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya

---

23) Ibid., hlm.42

24) Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty,1993), hlm.19.

25) Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm.35

sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan sendiri.

- d. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk, dengan kata lain pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.

#### 8. Partai Politik

- a. Merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi dan program tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijaksanaan umum yang mereka susun. Alternatif kebijaksanaan yang mereka susun itu merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.<sup>26)</sup>

- b. Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

---

26) Ibid., hlm.116.

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>27)</sup>

9. Menurut Henry B. Mayo, Demokrasi mempunyai nilai-nilai khusus sebagai berikut:<sup>28)</sup>

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. Demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mengakui sahnya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian semacam itu dan mengatur penyelesaiannya secara damai melalui perundingan politik. Pada prinsipnya demokrasi tidak menggunakan kekerasan yang absah untuk menekan orang yang berlainan pandangan politiknya. Penggunaan tindakan kekerasan merupakan tindakan terakhir dalam suatu sistem demokrasi dan malah tidak dipergunakan sama sekali dalam banyak penyelesaian pertikaian politik.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Dari pengalaman kita mengetahui banyak sekali jenis perubahan sosial yang timbul karena perubahan teknologi. Metode politik demokrasi seperti

---

27) Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm.160.

28) Henry B. Mayo, " Nilai-Nilai Demokrasi", dalam Miriam Budiardjo (ed), *Masalah Kenegaraan* ( Jakarta: PT Granedia, 1975), hlm.166.

fleksibilitas, kepekaan terhadap pendapat umum dan pengaruh kepemimpinan, keterbukaan terhadap pendapat-pendapat yang berbeda, semua hal ini dapat menjamin penyesuaian diri secara politis, terhadap hal-hal yang menimbulkan perubahan itu.

c. Pergantian penguasa secara teratur. Demokrasi juga menyelesaikan suatu masalah politik yang jauh lebih lama yaitu mencari pengganti yang sah dari penguasa yang sedang berkuasa dengan cara damai. Demokrasi merupakan suatu jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak ada satu sistem lainpun yang dapat memberikan jawaban secara memuaskan dalam suasana pemikiran modern, bagaimana mencari dan mengganti penguasa dengan cara damai dan abah.

d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Kebijakan demokratis merupakan putusan yang tidak memberikan semua yang dituntut masyarakat, ia tidak hanya berupa kompromi mekanis, tetapi suatu kebijakan baru yang dibentuk dari dialog dan perjuangan terus menerus dari proses politik itu. Ada yang menamakannya metode diskusi kreatif dengan mengatakan bahwa lebih tinggi nilainya putusan yang kita buat, atau yang kita ikut membuatnya daripada memperoleh putusan yang dibuatkan orang lain untuk kita (sekalipun

mungkin lebih bijaksana sifatnya) dan kita dipaksa mematuhi.

e. Nilai keanekaragaman. Keanekaragaman selalu ada dalam setiap masyarakat. Demokrasi hanya mengakui keanekaragaman itu ada dan menganggap sah kalau terdapat pendapat dan kepentingan yang berlain-lainan. Adanya pilihan yang lebih banyak sudah nyata lebih baik, hal itu merupakan syarat penting untuk perbaikan moral, untuk lebih dekat kepada kebenaran. Keanekaragaman itu selalu ada batasanya dalam setiap masyarakat, selalu ada kebutuhan untuk bersatu dalam pendapat di dalam masyarakat, walaupun keinginan ini mungkin kabur dan tidak dapat diukur.

f. Menegakan keadilan, beberapa hal yang berhubungan dengan hal ini adalah :

a). Keadaan terbaik yang diharapkan dari suatu sistem politik adalah apa yang tidak adil itu jangan pernah terjadi, tetapi apa yang tidak adil itu diperhatikan, dan kalau mungkin diperhatikan untuk selanjutnya dielakan sebelum terjadi. Hubungannya dengan demokrasi terletak dalam kebebasan-kebebasan politik baik prosedurnya, keterbukaan dan kemungkinan memperbaiki kesalahan.

b.) Kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam



negara demokrasi jauh lebih kecil apabila dibanding dengan negara di mana kebebasan politik ditindas dan tidak satupun jaminan politik. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap kelompok dan kepentingan yang cukup besar untuk mengajukan wakilnya, kepentingan yang merasa dirugikan jarang sekali dikesampingkan pada saat keputusan politik dibuat.

- c). Demokrasi menyangkut kompromi atau harmoni politik dengan jalan menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
- d). Dalam praktek demokrasi hampir selalu menimbulkan pemerintahan untuk rakyat. Akibatnya memperbesar jumlah orang yang harus diliputi keadilan dan memperkecil jumlah orang yang terkena ketidakadilan.
- e). Demokrasi dan prinsip mayoritasnya tercermin dalam kata-kata Lincoln: "... kepercayaan akan keadilan mutlak dari rakyat". Ini mungkin merupakan pelipur lara terbaik yang dapat diberikan kepada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil, dan akan lebih terhibur lagi kalau memperhatikan sistem-sistem politik yang lain.

g. Sistem politik paling baik dalam memajukan ilmu



pengetahuan, argumentasinya,

- a). Metode ilmiah dan demokrasi sama-sama percaya kepada nilai moral yang sama pula. Sebagaimana ilmu sosial yang pasti terlibat dalam persoalan moral demikian juga dengan metode ilmiah yang pada pokoknya merupakan usaha moral. Demokrasi juga mengandung nilai-nilai tersebut baik dalam diskusi, pemberian suara, pembuatan undang-undang dan sebagainya.
- b). Demokrasi dan ilmu dikatakan berdasarkan dalil-dalil yang sama mengenai norma yaitu bahwa manusia rasionil dan cerdas.
- h. Adanya nilai-nilai kebebasan dalam demokrasi. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah :
  - a). Kita dapat memilih hal-hal politik sebagaimana dengan hal-hal yang lain.
  - b). Menurut pengertian politik kita mempunyai kebebasan memilih, kalau kita tidak ada pilihan yang baik untuk dipilih, kalau kita dipaksa atau diancam orang lain, walaupun dalam keadaan ini sebagaimana dalam keadaan lain, perbedaan tingkat hukuman yang diberikan pada pilihan bebas akan besar pengaruhnya, karena paksaan fisik dapat berubah menjadi paksaan sosial lain yang

lebih lunak.

- c). Demokrasi memberi cukup peluang untuk semua pandangan agar didengar kepentingannya yang sesungguhnya sebagaimana juga kepentingan-kepentingan yang dianggap ada atau hanya keinginan saja.
- d). Dalam politik kita harus menolak ajaran yaitu, kalau saya telah melakukan tugas saya atau melakukan apa yang benar, maka saya bebas, tetapi saya tidak bebas kalau saya tidak menjalankan tugas, atau kalau saya melakukan sesuatu yang salah.
- e). Sebagaimana halnya benda bernyawa dan tidak bernyawa, kita tunduk kepada hukum alam seperti kimia, fisika, dan ilmu hayat, itu berarti bahwa kita tidak bisa bebas dalam kehidupan politik dan sosial.
- f). Orang bagaimanapun bebasnya dalam hukum dan politik, pasti dibatasi oleh kekangan-kekangan yang ada dalam masyarakat seperti adat kebiasaan, tekanan ekonomi dan sosial dan sebagainya. Adanya kita dalam masyarakat ini hanyalah mungkin dengan syarat bahwa beberapa kebebasan tindakan kita harus ditinggalkan.

1. Nilai dapat diberikan kepada demokrasi karena

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem-sistem lain. Sistem lain tersebut merupakan sistem dimana terdapat suatu golongan minoritas yang membuat keputusan politik, tentu saja golongan minoritas yang memenuhi syarat tertentu. Sekarang ini terdapat kebencian mendalam dan hampir universal terhadap pendapat bahwa satu jenis golongan minoritas mempunyai hak atas kekuasaan untuk memerintah.

#### G. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh disebut *historiografi* atau penulisan sejarah.<sup>29)</sup> Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia. Metode analisa ini mencakup empat hal yaitu :<sup>30)</sup>

- a. Pemilihan obyek untuk diselidiki
- b. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut.
- c. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya.

---

29) Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm.32

30) *Ibid.*, hlm.34.

d. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber - sumber atau bagian dari sumber-sumber yang terbukti sejati.

Jadi setelah ditentukan subyek yang akan diteliti atau ditulis maka dikumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan kemudian dipetik unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber tersebut untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Sehingga langkah-langkah penulisan yang diterapkan dalam metode sejarah mencakup pokok-pokok sebagai berikut :<sup>31)</sup>

1. Heuristik : penemuan sumber
2. Kritik sumber : ekstern dan intern
3. Analisis sumber : penguraian informasi dan relasinya satu dengan yang lainnya
4. Sintesis sumber : perbandingan dan pemaduan
5. Interpretasi : menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat
6. Krobokasi : pengukuhan sumber
7. Historiografi : penulisan sejarah sehingga menghasilkan kisah atau kajian

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian

---

31) Ibid., hlm.18.

atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungan dengan kejadian atau keadaan masa lalu. Metode historis dapat dilakukan dengan dua cara :

- a. Untuk menggambarkan gejala - gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas pada kurun waktu tertentu pada masa lampau.
- b. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Metode historis lebih memusatkan pada data masa lampau berupa peninggalan, dokumen, arsip, benda bersejarah, dan lain-lain.<sup>32)</sup>

Ditinjau dari sudut penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan ( *library research* ). Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur tidak hanya terbatas pada buku-buku tetapi juga berupa bahan dokumentasi, majalah,

---

<sup>32)</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gama University Press,1985),hlm.30.

keran, bahan tertulis, dan lain-lain. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang diselidiki.<sup>33)</sup>

Penelitian pustaka menurut I Gusti Ngurah Agung adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>34)</sup> Sedangkan penyajian data yang terkumpul menggunakan metode deskriptif analitik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian ( seseorang , lembaga, masyarakat, dan lain-lain ) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada tahap awal tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar lebih jelas keadaan atau kondisinya. Pada tahap ini bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.

Fakta yang ditemukan diberi penafsiran yang adekuat dengan kata lain diberi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Jadi ciri-ciri pokok metode ini adalah :

---

33)Ibid.

34) I Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis* ( Jakarta: PT Gramedia , 1992),hlm.9.

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan ( saat sekarang ) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang adekuat.<sup>35)</sup>

Dengan uraian diatas, maka sebagai langkah penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan memetik unsur-unsur yang dipercaya dari sumber tersebut untuk menjawab masalah yang telah ditentukan.
2. Sumber-sumber tersebut merupakan data-data masa lalu yang digunakan sebagai informasi untuk menjawab permasalahan, dan sumber-sumber tersebut penulis himpun dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan berupa buku, majalah, koran, bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya. Sumber tersebut telah diuji kebenarannya melalui kritik sumber kemudian dianalisis, disintesis serta dibuat interpretasinya.
3. Setelah data-data terkumpul maka data-data tersebut disajikan dalam bentuk penulisan/historiografi yang bersifat deskriptif analitik yaitu prosedur pemecahan

---

35) Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm.64.

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek /subyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul.

Di samping menggunakan metode di atas, penulis juga memakai pendekatan tingkah laku, karena sesuai dengan topik yang dibahas yaitu mengenai masa pemerintahan yang dilakukan oleh seorang tokoh sebagai perdana menteri (Ali Sastroamidjojo) . Untuk dapat menganalisis program kerja dan keputusan-keputusan yang dibuat selama masa pemerintahannya, kita harus mengenal lebih jauh tentang latar belakang kehidupan Ali baik lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan sebagainya karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku/tindakan seseorang. Faktor-faktor penentu dari tingkah laku diantaranya adalah:<sup>36)</sup>

### 1. Akibat Struktural

Kondisi akibat struktural seperti ledakan keuangan,kepanikan, perputaran mode, kegemaran, tidak mengganggu masyarakat sederhana dan tradisional, tapi di bawah kondisi tekanan ekonomi kemungkinan timbul respon terhadap masalah tersebut, misalnya masalah pemindahan kepemilikan. Akibat dari tekanan tersebut umumnya memberi tipe dari tingkah laku secara

---

36) Neil J.Smelser, *Theory of Collective Behavior* (New York: The Free Press,1962),hlm.15.



kolektif.

## 2. Ketegangan struktural.

Secara garis besar ketegangan struktural dibagi dalam tipe kemenduaan / ambigu. Konflik, perampasan, ketidaksesuaian, merupakan ketegangan sosial yang dapat mempengaruhi tingkah laku pada umumnya.

## 3. Pertumbuhan dan penyebaran generalisasi keagamaan.

Kepercayaan diuraikan dalam beberapa bentuk seperti histeris, pemenuhan harapan, permusuhan, ketiganya ini berorientasi pada norma dan nilai. Hanya dalam kesempatan yang spesifik kepercayaan dapat menjadi faktor penentu tingkah laku yang signifikan. Kesempatan ini muncul apabila kepercayaan dikombinasikan dengan tingkat kepanikan lainnya.

## 4. Faktor-faktor pemicu.

Akibat ketegangan sosial yang dikombinasikan dengan kepercayaan tidak dengan sendirinya menghasilkan tingkah laku yang kolektif, tapi harus ada faktor pemicu sehingga tingkah laku kolektif dapat terjadi, misalnya pertengkaran antara dua orang yang berbeda ras. Dalam beberapa kasus faktor pemicu ini membuat kepercayaan menjadi konkrit. Faktor pemicu tidak dengan sendirinya menjadi faktor penentu yang penting dari segala sesuatu tapi mesti ada dalam faktor penentu lainnya.

## 5. Mobilisasi tindakan massa.

Faktor penentu ini baru dapat dilacak pertumbuhannya apabila sisa suatu kondisi/kejadian membawa pengaruh bagi suatu kelompok dalam tindakannya. Dalam kasus permusuhan, perpecahan, reformasi, revolusi, proses mobilisasi tingkah laku pimpinannya sangat penting untuk diketahui.

### 6. Operasi kontrol sosial.

Operasi kontrol sosial dapat dibagi dalam dua tipe, pertama, kontrol sosial yang meminimalkan akibat dan ketegangan. Dalam kontrol ini mencegah terjadinya tingkah laku karena mereka menyerang faktor penentu yang sangat tidak spesifik, kedua, kontrol sosial dimobilisasi setelah tingkah laku kolektif mulai menuju materialisme. Dalam kontrol ini tingkah laku secara potensial muncul ke permukaan atau secara aktual menimbulkan ledakan dari tingkah laku.

Dengan melihat faktor-faktor yang dapat menentukan tingkah laku, maka di dalam menganalisis tindakan seseorang, paling tidak harus bisa diketahui apa yang menjadi tujuannya, apa hubungan antara tujuan dan tindakan yang diambilnya untuk mencapai tujuan tersebut. dalam hal ini harus dipercaya bahwa seseorang dapat memperagakan pengetahuan atau kepercayaannya secara

verbal/lisan atau dengan tindakan lainnya.<sup>37)</sup>

Keuntungan yang diperoleh dari mempelajari tingkah laku adalah di bawah kondisi interaksi yang stabil, beberapa elemen sosial seperti mitos, ideologi, potensi untuk pemberontakan, dan sebagainya salah satunya dapat dikontrol atau ditangani secara wajar dan sebab itu tidak selalu dapat diobservasi. Dengan adanya peristiwa dari tingkah laku kolektif elemen-elemen tersebut menjadi terbuka, kita dapat mengobservasinya dalam keadaan sebenarnya yang dapat kita pelajari secara langsung, yang komponen-komponennya biasanya terlupakan.<sup>38)</sup>

Jadi dengan menggunakan metode pendekatan tingkah laku diharapkan dalam menganalisis tindakan / kebijakan yang diambil oleh Ali Sastroamidjojo dalam masa pemerintahannya sebagai perdana menteri, penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga ia mengambil kebijakan tersebut. Diharapkan juga dengan pendekatan ini penulis dapat mengetahui tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai Ali selama masa pemerintahannya.

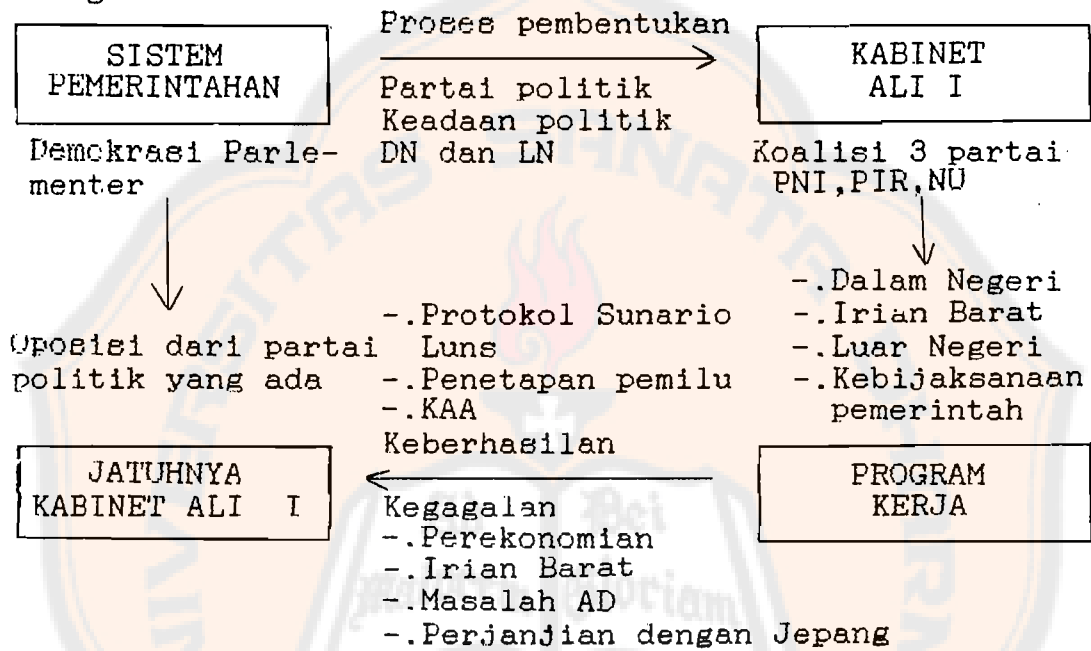
---

37) Robert F. Berkhofer, Jr. *A Behavioral Approach To Historical Analysis* ( New York: The Free Press, 1969), hlm. 51- 52.

38) Neil J. Smelser, *op.cit.*, hlm. 3.

H. Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan

Agar konsep-konsep dalam landasan teori menjadi satu perpaduan pemikiran maka akan disintesisikan dalam suatu kerangka teoritis. Agar lebih mudah akan dibuat bagan sebagai berikut:



Dari bagan di atas dapat dijelaskan tentang sistem pemerintahan yang dipakai Indonesia pada waktu itu. Pada kurun waktu itu Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dikenal juga dengan nama Demokrasi Liberal, demikian juga halnya pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955).

Masalah pertama yang akan dibahas adalah proses pembentukan Kabinet Ali I, hal itu menjadi penting karena dalam proses pembentukannya diawali dengan adanya krisis kabinet yang berlangsung hampir dua bulan. Krisis ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah pembentukan

kabinet yang baru. Mengapa hal tersebut dapat terjadi, tentunya harus dilihat pada kondisi pemerintahan / politik Indonesia pada waktu itu, untuk itulah harus diketahui konsep mengenai sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan demokrasi liberal seperti yang diungkapkan oleh Rusadi Kantaprawira, Miriam Budiardjo, Franz Magnis-Suseno, Ramlan Surbakti dan Henry B. Mayo.

Pada intinya dalam sistem demokrasi liberal /parlementer, kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan tergantung pada adanya mayoritas dalam legislatif yang mendukungnya. Dengan kata lain setiap tidak ada kecocokan, Parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, sehingga wajar dalam waktu singkat kabinet dapat berganti. Demikian juga dengan penunjukan formatur, apabila suatu partai tidak mendapat dukungan mayoritas partai lainnya, maka partai tersebut tidak dapat membentuk kabinet yang baru.

Untuk permasalahan yang menyangkut program kerja dan jatuhnya kabinet juga tidak terlepas dari konsep -konsep yang telah dijelaskan di atas. Dalam pelaksanaan program kerja sangat tergantung pada situasi politik/partai politik yang ada pada waktu itu baik yang berkoalisi maupun yang beroposisi. Maka dari itu perlu diketahui konsep partai politik seperti yang ditulis oleh Ramlan Surbakti dan Miriam Budiardjo yaitu suatu kelompok yang

yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Dengan demikian keberhasilan atau kegagalan dari Program kerja yang telah ditetapkan sangat tergantung pada partai politik yang mendukungnya. Semakin banyak partai politik yang berposisi semakin besar kegagalan yang akan diperolehnya yang akhirnya akan menyebabkan jatuhnya kabinet karena sudah tidak dipercaya lagi untuk melanjutkan pemerintahannya dan akan diganti dengan kabinet yang baru.

Ditinjau dari sistem yang dipakai pada waktu itu, maka hal tersebut di atas dapat dibenarkan, karena demokrasi mempunyai nilai-nilai khusus seperti yang dipaparkan oleh Henry B. Mayo, di antaranya adanya pergantian penguasa secara teratur, adanya keanekaragaman, penyelesaian pertikaian politik secara damai dan sukarela serta terjadinya perubahan secara damai. Jadi jatuhnya Kabinet Ali I karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan tuntutan dari partai oposisi yang tidak percaya lagi pada kabinet sehingga partai oposisi memenangkan suara dalam parlemen dapat dibenarkan mengingat sistem pemerintahan yang dipakai dan situasi politik pada waktu itu.

Di samping konsep-konsep di atas, agar penelitian

ini dapat ditulis menjadi sebuah kajian sejarah yang terangkai secara sistematis maka diperlukan suatu metode sejarah. Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka maka kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, majalah, maupun koran. Setelah ditemukan sumber yang telah diuji kebenarannya, kemudian dianalisis untuk mengetahui informasi yang terdapat dari sumber tersebut lalu dibandingkan atau digabungkan dengan sumber lain yang relevan, lalu diadakan interpretasi terhadap data yang telah ada agar dapat ditulis menjadi suatu cerita (kajian) sejarah/historiografi.

Penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang diawali dengan uraian situasi Indonesia terutama dalam bidang politik pada awal kemerdekaan, perubahan bentuk negara akibat Agresi Belanda II dan kembali lagi menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem tersebut di Indonesia terdapat banyak partai politik yang saling berposisi untuk merebut kedudukan di pemerintahan. Salah satu yang

berhasil adalah kabinet Ali Sastroamidjojo I yang merupakan koalisi dari partai PNI, PIR, dan NU yang mulai bertugas pada tanggal 1 Agustus 1953. Untuk mengetahui jalannya pemerintahannya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

## **BAB II PROSES PEMBENTUKAN KABINET ALI I**

Penjelasan dalam bab ini akan dibagi dalam tiga sub bab yaitu proses terbentuknya kabinet Ali I yang dimulai sejak jatuhnya kabinet Wilopo dan mengalami lima kali percobaan formatur . Sub bab yang kedua mengenai program kerja dan susunan kabinet serta penjelasan program kerja yang telah ditetapkan kabinet Ali I yang meliputi program Dalam Negeri, Luar Negeri, Irian Barat, dan Kebijakan Pemerintah. Sub bab yang ketiga berbicara tentang Ali Sastroamidjojo sendiri untuk mengetahui latar belakang keluarga, pendidikan, dan perjalanan karirnya sehingga dapat memberi gambaran siapa Ali Sastroamidjojo itu.

## **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KABINET ALI I**

Dalam bab ini dibagi menjadi empat sub bab yang masing-masing menjelaskan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Penjelasan dalam bab ini dibuat secara sistematis agar tetap berkesinambungan dengan bab sebelumnya. Sub bab



Yang pertama membahas tentang program Dalam Negeri yang menyangkut masalah politik, keamanan, ekonomi, sub bab yang kedua membahas masalah Irian Barat, sub bab yang ketiga membahas masalah politik luar negeri dan sub bab yang keempat membahas tentang kebijaksanaan pemerintah. Dalam bab ini dijelaskan pula faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan program kerja tersebut.

#### **BAB IV JATUHNYA KABINET ALI I**

Uraian dalam bab ini membahas masalah-masalah yang menjadi faktor utama jatuhnya kabinet Ali I. Keguncangan mulai dirasakan kabinet Ali I ketika terjadi perpecahan dalam tubuh PIR yang merupakan partai utama pembentuk kabinet. Krisis ini kemudian disusul dengan masalah yang terjadi dalam tubuh Angkatan Darat, di mana pimpinan AD menolak KSAD baru yang dicalonkan pemerintah sehingga AD melakukan oposisi terhadap kabinet.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab penutup ini akan disimpulkan berbagai jawaban dari permasalahan seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sehingga pembaca dapat memahami gambaran secara keseluruhan mengenai masa pemerintahan kabinet

Ali I yang berlangsung dari tahun 1953-1955.  
Itulah garis besar isi dari penulisan penelitian ini.  
Untuk mengetahui lebih lanjut maka akan dijelaskan pada  
bab-bab berikutnya.



## BAB II

### PROSES PEMBENTUKAN KABINET ALI I

#### A. Sejarah Terbentuknya Kabinet Ali I

Setelah kabinet Wilopo mengundurkan diri pada tanggal 1 Agustus 1953, kabinet tersebut menjadi demisioner mulai tanggal 3 Juni 1953, karena belum bisa dibentuk kabinet baru. Kedemisioneran kabinet Wilopo ini berlangsung sampai 58 hari lamanya dan merupakan yang paling lama di dalam sejarah pemerintahan RI. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu itu soal-soal politik yang hangat masih menjadi perselisihan pendapat di antara partai-partai politik yang sukar untuk dikompromikan. Oleh karena itu tiap - tiap partai besar terutama Masjumi dan PNI, menginginkan menjadi pembentuk kabinet sehingga dapat menduduki kursi Perdana Menteri bagi partainya. Sekali dapat membentuk kabinet tentulah partai itu dapat pula menentukan programnya yang akan dijadikan landasan untuk memecahkan soal - soal tersebut menurut keyakinannya sendiri.

Masalahnya tidak ada satu partai pun mempunyai kekuatan secara mutlak di dalam DPRS, tiap - tiap kabinet terpaksa disusun sebagai kabinet koalisi, sehingga persoalan yang menjadi perselisihan tidak dapat dipecahkan secara memuaskan sebab suatu kabinet koalisi selalu bersifat kompromi. Itulah yang menyebabkan sering

bergantinya kabinet, sehingga tidak bisa tercapai kestabilan politik.<sup>1)</sup>

Dengan jatuhnya kabinet Wilopo segera terjadi pertikaian kecil mengenai siapa yang akan jadi formatur berikutnya. Banyak pemimpin partai politik berpendapat kalau penggantinya juga merupakan suatu kabinet koalisi, ketidakstabilan politik masih akan terus berlangsung. Orang menduga bahwa kabinet yang akan dibentuk nanti seharusnya dipegang oleh Masjumi, karena jatuhnya kabinet Wilopo itu akibat maksud penarikan kembali menteri - menteri Masjumi. Tetapi sekarang setelah ternyata Perdana Menteri Wilopo mendahului menyerahkan mandatnya kembali, sebelum Masjumi bisa mengambil tindakan maka keadaan menjadi ruwet dan sukar untuk mendapatkan suatu kepastian dan tetap merupakan suatu teka - teki.<sup>2)</sup>

Muncullah berbagai pendapat atau gagasan untuk mengganti kabinet Wilopo tersebut. Ada gagasan untuk membentuk suatu kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta, yang tidak berpartai dan dianggap

---

1) Ali Sastroamidjojo, *Tonggak - Tonggak di Perjalananku* (Jakarta : PT Kinta, 1974), hlm. 302, lihat juga Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 150.

2) " Reaksi Terhadap Jatuhnya Kabinet Wilopo: Formateurs Baiknya Diusulkan Parlemen " dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 4 Juni 1953, hlm. 1 klm 6-7.

orang kuat.<sup>3)</sup> Penunjukan Hatta sebagai formatur mendapatkan tanggapan dari dua grup. Grup pertama menyckong Kabinet Hatta dengan alasan walaupun dalam konstitusi 1950 tidak ada pasal yang mengizinkan dibentuknya kabinet presidensiel, tapi dalam keadaan darurat hal tersebut dapat dibenarkan, karena sekarang negara tengah mengalami krisis kabinet maka Hatta dapat ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Sedangkan PNI tidak keberatan kalau Bung Hatta ditunjuk sebagai formatur asal beliau mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai wakil presiden. Dengan perkataan lain PNI tidak menyetujui kabinet Presidensiel. Sidik Djojokusarto, ketua umum PNI juga tidak condong dengan Kabinet Hatta yang berkoalisi dengan Masjumi dan PSI.<sup>4)</sup>

Penyanggahan penunjukan Hatta juga datang dari Aidit (PKI), ia mengajukan alternatif yang disebut sebagai Front Persatuan Pembangunan di mana Masjumi dan PSI tidak dimasukan karena berdasarkan pengalaman kedua partai itu lebih kebarat-baratan.

Alternatif lain dari juru bicara Perti dan Parindra, juga dari Sidik Djojokusarto (PNI), mengatakan masih ada kemungkinan dari Masjumi- PNI untuk membentuk

---

3) Ali Sastroamidjojo, *loc.cit.*, lihat juga Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* ( New York : Ithaca ,1962 ),hlm. 332.

4) *Ibid.*

kabinet Perdamaian Nasional atau dengan kata lain Kabinet Inti.<sup>5)</sup> Pendapat lain mengatakan untuk mengatasi kesukaran tersebut, harus dibentuk kabinet yang sungguh - sungguh mendapat backing/dukungan dari parlemen. Salah satu jalan untuk mencapai hal itu maka menurut kalangan tersebut sebaiknya formatur ditunjuk oleh presiden atas usul dari parlemen.

Dengan demikian kabinet baru itu nanti dalam usahanya menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi mendapat dukungan penuh dari parlemen.<sup>6)</sup> Sementara itu beberapa kalangan menyatakan pada waktu itu sebaiknya dibentuk sebuah Zaken Kabinet, yang tidak terikat partai- partai. Kabinet semacam itu dimaksudkan untuk menyelesaikan soal - soal sulit yang ditinggalkan Kabinet Wilopo. Dalam hubungan itu disarankan supaya Zaken Kabinet dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta. Mungkin hal itu agak sulit karena kedudukannya sebagai wakil kepala negara, tapi mengingat masalah yang dihadapi negara maka jangan terlalu ditekankan kepada fungsinya tadi.<sup>7)</sup>

Menurut Supomo, UUDS tidak memungkinkan dibentuknya kabinet presidensiel, jika yang dimaksud dengan kabinet

---

5) Herbert Feith, loc.cit.

6) Kedaulatan Rakyat, loc.cit.

7) Ibid.

presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada parlemen, karena pasal mengenai hal itu tidak ada. Kabinet yang paling baik dalam kondisi yang serba sulit adalah kabinet yang kuat dan mempunyai *gezag*. Hal itu dapat dicapai apabila partai - partai yang akan mendukung pemerintahan yang baru itu nanti terlebih dahulu menyetujui suatu program yang konkrit. Jadi tidak hanya berupa pokok - pokok tapi juga mengenai cara pelaksanaan pokok tersebut secara konkrit. Yang akan duduk di dalam kabinet itu perlu orang - orang yang di dalam masyarakat punya *gezag* dan dapat pula didukung oleh partai - partai.

Dengan demikian pembagian jabatan menteri - menteri tidaklah harus dititikberatkan kepada suatu partai melainkan kepada " *the right man in the right place* " dengan memperhitungkan *gezag*-nya terhadap masyarakat dan dukungan partai kepadanya, sebab yang akan dilaksanakannya adalah pokok - pokok dalam program bersama dan cara - cara yang telah disetujui tadi.<sup>8)</sup>

Dalam suasana ketegangan politik demikian itu Presiden pada tanggal 15 Juni 1953 mengangkat dua orang formatur untuk membentuk kabinet baru yaitu Sarmidi Mangunsarkoro dari PNI dan Mr. Mohammad Roem dari

---

8) Supomo, " Tiap - Tiap Kabinet Bertanggung Jawab Kepada Parlemen ", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl 9 Juni 1953, hlm.1 klm.1-2

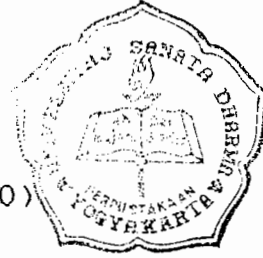
Masjumi. Pengangkatan tersebut dimaksudkan untuk menentramkan kehebohan di dalam masyarakat, sebab kalau kedua formatur dari kedua partai terbesar berhasil maka mungkin akan bisa terbentuk suatu kabinet perdamaian nasional atau suatu kabinet yang berintikan dua partai terkuat yang rukun, sehingga kestabilan politik dapat diciptakan. Penunjukan formatur tersebut mendapat reaksi pesimis dari massa. Simpatisan PNI " Merdeka " mengatakan bahwa Masjumi yang diwakilkan oleh Roem sebagai calon untuk formatur berusaha untuk menggagalkan usaha tersebut sehingga dapat menarik Hatta.

PSI yang berorientasi pada persatuan Indonesia juga menulis bahwa kedua organisasi itu tidak akan berhasil dan kelihatan keduanya menginginkan kegagalan, mereka meramalkan hal tersebut dapat terus berlanjut karena dominasi Presiden di PNI.<sup>9)</sup> Dari pihak PNI sendiri seperti yang dikatakan Sidik Djojokusarto penunjukan Roem sebagai formatur dalam pembentukan kabinet oleh PNI - Masjumi, tidak berdasarkan pada kebiasaan sebab kabinet Wilopo jatuh karena kebijaksanaan menteri dalam negeri ( Roem ) mengingat peristiwa Tanjung Morawa yang

---

9) Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm.363; Herbert Feith, op.cit., hlm.333.





mendapat tentangan hebat dari Parlemen.<sup>10)</sup>

Usaha kedua formatur tersebut mengalami kegagalan disebabkan belum ada kesepakatan mengenai formasi menteri dari masing-masing unsur partai yang duduk dalam kabinet. Masjumi menyalahkan usulan Mangunsarkoro yang seharusnya dikonsultasikan dengan semua partai termasuk PKI (yang tidak menginginkan Masjumi masuk dalam kabinet yang baru). PNI menyatakan kegagalan itu disebabkan karena kesalahpahaman dalam beberapa program terutama mengenai masalah pembukaan tanah pemukiman di Sumatera Timur, penggalian minyak di Sumatera Utara, issue lama mengenai ratifikasi Perjanjian San Fransisco dengan Jepang dan konflik baru mengenai pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Moskow, yang seluruhnya diharapkan oleh PNI agar pemerintah mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijaksanaan parlemen. Akhirnya Mr. Mohammad Roem dan Sarmidi Mangunsarkoro menyerahkan mandatnya sebagai formatur kabinet kepada presiden pada tanggal 22

---

10) " Presiden dan Ali Sastroamidjojo Bicarakan Soal Krisis Kabinet ", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 15 Juni 1953, hlm. 1 klm. 1-3. Pada waktu itu ada kebiasaan dimana partai yang menyebabkan jatuhnya kabinet tidak akan dipercaya/ditunjuk untuk menjadi formatur kabinet yang baru. Salah satu sebab jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan kebijakan yang diambil oleh Roem sebagai menteri dalam negeri yang terkenal dengan Peristiwa Tanjung Morawa ( masalah pembagian tanah di Sumatera Timur). Dengan peristiwa tersebut seharusnya Roem tidak akan ditunjuk untuk menjadi formatur kabinet yang baru.

Juni 1953.<sup>11)</sup>

Pada tanggal itu juga Presiden menunjuk Mukarto Notowidigdo dari PNI, bekas menteri Luar Negeri dalam Kabinet Wilopo sebagai formatur baru. Penunjukan ini hampir disetujui oleh semua pihak. Dia pertama kali berkonsultasi dengan Partai Liga Muslim, kemudian ke PIR, Fraksi Demokrasi dan Parindra. Pada waktu yang bersamaan dia menerima sejumlah delegasi dari PKI yang mengemukakan dukungan mereka atas usahanya. Pada tanggal 25 Juni dia bertemu dengan badan perwakilan Masjumi dan juga pimpinan PNI. Hari berikutnya badan eksekutif Masjumi menyatakan tidak berpartisipasi dalam kabinet yang akan dibentuk Mukarto. Untuk sesaat kelihatan bahwa kabinet tanpa Masjumi akan terlaksana, tapi dua hari kemudian Mukarto menemui Presiden Soekarno melaporkan bahwa usahanya menemui kegagalan.

Kegagalan ini disebabkan karena partai-partai Islam menolak turut serta dalam kabinet Mukarto karena menurut mereka Mukarto mendapat dukungan dari PKI, seperti yang diumumkan di dalam surat kabar partai komunis itu. Jika pendapat orang banyak dapat dipercaya, Mukarto merencanakan membentuk kabinet di mana PNI memegang tiga kementerian termasuk Perdana Menteri (Mukarto sendiri

---

11) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.333, lihat juga Bibit Suprpto, *loc.cit.*

atau Susanto Titoprodjo) dan menteri Luar negeri, Masjumi memegang kementerian keuangan (Jusuf Wibisono) dan kementerian utama lainnya oleh PSII, PIR, Fraksi Demokrasi. Tetapi setelah Masjumi menyatakan tidak ikut berpartisipasi, Partai Katholik segera menolak formatur. Fraksi Demokrasi mengikuti sengketa dan NU melakukan hal yang sama. Beberapa pimpinan partai kelihatan takut akan sambutan dari PKI terhadap Mukarto. Kemungkinan yang penting bahwa banyak pimpinan partai kecil percaya bahwa kabinet PNI-Masjumi masih mungkin dan lebih disukai.<sup>12)</sup>

Ketika Mukarto melaporkan kegagalannya kepada Presiden Soekarno, presiden terkejut, lalu memerintahkan dia membentuk panitia baru untuk membentuk kabinet bisnis atau zaken kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen. Mukarto mengatakan kepada umum bahwa ia ingin merubah pendekatannya untuk membentuk kabinet yang menghasilkan kedamaian nasional. Dua hari kemudian ia menambahkan bahwa keamanan nasional dimungkinkan hanya dengan basis kooperasi antara Masjumi, PNI, dan PSI. Dia juga mulai mengadakan diskusi dengan Roem dan Jusuf Wibisono dari Masjumi, tanpa kehadiran orang PNI.<sup>13)</sup> Dari hasil pembicaraan itu berhasil disusun suatu memorandum oleh Masjumi yang akan dikirim kepada

---

12) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.334

13) *Ibid.*, hlm.334-335.

formatur Mukarto. Menurut Roem memorandum tersebut berisikan sikap Masjumi terhadap pembentukan kabinet yang kini sedang diusahakan Mukarto, antara lain mengenai program dan komposisi kabinet.

Menurut kalangan pimpinan Masjumi, bagi Masjumi yang terpenting bukan mengenai bentuk kabinet akan tetapi yang terpenting bagaimana menyelesaikan soal-soal yang kini masih tergantung, umpamanya tentang perjanjian San Fransisco, pembukaan kedutaan di Moscow, tambang minyak di Sumatera Utara, dan pembagian tanah di Sumatera Timur. Di antara soal-soal tersebut ada yang bisa ditangguhkan tapi ada pula yang harus dicarikan penyelesaiannya sekarang juga sebab kalau tidak maka soal-soal itu akan tetap mengganggu kelangsungan hidup kabinet yang akan dibentuk.

Seandainya masalah-masalah tersebut di atas tidak ada maka mudah saja membentuk suatu zaken kabinet dengan hanya mempunyai program pelaksanaan pemilihan umum. Dalam pertemuan yang dilakukan Mukarto dengan wakil-wakil dari Masjumi dikemukakan juga komposisi kabinet dimana formatur menawarkan empat kursi kementerian kepada Masjumi. Penawaran tersebut *redelijk/adil* kalau PNI juga dapat kursi tidak lebih dari jumlah yang

diberikan kepada Masjumi.<sup>14)</sup> Pada tanggal 4 Juli Mukarto, Roem, dan Jusuf mencapai kompromi dalam kontraversi kasus lemari es. Kemudian tawar menawar dalam jumlah kursi dan kedudukan mereka. Mukarto menginginkan Masjumi menduduki dua kementerian besar, wakil perdana menteri dan keuangan. Sebaliknya PNI mendapat perdana menteri, dua kementerian lainnya yaitu urusan Luar Negeri dan Ekonomi/ Pertanian. Tapi Masjumi mengatakan bahwa posisi tawar menawarnya berada di bawah PNI dan berharap bahwa formatur berikutnya berasal dari Masjumi. Setelah mempertimbangkan bantahan Masjumi yang tidak dapat diterima PNI, Mukarto mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 6 Juli.<sup>15)</sup>

Pada tanggal 8 Juli Presiden memanggil pimpinan Fraksi Masjumi dalam parlemen, Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. kepadanya diberi tempo satu minggu. Presiden tidak menyebut bentuk kabinet yang akan dibentuk ini, apakah koalisi atau zaken kabinet, hanya mengatakan " yang mendapat dukungan yang cukup dari

---

14) " Lemari Es Tetap Sulit", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl. Juni 1953, hlm.1 klm.2-3.

15) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.335. Kasus lemari es adalah kasus yang tidak dapat dipecahkan/diselesaikan oleh Kabinet Wilopo. Kasus tersebut mengenai pembagian/sengketa tanah di Sumatera Timur (Peristiwa Tanjung Morawa), pembukaan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, ratifikasi perjanjian San Fransisco, dan persoalan yang menyangkut nasionalisasi pertambangan minyak di Sumatera Utara.

parlemen".<sup>16)</sup> Dalam laporannya dia mengatakan tidak mendapat oposisi yang keras dari PNI. Dia menerima program kabinet yang diformulasikan Mukarto dan menegaskan kebijaksanaannya mengenai " lemari es" sama dengan laporan PNI yang mengangkat hal tersebut sebagai subjek kepada Masjumi. Yang lebih penting ia membuat konsesi yang signifikan mengenai kursi dan kedudukan mereka. dia meminta Perdana Menteri untuk Jusuf Wibisono dan tiga pos kecil, pertanian, kehakiman, dan urusan sosial untuk Masjumi. Sementara PNI mendapat wakil perdana menteri dan tiga kementerian utama lainnya yaitu urusan Luar Negeri dan ekonomi serta informasi.

Tapi bagi PNI ini tidak cukup, partai ini sekurang-kurangnya ingin agar Masjumi tidak duduk dalam kabinet , dan calon Perdana Menteri Masjumi diberikan kepada Mukarto, serta tidak menyetujui kedudukan menteri keuangan dipegang oleh Sumitro Djojohadikusumo dari PSI. Mereka menyesali veto Burhanuddin atas Iskaq Tjokroadisuryo yang merupakan kandidat PNI untuk urusan ekonomi yang tidak dipercaya oleh Masjumi karena perintahnya yang kontroversial sebagai menteri Dalam Negeri dalam kabinet Sukiman. Yang terpenting dari semua

---

16) " Mr. Burhanuddin Harahap Formatur", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 9 Juli 1953, hlm.1 klm.2-3.

itu PNI menginginkan kedudukan perdana menteri.<sup>17)</sup>

Dalam hal ini Burhanuddin menolak untuk bergerak. Pimpinan Masjumi merasa mereka telah banyak memberi konsesi yang longgar dan merasa PNI sengaja menolak kabinet PNI-Masjumi, sehingga menyebabkan negosiasi mereka gagal. Burhanuddin dengan berani mengatakan adanya kemungkinan kabinet tanpa PNI. Tapi setelah masalah ini menjadi jelas, tidak hanya dua partai Kristen, simpatisan Masjumi dalam masalah politik kabinet yang telah berpartisipasi dalam kabinet juga gagal didekati. Pada tanggal 18 Juli dia mengembalikan mandatnya kepada Presiden.<sup>18)</sup>

Sampai saat itu krisis kabinet telah berlangsung selama 46 hari, lebih panjang dari perkiraan siapapun. Ada tiga usaha untuk membawa PNI dan Masjumi bekerja sama, pertama membangun kabinet tanpa Masjumi atau dengan Masjumi tapi memainkan peranan kecil dan kemungkinan kabinet tanpa PNI. Kesemuanya terbukti gagal. Masjumi dan PSI menuntut supaya situasi negara yang semakin genting lekas diatasi dengan mengangkat Bung Hatta sebagai formatur. Tetapi Presiden tetap tidak menyetujui Hatta sebagai pembentuk kabinet, karena dia merasa hal tersebut tidak sesuai dengan pasal UUD 1950.

---

17) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.336

18) *Ibid.*

" Saya masih berdiri atas dasar konstitusi dan tradisi parlemen kita ", dan menambahkan " Sejauh ini masih ada kebulatan suara antara Wakil Presiden Mohammad Hatta dan saya sendiri ". Dalam pemilihan formatur berikutnya, tidak dari Masjumi dan PNI, tapi ketua PIR, Wongsonegoro. Penunjukan Wongsonegoro merupakan hasil acak. Dalam keseluruhan, PNI dan PKI menyatakan sokongannya, Masjumi dan PSI cemas.<sup>19)</sup>

Reaksi atas penunjukan Wongsonegoro disambut lega oleh kalangan politik. Mereka berpendapat ia dapat berhasil jika PIR tidak menuntut kursi Perdana Menteri. Sidik Djojokusarto menyatakan bahwa ia setuju dengan penunjukan itu dan mengharapkan Wongsonegoro berhasil melakukan tugasnya dan berharap dibentuk suatu kabinet yang progresif, Mr. Tambunan dari Parkindo mengharapkan Wongsonegoro mencapai hasil dalam membentuk kabinet baru hingga keadaan demisioner bisa lekas berakhir. Menurut Wongsonegoro sendiri ia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu perdamaian nasional. Dalam melakukan tugas nasionalnya ia akan bekerja sama dengan semua partai dan aliran. Tugas yang terberat bagi formatur baru ialah menjembatani kedua partai besar yang sedang bertentangan itu yaitu Masjumi dan PNI.

Ini bukan merupakan suatu perkara yang kecil,

---

19) Ibid.



diperlukan kebijaksanaan yang amat besar. Formatur harus bisa memberi perhatian bahwa Masjumi dan PNI tidak akan atau merasa dirugikan oleh kabinet yang akan dibentuknya. Kalau diingat dr.Abu Hanifah dari Masjumi setuju formatur diserahkan kepada pihak ketiga, sedang Sidik Djojokusarto dari PNI juga menyetujui penunjukan Wongsonegoro, ada juga alasan untuk menaruh harapan-harapan. Tetapi satu hal yang pasti formatur tidak boleh terlampaui memajukan kepentingan partainya apabila ia ingin berhasil.<sup>20)</sup>

Respon itu semakin diperkuat ketika Wongsonegoro memperlihatkan kerja yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno ( dia menjadi penghubung dengan pimpinan partai di istana kepresidenan ). Itu diperkuat lagi ketika ia mengumumkan kebijakannya bahwa pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan kabinet seharusnya dikembalikan kepada parlemen. Masjumi dan PSI melihat rencana tersebut merupakan usaha kedua seperti yang dicoba Mukarto dalam phase I dari kerjasama formatur untuk membentuk kabinet tanpa Masjumi. Ketetapan itu kemudian menjadi hal yang dapat dipercaya setelah beberapa deklarasi PKI dan organisasi pendukungnya menyokong

---

20) " Mr. Wongsonegoro Formateurs ", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl.21 Juli 1953,hlm.1 klm.1-2

Wongsonegoro.<sup>21)</sup>

Sekalipun demikian Wongsonegoro mengadakan negosiasi yang serius dengan Masjumi. Dalam rangka merancang kementerian ia mengharapkan dukungan yang lebih untuk itu. Hasil akhirnya Masjumi mendapat Wakil Perdana Menteri I dan menteri Dalam Negeri Urusan Ekonomi dan Sosial. Tapi pada tanggal 28 Juli tawaran tersebut ditolak. Natsir kemudian menjelaskan partainya tidak dapat menerima posisi Wongsonegoro dalam kasus " lemari es ", yang condong memihak pada PNI dan khususnya menentang permintaan PNI dalam masalah tambang minyak di Sumatera Utara. Sebagai tambahan Masjumi menyatakan keberatan atas pengecualian Wongsonegoro pada PSI dalam kabinet dan kandidat-kandidat untuk Dr. Ong Eng Die ( PNI, Keuangan ), Mr. Iwa Kusumasumantri ( Fraksi Progresif, Kehakiman ), Arudji Kartawinata ( PSII, Pertahanan), dan Dr.F.L.Tobing ( SKI, Penerangan).Tiga orang yang disebut pertama menghormati gerakan Masjumi pada waktu lalu dan sekarang menjadi simpatisan PKI.

Itu membangkitkan harapan Masjumi, bahwa Wongsonegoro mengembalikan mandat kepada Presiden, dan Presiden tidak punya alternatif lain kecuali memanggil Hatta. Selanjutnya muncul jaminan dari NU bahwa NU tidak berpartisipasi di dalam kabinet yang mengesampingkan

---

21) Herbert Feith, *op.cit.*.hlm. 337

Masjumi. Harapan Masjumi tidak terwujud setelah Masjumi menolak tawaran, formatur bekerja dengan cepat dengan tujuan membentuk kabinet tanpa Masjumi. Banyak usaha dilakukan untuk mendapat dukungan Islam, ia menawarkan lebih banyak pos kepada NU dan PSII. NU menawar tiga kursi dan setuju untuk berpartisipasi. Wongsonegoro mendapatkan dua partai Kristen yang telah masuk dalam satu kementerian menolak bekerja sama karena Masjumi tidak ikut. Sebagai kompensasi atas kehilangan ini, ia menarik lebih banyak anggota dari partai-partai nasional yang kecil dan dua grup simpatisan PKI.<sup>22)</sup>

Kemudian diadakan rapat dengan partai-partai kecil yang tergabung dalam kerja sama politik tersebut. Diputuskan juga prosedur cara formatur bekerja, mula-mula mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil semua fraksi di parlemen guna memberikan penjelasan mengenai program, kemudian wakil-wakil fraksi diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada dewan pimpinannya masing-masing. Program yang sudah disodorkan kepada partai-partai menunjukkan semangat yang berlainan dengan program yang sudah-sudah. Terutama mengenai soal keamanan, formatur telah memberikan perumusan yang tegas-tegas tidak dapat diberi makna lain daripada yang tersurat. Program tersebut terdiri dari delapan pokok

---

22) Ibid., hlm.338

program yaitu :<sup>23)</sup>

1. Keamanan : membasmi DI serta gerombolan-gerombolan apa saja yang sifatnya hendak membentuk negara dalam negara. Tindakan-tindakan akan lebih tegas dari pada yang telah diambil oleh pemerintah hingga sekarang.
2. Kemakmuran dan keuangan : melakukan politik kemakmuran dan keuangan yang diarahkan kepada membela kepentingan rakyat, mencegah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, mengusahakan memproduksi dan industrialisasi.
3. Pemilihan : tindakan-tindakan akan diambil agar pemilu dapat dilakukan secepat-cepatnya.
4. Organisasi kenegaraan : akan dilakukan usaha-usaha agar organisasi pemerintah dapat berjalan lebih efisien antara lain dengan "hers chikking" di dalam alat-alat negara, memberantas korupsi, termasuk pengertian memperbaiki organisasi / alat-alat negara seperti tentara dan polisi. Juga akan diambil tindakan-tindakan agar lekas tercapai penyelesaian peristiwa 17 Oktober. Lebih jauh akan memperbaiki perundang-undangan pada umumnya khususnya perundang-undangan otonomi serta penyempurnaan undang-undang pertambangan.

---

23) " Perdana Menteri Diserahkan PNI?", dalam *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 23 Juni 1953, hlm.1 klm.1-3.

5. Perburuhan : akan mengadakan syarat-syarat kegembiraan bekerja bagi kaum buruh. Mengenai itu akan diadakan perundang-undangan dan sistem baru sedang P4 pusat akan dihapuskan.
6. Politik Luar Negeri : pemerintah akan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Akan diusahakan penggantian KMB dengan perjanjian internasional biasa. Persetujuan internasional seperti TCA dan Colombo Plan tetap berlaku. Politik bebas dan aktif di dalamnya termasuk perhubungan diplomatik dengan semua negara.
7. Irian Barat: mengusahakan agar Irian Barat lekas masuk ke dalam wilayah RI.
8. Kebijakanaksanaan Pemerintah : pemerintah tidak kenal dengan apa yang dinamakan *vrieskamerartikelen*/ kasus Lemari Es. Parlemen adalah kekuasaan tertinggi semua keputusannya harus dijalankan. Apabila di dalam kabinet tidak boleh segera mengadakan pemungutan suara tetapi terlebih dahulu parlemen harus mengambil keputusan. Keputusan ini mengikat dan harus dijalankan.

Selanjutnya mengenai jabatan PM, ada kemungkinan besar PNI yang disertai. PNI sendiri memang tidak memandangnya sebagai syarat mutlak, tapi Masjumi tidak suka apabila PIR yang memegang jabatan tersebut. Masjumi lebih suka PM dipegang oleh PNI dan Masjumi. Karena

Masjumi tidak menunjukkan gelagat akan menyetujui program maka jabatan PM akan diserahkan kepada PNI. Formatur juga mengatakan partai-partai yang tidak menyetujui program tidak akan diajak ikut serta di dalam kabinet.<sup>24)</sup> Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, Wongsonegoro berhasil membentuk pemerintah yang baru. Susunan kabinet baru itu terdiri terutama dari PNI, NU, PIR ditambah dari beberapa partai kecil dan seorang tidak berpartai. Sedangkan Masjumi untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Indonesia tidak diikutsertakan.

## B. SUSUNAN DAN PROGRAM KERJA KABINET ALI I

### 1. Susunan Kabinet Ali I

Setelah melalui masa krisis selama 58 hari, akhirnya Wongsonegoro berhasil membentuk kabinet yang baru. Pembentukan kabinet baru ini berdasarkan Keppres no. 132 tanggal 30 Juli 1953 yang disebut dengan nama Kabinet Ali I. Kabinet ini dikenal juga dengan nama Kabinet Ali-Wongso-Arifin berdasarkan nama perdana menteri dan wakilnya dan mulai menjalankan tugasnya tanggal 1 Agustus 1953 setelah ada upacara serah terima dari Kabinet Wilopo pada tanggal dan hari itu juga. Kabinet tersebut merupakan kabinet parlementer dengan koalisi dari

---

24) Ibid.

beberapa partai. Sebagai tulang punggungnya adalah PNI,NU,PIR sesuai dengan nama kabinet yang diambil dari perdana menteri dan wakil perdana menteri yaitu Mr.Ali Sastroamidjojo (PM/PNI), Mr. Wongsonegoro ( Wakil PM I/PIR), K.H.Zainul Arifin (Wakil PM II/NU ).<sup>25)</sup>

Adapun susunan kabinet Ali I sebagai berikut:<sup>26)</sup>

1. Perdana Menteri	: Ali Sastroamidjojo (PNI)
2. Wakil Perdana Menteri I	: Mr.Wongsonegoro (PIR)
3. Wakil Perdana Menteri II	: K.H.Zainul Arifin ( NU)
4. Menteri Luar Negeri	: Mr. Sunario (PNI)
5. Menteri Dalam Negeri	: Prof.Mr.Dr.Hazairin(PIR)
6. Menteri Pertahanan	: Iwa Kusumasumantri(Progresif)
7. Menteri Kehakiman	: Mr.Djody Gondokusumo (PRN)
8. Menteri Penerangan	: Dr.F.L.Tobing (SKI)
9. Menteri Keuangan	: Dr.Ong Eng Die (PNI)
10.Menteri Pertanian	: Mr.Sadjarwo (BTI)

25) Bibit Suprpto, *op.cit.*,hlm 151-152.

26) Herbert Feith, *op.cit.*,hlm. 338-339; Bibit Suprpto,*op.cit.*, hlm.152-153; Susan Finch dan Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinet 1945-1965* ( New York : Ithaca Cornell University,1965),hlm.30-31 ;Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1945-1970* ( Jakarta : Pradnya Paramitha, 1970 ),hlm.16-18.; Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*,hlm.306-307.;Kementerian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah Atas Program Kabinet Ali Sastroamidjojo di DPRS Jakarta* ( Jakarta: Kementrian Penerangan,1953),hlm.3-4.

11. Menteri Perekonomian	: Iskaq Tjokroadisurjo (PNI)
12. Menteri Perhubungan	: Abikusno Tjokrosujoso (PSII)
13. Menteri Pekerjaan Umum	: Prof. Ir. Rooseno (PIR)
14. Menteri Perburuhan	: Prof. SM. Abidin (Partai Buruh)
15. Menteri Sosial	: R. P. Suroso (Parindra)
16. Menteri PP & K	: Mr. Muh. Yamin (Tanpa Partai)
17. Menteri Agama	: K. H. Masjkur (NU)
18. Menteri Kesehatan (ad interim)	: Dr. F. L. Tobing (SKI)
19. Menteri Negara Urusan Agraria	: Moh. Hanafiah (NU)
20. Menteri Negara Urusan Kesj. Umum	: Sudibjo (PSII)

Susunan kabinet di atas merupakan kebalikan dari Kabinet Natsir. PNI dengan empat kementerian utama mendominasi kabinet baru. Masjumi untuk pertama kalinya tidak masuk dalam kabinet. Begitu juga PSI, 2 partai Kristen, Fraksi Demokrasi, PKI, dan Murba. Formatur PIR dengan cepat mempromosikan NU menjadi partner PNI dalam memimpin kabinet. Empat group yang belum lama ini dimasukkan dalam kabinet diberi kementerian yaitu PRN (Partai Rakyat Nasional), SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia), dan 2 di bawah pengaruh PKI, Fraksi Progresif dan BTI (Barisan Tani Indonesia). Iwa Kusumasumantri (Partai Progresif) diberi pos penting, yaitu pertahanan, tetapi kebanyakan orang percaya bahwa politiknya lebih



dekat ke Murba daripada PKI.<sup>26)</sup>

Kemenangan yang dicapai tidak datang dengan mudah. Beberapa group cemas dengan situasi yang terpolarisasi antara PNI, Partai Nasional yang kecil, Partai Liga Muslim di satu sisi dengan PKI di sisi lainnya. Mereka berdebat bahwa kabinet tanpa Masjumi harus bergantung pada suara PKI di parlemen untuk bertahan. Lain pihak menyatakan bahwa bekerjasama dengan partai nasional yang kecil dan partai Liga Muslim lebih disukai Masjumi yang berarti bebas untuk memerintah dan mengurus pemerintahan selanjutnya. Sementara tanggapan terhadap NU juga bermacam-macam. NU dianggap menghina kesatuan Islam oleh group muslim karena meninggalkan Masjumi dan mendirikan partai politik sendiri (1952). Masjumi dan PSI memperingatkan NU agar jangan lagi terjadi pengulangan peristiwa tahun 1947, ketika PSII pecah dari Masjumi untuk menerima jabatan menteri dalam kabinet Amir Sjarifuddin I yang mengantar pada pemberontakan PKI Madiun.<sup>27)</sup>

Salah satu faktor penting yang menentukan karakter kabinet adalah ketidakmampuan pemimpin Masjumi menarik penghinaan akibat pemisahan NU yang

---

26) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.340

27) *Ibid.*

menyebabkan berubahnya tuntutan politik di Jakarta. Isolasi dari partai nasional kecil dan merenggangnya hubungan dari partai - partai Liga Muslim menyebabkan Masjumi tidak mempunyai aliansi yang kuat dalam parlemen. Faktor penentu lainnya adalah bantuan dari Presiden Soekarno terhadap Wongsonegoro dan pada saat tersebut tidak ada oposisi yang nyata dari militer, karena masih tergoncang dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Tindakan Soekarno memperkuat pandangan umum dengan menolak kabinet Hatta dan lebih menyukai kabinet tanpa Masjumi sebagai salah satu basis dalam kooperasi PNI-Masjumi. Yang terpenting dari itu semua adalah dukungan aktif dari Presiden untuk Wongsonegoro membuat banyak orang yang ragu-ragu menjadi percaya bahwa formatur ini akan sukses dan mereka lebih baik tidak meninggalkannya.<sup>28)</sup>

## 2. Program Kerja Kabinet Ali I

Setiap kabinet pasti mempunyai program kerja sendiri demikian juga halnya dengan kabinet Ali I. Pada tanggal 12 Agustus 1953 Ali Sastroamidjojo bersama dengan Dr.F.L.Tobing diambil sumpahnya, karena menteri-menteri lainnya sudah dilantik sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Ali

---

28) Ibid., hlm. 340-341

Sastroamidjojo pada saat kabinet dibentuk tidak ada di Indonesia. Ia menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Kanada yang berkedudukan di Washington, jadi pada saat pelantikan menteri-menteri kabinet dia berada di Washington. Setelah pelantikan langsung diadakan sidang kabinet untuk menyusun program kerja. Penyusunan program kerja tersebut tidak jauh berbeda dari program kerja yang diusulkan Wongsonegoro sebelum kabinet terbentuk.

Program kerja kabinet hasil sidang tersebut :<sup>29)</sup>

I. Dalam Negeri

1. Keamanan

a. Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.

b. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara.

2. Pemilihan Umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

3. Kemakmuran dan keuangan

a. Menitikberatkan politik pembangunan kepada

---

29) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 308-312.; Kementrian Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 4-5.; Departemen Penerangan, *loc.cit.*; Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 153-155.

segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.

- b. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
  - c. Mempercepat usaha penempatan atas bekas pejuang dan kaum penganggur telantar dalam lapangan pembangunan.
  - d. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
4. Organisasi negara
- a. Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangannya dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai pada tingkat yang paling bawah.
  - b. Menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai.
  - c. Memberantas korupsi dan birokrasi.

5. Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

6. Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.

II. Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

III. Politik Luar Negeri

- a. Menjalankan politik Luar Negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia.
- b. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar statut-uni menjadi hubungan internasional biasa.
- c. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian hasil KMB dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara.

IV. Kebijakanaksanaan Pemerintahan

Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

Melihat program kerja yang telah ditetapkan kabinet sebenarnya tidak berbeda jauh dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh kabinet sebelumnya, hanya

penekanannya saja yang berbeda. Misalnya program Irian Barat, pada kabinet sebelumnya dimasukan ke dalam program politik Luar Negeri, tapi oleh kabinet Ali I dimasukan dalam program tersendiri. Perbedaan lainnya terdapat dalam program kebijaksanaan pemerintah. Dalam kebijaksanaan tersebut Kabinet Ali I ingin menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kabinet sebelumnya yang mencakup masalah tentang pembagian tanah di Sumatera Timur, penambangan minyak di Sumatera Utara, pembukaan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, dan normalisasi hubungan dengan Jepang.

### C. SEKILAS TENTANG ALI SASTROAMIDJOJO

Sebelum membahas pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan, ada baiknya kita mengenal lebih dulu siapa Ali Sastroamidjojo itu, sehingga kita dapat memahami tindakan/kebijakan yang diambilnya selama menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri. Berikut akan dipaparkan sedikit biografi Ali Sastroamidjojo yang diambil dari buku karangannya sendiri dengan judul *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*.<sup>30)</sup>

Ali Sastroamidjojo dilahirkan di Grabag yang terletak di bawah lereng Gunung Merbabu kurang lebih 20 km dari Magelang pada tanggal 21 Mei 1903, merupakan anak pasangan R.NG.Sastroamidjojo dengan Kustiah.

---

30) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 9-161

Semasa kecil ia bejalar di sekolah desa dan kemudian pindah ke Magelang dan diterima di sekolah Belanda no.2, yang waktu itu diperuntukan untuk kaum Indo dan anak-anak priyayi. Karena sering diejek ia kemudian pindah ke sekolah Belanda no.1 yang disediakan untuk anak-anak Belanda elite. Sore harinya ia harus belajar bahasa Jawa dan mengaji. Setelah menyelesaikan sekolah di Eerste Europese Lagere School kemudian melanjutkan ke HBS (Hogere Burger School) Jakarta. Di sinilah Ali mulai bergaul dengan pemuda-pemuda lain dari seluruh kepulauan Nusantara. Di Jakarta ia masuk perkumpulan pelajar " Jong Java" yang menyebabkan rasa kedaerahannya masih kuat. Sewaktu tinggal di rumah Pak Kartosasmito ia berkenalan dengan Alimin seorang anggota Serikat Islam.

Dari hasil pembicaraan-pembicaraan dengan Alimin, maka pikirannya semakin terbuka terhadap soal-soal politik penjajahan di Indonesia. Di HBS pula Ali mulai berkenalan dengan kebudayaan Barat. Selain kebudayaan Belanda ia juga belajar kesusastraan Jerman, Perancis, dan Inggris. Maka dalam masa perkembangan pribadinya tumbuh keseimbangan antara pengaruh Barat dan Timur. Pada tahun 1922 ia menyelesaikan pendidikannya di HBS.

Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Leiden di Belanda dan mengambil jurusan Hukum Hindia Belanda di Fakultas Hukum. Pada tahun 1924 Ali menikah dengan Titi

Roelia yang diwakili oleh sahabatnya Wasito di Jakarta dan kemudian menyusulnya ke Belanda. Selama di Belanda Ali menjadi anggota Perhimpunan Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Indonesische Vereniging* dan mempunyai majalah *Hindia Putra* dengan ketuanya Iwa Kusumasumantri. Dalam perhimpunan inilah persaan kesukuan Jawa dalam dirinya semakin menipis dan mulai menyadari bahwa ia menjadi sebagian dari suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan mempunyai Tanah Air Indonesia.

Pada tahun 1924 *Indonesische Vereniging* di ketuai oleh Nazir Pamontjak dan nama majalah perhimpunan di ubah menjadi *Indonesia Merdeka*. Pada tahun 1925 di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjosandjojo nama *Indonesische Vereniging* diubah menjadi *Perhimpunan Indonesia*. Ali bersama mahasiswa lainnya juga aktif menulis karangan untuk mengisi majalah *Indonesia Merdeka* dan berusaha menyebarkan majalah itu ke Indonesia, terutama yang edisinya yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun majalah tersebut dilarang beredar di Indonesia tapi diselundupkan dengan cara merobek halaman tersebut dan ditempelkan ke majalah Belanda seperti *Haagsche Post*, *De Groene Amsterdamer*, dan ditujukan ke adiknya Usman yang waktu itu sekolah di HBS untuk disebarakan ke teman mereka yang lain.



Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1928. Ali membuka praktek sebagai pengacara di Yogyakarta dan menjadi anggota PNI karena azas dan tujuan partai tersebut sama dengan Perhimpunan Indonesia yaitu mencapai Indonesia Merdeka. Disamping sebagai pengacara ia juga mengajar di Taman Siswa atas permintaan Ki Hadjar Dewantara. Di rumah Ki Hadjar Dewantara setiap Rabu Wage diadakan pertemuan di antara tokoh-tokoh politik, sosial, dan kebudayaan yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dianggap bermanfaat bagi pergerakan nasional. Di pertemuan itu sering terjadi pertikaian antara pandangan kaum tua dan muda seperti Ki Suwandi (Pemimpin PNI cabang Yogyakarta), mencap Ali terlalu radikal karena masih terpengaruh dengan gagasan-gagasan Perhimpunan Indonesia yang radikal. Tapi biasanya pertikaian itu dapat diredakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Atas persatuan itulah diterbitkan suatu majalah yang diasuh Mr. Sujudi (PNI), Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Golongan Islam), dan Ali sendiri. Majalah tersebut diterbitkan dalam bahasa Jawa dan berjudul *Janget* (Ikatan). Tapi umur majalah itu tidak lama karena tulisannya yang mengecam politik penjajahan Belanda.

Kegiatan Ali di PNI semakin aktif, bahkan ia sering ikut pertemuan di Jakarta dan Bandung. Di sanalah ia bertemu dan bertukar pikiran dengan Bung Karno,



Sartono, Gatot Mangkupradja, dan lain-lain. Ali juga ikut terjun membina kader-kader PNI di daerah pedesaan. Tapi karena masih terpengaruh gerakan dan pikiran di Eropa, dia agak sukar mendekati rakyat kecil namun lama kelamaan dia menyadari bahwa pola pikir masyarakat desa yang masih sederhana tidak bisa menerima hal-hal yang serba teoritis tapi yang realitis. Disamping itu Ali juga aktif di kalangan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Organisasi tersebut mempunyai dasar persatuan nasional dan program utamanya mengadakan aksi bersama di bidang politik. Dalam pertengahan tahun 1930 Ali pindah ke Surabaya dan menerima tawaran Dr. Soetomo (PBI) untuk menjadi redaktur majalah mingguan PBI "Suluh", tapi karena memang aliran politik mereka berbeda Ali akhirnya mengundurkan diri dan menetap di Madiun sebagai pengacara.

Ali masih terus aktif dalam pergerakan kemerdekaan sampai masuknya Jepang ke Indonesia. Permulaan bulan April 1945, Ali sekeluarga pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor Tabungan Pos sebagai kepala. Setelah kemerdekaan Ali juga ikut dalam pergerakan kebangsaan untuk mengisi kemerdekaan. Ketika kabinet pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945 ia menjadi pegawai tinggi dalam kementerian penerangan. Dalam kabinet Syahrir II, ia masuk dalam kementerian

pertahanan. dan Juni 1946-Juli 1947 menjabat Dewan Pertahanan Negara. Pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin ia menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada masa Kabinet Presidensial di bawah pimpinan Bung Hatta pada tanggal 29 Juni 1948 ia tetap sebagai menteri PP&K. Sewaktu Belanda mengadakan agresi yang II pada tanggal 19 Desember 1948, Ali bersama menteri lainnya diasingkan ke Bangka.

Setelah Presiden, Wakil Presiden dan semua yang ditawan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Dewan Pimpinan Pusat PNI bisa bekerja lagi setelah non aktif selama pendudukan tentara Belanda. Pada pertengahan bulan Agustus Mr. Sujono Hadiroto dan Ali berangkat ke Den Haag untuk ikut serta dalam perundingan KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949. Pada permulaan tahun 1950 Ali ditugaskan menjabat Duta Besar Indonesia yang pertama kali di Washington DC, Amerika Serikat. Walaupun demikian dia tetap berhubungan dengan PNI dan pada tahun 1953 ia diangkat menjadi Perdana Menteri untuk memimpin kabinet yang dibentuk Wongsonegoro. Adapun pelaksanaan tugasnya sebagai perdana menteri dan pelaksanaan program kabinetnya akan kita bahas pada bab selanjutnya.

## BAB III

### PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KABINET ALI I

Dalam bab ini akan dijelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ali selaku Perdana Menteri dalam merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam kabinet yang dipimpinnya. Akan dijelaskan pula faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka pemaparan program diurutkan sesuai dengan urutan program kerja yang telah mendapat persetujuan dari parlemen pada tanggal 10 September 1953.

#### A. Dalam Negeri

Program kerja Dalam Negeri dibagi dalam bidang keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan serta perundang-undangan.<sup>1)</sup> Dalam keterangannya kepada DPRS dikatakan program keamanan sangat penting karena terjaminnya keamanan umum merupakan syarat mutlak untuk segala usaha Pemerintah dan rakyat menuju kepada kebahagiaan dalam negeri. Dengan meningkatnya gangguan keamanan terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan, rakyat mengalami berbagai

---

1) Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah atas Program Kabinet Ali Sastroamidjojo di DPRS Jakarta* ( Jakarta:Kempen,1953),hlm. 6-22.

penderitaan berupa korban jiwa dan harta benda, di samping kerugian negara sebagai akibat teror seperti penggulingan kereta api dan lain-lain. Berhubungan dengan itu maka pemerintah menyatakan bahwa gerakan itu adalah pemberontakan, yang bermaksud membentuk negara untuk menghancurkan RI oleh karena itu dianggap musuh negara.

Dari sebab itu pemerintah berpendirian bahwa gerakan-gerakan yang ilegal harus diberantas dengan segenap kekuatan alat-alat negara. Pemerintah telah membuat rencana penyelesaian keamanan dengan jalan militer, polisionil, dan politis. Usaha yang dilakukan pemerintah akan berhasil apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat.

Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, disetujui undang-undang tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR dan Panitia Ad Hoc Urusan Pemilihan Umum yang dibentuk oleh kabinet Wilopo. Panitia ini terdiri dari Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, dan dua panitia pembantu Panitia Ad Hoc yang terdiri dari pegawai-pegawai Kementrian Kehakiman, Dalam Negeri, Keuangan, Kantor Pemilihan Pusat dan Kantor Percetakan Negara.

Panitia pembantu bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan pemerintah, instruksi-instruksi, dan lain-lain peraturan pelaksanaan Undang-Undang no.7

tahun 1953 serta pembelian alat-alat dan percetakan barang-barang yang diperlukan guna persiapan-persiapan pemilihan umum dan pengirimannya ke daerah-daerah. Langkah pertama dalam pelaksanaan UU Pemilu adalah pembagian daerah pemilihan, masing-masing dalam Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Dengan mulai berlakunya UU No.7 tahun 1953 berhentilah semua badan-badan penyelenggaraan pemilihan yang dibentuk berdasarkan UU No.27 tahun 1948.

Dalam bidang kemakmuran dan keuangan pemerintah menitikberatkan politik pembangunan untuk kepentingan rakyat jelata. Untuk itu perhatian pemerintah dalam lapangan pertanian diarahkan pada dua sudut yaitu memperbesar produksi bahan pangan khususnya dan bahan pembangunan serta bahan perdagangan pada umumnya. Sejalan dengan besarnya produksi, dijalankan pula usaha-usaha untuk memajukan serta mempertinggi penghidupan kaum tani. Agar segala usaha ini berhasil maka kesadaran dan peran serta rakyat tani dan nelayan dan lain-lain subyek di lapangan pembangunan sangat diharapkan. Dalam rangkaian usaha pemerintah dalam lapangan pertanian maka kehutanan juga akan mendapat perhatian sepenuhnya.

Untuk kepentingan pembangunan di bidang perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat koperasi. yang harus disesuaikan dengan semangat

gotong royong, memperbaiki dan memperluas perkreditan dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa. Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan melancarkan jalan pemerintahan maka akan diperhatikan pula perkembangan perhubungan darat, laut, dan udara. Untuk memperbaharui undang-undang agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota, maka perlu diangkat seorang Menteri urusan Agraria yang bertugas menyiapkan UU Pokok Hukum Tanah yang akan menjadi dasar bagi perundang-undangan Agraria seluruhnya.

Agar hal tersebut tercapai maka pemerintah akan mengusahakan penghapusan pemusatan milik tanah yang sangat luas ditangan beberapa orang, kekuasaan Swapraja dan tanah yang bersifat feodal akan diganti dengan penggunaan tanah yang lebih demokratis. Pembedaan hak tanah akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang nyata dalam masyarakat. Dalam pemberian kesempatan kepada modal asing pemerintah akan menitikberatkan pada kepentingan rakyat dalam arti yang luas. Di samping itu pemerintah secara integral akan berusaha mengembalikan tanah-tanah partikelir menjadi tanah negara dan akan menyempurnakan pendaftaran bagi tanah rakyat.

Persoalan pemecahan masalah bekas pejuang tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dihubungkan dengan

soal penampungan demobilisasi tentara, maka akan digunakan pengalaman pemerintah dahulu di antaranya usaha transmigrasi. Dalam rangkaian memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara pemerintah berpendapat bahwa organisasi pembukuan anggaran dalam tiap-tiap kementerian perlu ditinjau dan disempurnakan. Karena soal perburuhan bertalian dengan soal kemakmuran dan keuangan, maka peranan buruh dan pengusaha dalam usaha memperbesar produksi dan penghasilan nasional sangat penting.

Pemerintah akan memberi kebebasan bergerak kepada serikat-serikat buruh yang bonafid, kebebasan berorganisasi, penghargaan atas hak-hak buruh, maka akan dilaksanakan rencana kerja dalam hubungan kerja industri akan diletakan dasar-dasar hukum yang baru. Syarat-syarat kerja perlu juga direncanakan undang-undangnya yang berpedoman pada kehendak untuk melindungi buruh baik psikis maupun sosial-ekonomi, jaminan sosial dan kesejahteraannya. Berusaha menempatkan tenaga kerja sesuai dengan tempatnya, membuka lahan kerja baru untuk menolong penganggur, mempertinggi daya produksi, melengkapi dan memperluas aparatur negara dalam lapangan perburuhan.

Untuk organisasi negara, pemerintah bermaksud dengan sungguh-sungguh memperbaiki politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan undang-



undang dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah. Dalam penyusunan aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga kerja yang rasional maka diusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai, dan untuk memberantas korupsi dan birokrasi maka diangkat seorang menteri Urusan Kesejahteraan Negara yang bertugas mempelajari kemungkinan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan organisasi negara. Di samping itu juga untuk menyelidiki jalannya administrasi negara dan mengusulkan perbaikan tentang itu, mengawasi dan mengusulkan tentang efisiensi dalam organisasi dan cara bekerja dinas - dinas negara, merancang dan mengusulkan penyempurnaan dalam organisasi dan cara-cara bekerja alat pengawasan yang mempunyai tanggung jawab keuangan serta pembelian barang-barang untuk negara baik di dalam maupun luar negeri, memberantas korupsi dan birokrasi dalam segenap lapangan dan dalam arti yang seluas-luasnya.

Di bidang perundang-undangan pemerintah berusaha menyesuaikannya dengan UUD yang berlaku. Perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang beraneka ragam mengenai semua lapangan dan meliputi jangka waktu tiga setengah abad. Usaha tersebut merupakan usaha yang sangat besar yang harus diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli dalam berbagai

bidang. Muncul berbagai kesulitan antara lain kurangnya tenaga ahli. Agar perundang-undangan nasional cepat tercapai maka pemerintah membentuk suatu Panitia Negara yang diberi tugas menyelenggarakan suatu perundang-undangan nasional yang meliputi lapangan seluas mungkin, dengan demikian diharapkan usaha kearah kodifikasi nasional dapat dipercepat. Undang-undang nasional yang dimaksud pemerintah adalah UU Pokok Pertahanan, UU Kepolisian Negara, UU Bank Negara selain bank sentral, UU tentang mendirikan perusahaan, UU tentang Kewarganegaraan.

## 1) Masalah Keamanan

Kabinet Ali baru bekerja 7 minggu ketika harus berhadapan dengan pemberontakan yang kuat di Aceh. Di daerah itu telah terjadi konflik dari beberapa generasi dan khususnya sejak abad ke-19 terakhir antara Uleebalang (Aristokrat Lokal) dengan ulama pimpinan Islam. Konflik tersebut dimulai ketika Belanda berusaha mengalahkan Aceh. Pada tahun 1874 Belanda mencoba mengusik keseimbangan antara kekuatan tradisional (Sultan, Uleebalang, dan Kaum Ulama) dengan memperkenalkan sistem pemerintahan sendiri bagi para uleebalang dalam bentuk *Korte Verklaring* (perjanjian pendek). Pada tahun 1898 Belanda mengubah perjanjian dengan memaksa para Uleebalang untuk menganggap wilayah mereka sebagai bagian dari Hindia Belanda dan memandang

musuh Belanda sebagai musuh mereka pula. Berkat kebijaksanaan tersebut Belanda berhasil memecah belah kekuatan Aceh dengan menciptakan konflik terus menerus antara kelompok pro Uleebalang dan pro Sultan. Sultan sepenuhnya didukung oleh para Ulama yang dengan kukuh menentang Belanda, sedangkan dari Uleebalang hanya sebagian kecil saja yang mendukung Sultan.<sup>2)</sup>

Pada tahun 1946 permusuhan ini menjadi revolusi sosial setelah beberapa pimpinan ulama menemukan beberapa Uleebalang bernegosiasi dengan Belanda untuk kedatangan mereka kembali ke Aceh. Dalam revolusi sosial tersebut banyak aristokrat dan keluarganya mati terbunuh. Para ulama terorganisasi dalam PUSA ( Persatuan Ulama Seluruh Aceh ) menjadi pengendali kekuatan di Aceh, dan pimpinan mereka, Daud Beureueh, diakui sebagai gubernur militer Aceh oleh pemerintah pusat dengan pangkat Mayor Jendral pada tahun 1947.<sup>3)</sup> Kekuatan ulama diberi pengesahan selanjutnya tahun 1949 ketika pemerintahan republik menyetujui Aceh diberi status propinsi.<sup>4)</sup>

Dengan peresmian negara kesatuan pada tahun 1950,

---

2) Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm.17.

3) *Ibid.*, hlm.29

4) Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* ( New York: Ithaca, 1962), hlm.345.

di sana hanya ada satu propinsi yaitu Sumatera Utara, dan Aceh harus bergabung dengan Tapanuli dan Sumatera Timur. Tindakan itu menimbulkan permusuhan yang kuat dari grup ulama, setelah Wapres Hatta dan PM Natsir mengunjungi secara pribadi, Daud Beureueh setuju diangkat sebagai gubernur Sumut tapi walaupun demikian dia dan beberapa aparat lainnya tidak menyetujui penghapusan daerah otonomi Aceh. Sementara itu sisa-sisa kaum feodal semakin gencar melakukan intrik dan fitnah agar propinsi Aceh dibubarkan, usaha mereka ini dilakukan melalui tulisan-tulisan dalam koran di Medan dan Jakarta serta penyerahan resolusi kepada setiap wakil yang datang ke Aceh. Isi tulisan dan resolusi itu antara lain menyatakan bahwa siapa yang mempertahankan propinsi Aceh adalah pengkhianat yang ingin merusak persatuan negara dan penjahat yang ingin menghancurkan demokrasi dan kedaulatan. 5)

Pada tanggal 10 Desember Moh. Natsir mengirim berita agar rakyat Aceh jangan tergesa-gesa mengambil keputusan dan meminta waktu bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kongres PUSA II di Kutaraja, Daud Beureueh mengatakan akan memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat sementara Aceh tetap

---

5) Hassan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak* ( Jakarta: Grafitti, 1992), hlm.133.

menjalankan urusannya sendiri tanpa campur tangan dari propinsi Sumatera Utara sebelum keputusan final dari Jakarta datang. Ditegaskan pula para pamong praja Aceh akan tetap meletakkan jabatannya apabila tuntutan otonomi Aceh tidak dipenuhi.<sup>6)</sup>

Moh. Natsir kemudian membuat suatu rancangan baru penyelesaian masalah Aceh, dan pergi ke Kutaraja pada tanggal 22 Januari 1951. Setelah berunding dan membujuk para pimpinan Aceh, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tuntutan otonomi Aceh tidak ditolak pemerintah pusat tapi akan diusahakan dan diperjuangkan terus. Sementara itu Aceh tunduk dibawah propinsi Sumatera Utara sebagai tindakan peralihan, maka berakhirlah riwayat Propinsi Otonomi Aceh. Tengku Daud Beureueh dipindahkan ke Jakarta tapi kemudian pulang kembali ke kampungnya ke Usi, Beureunun karena tidak betah.

Sebagian besar rakyat marah dan kecewa. Kekecewaan itu bertambah karena janji PM untuk memperjuangkan otonomi Aceh tidak pernah dilaksanakan. Banyak pemimpin PUSA lainnya meninggalkan pemerintah pada waktu yang sama. Kekecewaan ini ditambah dengan tindakan Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim yang selalu mencela para pemimpin Aceh yang beberapa waktu lalu mempertahankan propinsi Aceh. Mulai tahun 1951 kekuatan

---

6) Ibid., hlm.134

Uleebalang telah terorganisir lebih besar dan mendapat dukungan dari pemerintahan. Pada saat yang sama pimpinan PUSA tidak puas dengan Jakarta. Mereka menuduh perjudian dan pemabukan meningkat di Aceh sejak pemerintah Jakarta mengambil alih pemerintahan secara langsung. Mereka menyalahkan juga peraturan di mana Aceh seharusnya dilindungi dari perdagangan secara langsung dengan Malaya seperti yang telah dilakukan sejak masa revolusi.

Aceh merasa telah memberi sumbangan besar bagi perjuangan kemerdekaan karena merupakan satu-satunya wilayah luas yang tidak pernah dipenetrasi Belanda, dan ekspor mereka sangat penting dalam pembayaran aktivitas diplomatik RI di luar negeri, tapi sekarang diperlakukan seperti anak tiri dalam pemberian dana untuk pendidikan, perbaikan jalan, irigasi, dan pembangunan wilayah lainnya. Moral, politik, keluhan ekonomi bersenyawa dengan kepercayaan melawan pemerintah pusat pada permulaan tahun 1953. Ketika Presiden mengunjungi Aceh dalam bulan Maret 1953, dia disambut PUSA dengan spanduk " Kami Mencintai Presiden tapi Lebih Mencintai Agama ".<sup>7)</sup>

Pertengahan bulan April. Daud Beureueh sebagai

---

7) Herbert Feith, *op.cit.*, hl.345-346; lihat juga Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm.61

ketua Konferensi Ulama Seluruh Indonesia di Medan mengusulkan suatu formulasi konstitusi untuk basis negara Islam. Setelah konferensi, organisasi PUSA semakin luas mencakup pemuda, pemuda dan grup veteran. Pada bulan Mei tentara menemukan fakta-fakta kontak antara Daud Beureueh dan Kartosuwiryo dari D.I. Desadesus mulai terdengar bahwa pemberontakan Islam sebentar lagi akan meledak di Aceh.<sup>8)</sup> Pada bulan Juli Wapres Hatta pergi ke sana untuk bicara dengan Daud Beureueh agar tetap setia pada republik, tapi usaha tersebut sangat sulit mengingat Masjumi tidak ikut serta dalam pemerintahan.

Pada malam bulan September, 20 pos polisi dan tentara yang terpencar-pencar di 7 kote di Aceh diserang oleh orang berseragam hitam yang membawa beberapa senjata dan berusaha untuk dapat menangkap lebih banyak lagi. Keseluruhan serangan dapat dipukul mundur, tapi segera menjadi jelas bahwa koordinasi pemberontakan mulai dibangun dari surat edaran yang ditandatangani Daud Beureueh mengumumkan bahwa Pancasila telah hilang dari pemerintahan Aceh dan Aceh akan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang pertama kali diproklamlirkan oleh Kartosuwiryo, Agustus 1949. Serangan ke kota tetap dilanjutkan dan pasukan

---

8) *Ibid.*, lihat juga Hassan Saleh, *op.cit.*, hlm148-149

pemerintah diungsikan ke tempat yang lebih baik.

Banyak anggota pemerintah meninggalkan kota pesisir untuk bergabung dengan kekuatan pemberontak di pedalaman dan banyak unit tentara mengikutinya. Banyak anggota keluarga Uleebalang dan pegawai sipil non Aceh mengungsi ke Medan.

Situasi sulit ini menarik perhatian pemerintah. Peristiwa ini seolah-olah dicetuskan untuk menguji kesanggupan pemerintah dalam melaksanakan politiknya di bidang keamanan. Oleh karena itu pemerintah bertekad menyelesaikan pemberontakan tersebut secepat mungkin. Pemerintah menginsafi betapapun tegasnya tindakan pemerintah, tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam peristiwa ini rakyat Aceh mendukung Daud Beureueh yang berwibawa dan disegani sebagai pemimpin ulama di dalam perlawanannya terhadap golongan feodal. Di samping itu teritorial Aceh sangat luas, bergunung-gunung, jalan-jalan rusak, dan kota-kota pesisir sangat tergantung soal bahan makanan dari pedalaman yang sangat sukar untuk dikontrol.

Berhubung dengan itu kebijaksanaan pemerintah pada tahap awal terbatas pada usaha untuk memadamkan pemberontakan secara militer dengan maksud supaya pemberontakan dapat diberantas atau setidaknya dilokasir terlebih dahulu. Kekuatan militer yang



dikerahkan hanya bisa diambil terutama dari Sumut karena pemerintah harus memperhitungkan supaya usaha penentruman daerah kekacauan di Jabar, Sulsel, dan Kalsel dapat ditingkatkan.<sup>9)</sup> Untuk membuktikan ketegasan, kabinet Ali menanggapi pemberontakan dengan pertunjukan militer. Tidak ada percakapan negosiasi ataupun amnesti, sebaliknya pasukan mencapai Aceh melalui berbagai bagian Sumatera. Selain menjalankan tugas militer yang tegas, kekuatan TNI yang dikerahkan ke Aceh pun diberi perintah sedapat mungkin membantu kembali pulihnya pamong praja dan kepolisian. Jadi operasi di Aceh bersifat bantuan militer, sedangkan tanggungjawab masih tetap ada pada penguasa sipil.

Usaha pemerintah itu mendapat hasil meskipun kurang memuaskan. Pihak pemberontak dalam waktu sebulan terpaksa mengundurkan diri dari kota-kota dan menjalankan perang gerilya. Pada akhir bulan Oktober karakter perang berubah, keadaan kacau di Aceh telah dapat dikuasai oleh alat negara. Pertempuran kecil dan kadang-kadang serangan ke kota-kota dan jalur komunikasi terus berlanjut tapi tidak ada tanda-tanda signifikan yang menunjukkan kemajuan. Hanya daerah Takengon yang memerlukan waktu agak lama yaitu sampai

---

<sup>9)</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* (Jakarta:PT Kinta, 1974), hlm. 317.

bulan Desember.<sup>10)</sup>

2). Pemilihan Umum

Pelaksanaan program yang menyangkut pemilihan umum juga mendapat sanggahan dari oposisi. Pada tanggal 4 November 1953, kabinet mengumumkan keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia. S. Hadikusumo dari PNI menjadi ketua panitia tersebut, dan 8 anggota lainnya yang dipilih dari NU, PSII, PRI, PRN, Partai Buruh, BTI, Perti, dan Parkindo. Panitia Pemilihan Indonesia mempunyai wewenang untuk menjalankan dan memutuskan yang ada hubungannya dengan pemilihan. Banyak yang merasa komposisi tersebut tidak cukup mewakili golongan yang lain. Banyak yang melakukan protes terutama dari Masjumi, PSI, PKI, dan SOBSI. Dr. Sukiman, wakil ketua I Masjumi, menyurati Presiden Sukarno dengan petisi agar Presiden memberi jaminan pada tanggal 28 November Masjumi akan terwakili di panitia pemilihan dari 15 distrik pemilihan.

Di Jakarta masalah komposisi panitia pemilihan menjadi hangat terlebih setelah Sjamsuridzal (Walikota) dari Masjumi diganti oleh Sudiro dari PNI. Sebelumnya Sjamsuridzal telah menyelesaikan rencana panitia pemilihan untuk distrik Jakarta dan menunjuk

---

10) *Ibid.*, Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.347-348; lihat juga Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1947* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.139-140.

anggota dari 3 kabupaten panitia pemilihan. Pada bulan Januari 1954 Sudiro mengubah komposisi dari 3 kabupaten pemilihan dengan rencana baru untuk panitia pemilihan di kotapraja. Hal itu menimbulkan protes dari Masjumi dengan mengadakan demonstrasi pada tanggal 13 Febuari 1951 yang dipimpin oleh Isa Anshary.<sup>11)</sup> Demonstrasi itu dibalas dengan rapat umum dimana tokoh-tokoh partai pemerintah menjawab serangan oposisi terhadap Sudiro. Demonstrasi terus berlanjut. Masjumi dibantu oleh organisasi Islam lainnya yang sepaham dengannya, masalahnya tidak hanya menyangkut panitia pemilih tetapi juga ucapan-ucapan dari tokoh PNI yang dianggap menghina Islam yaitu oleh Mr Hardi. Keadaan makin memanas, keributan diakhiri dengan meninggalnya seorang kapten TNI yang berusaha menentramkan keadaan.

Selama tahun 1954, pihak oposisi selalu mengkritik kabinet karena kegagalannya menjalankan jadwal pemilihan. Waktu selama 16 bulan yang terhitung mulai bulan Januari 1954, dianggap oleh oposisi kelamaan karena partai pemerintah sengaja menunda waktu pemilihan agar mendapat kesempatan baik untuk memainkan siasat agar menang dalam pemilihan. Serangan-serangan dari pihak oposisi dijawab oleh pemerintah dengan

---

11) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.350 : Ali satroamidjojo, *op.cit.*, hlm.319.

mengeluarkan jadwal pemilihan oleh Hadikusumo sebagai ketua panitia pemilihan pada tanggal 16 April 1954. Pada tanggal itu pemerintah mengumumkan jadwal pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah Panitia Pemilihan Pusat mengizinkan untuk mengadakan kampanye pada tanggal 3 Mei 1954, berbagai partai berusaha agar para pemilih berpihak pada mereka.

Berbagai edaran, simbol-simbol dari partai bermunculan di berbagai dusun, desa, maupun kota. Beberapa partai seperti PKI aktif di berbagai areal dengan slogan "Kecil Tetapi Efektif dalam Tindakan", dengan program partainya kesejahteraan sosial.

Persoalan kampanye nasional pada prinsipnya merupakan persoalan antara pemerintah dengan partai oposisi khususnya antara PNI dan Masjumi. Perdebatan besar terjadi antara PNI dan Masjumi, NU, PSII, dan PIR merupakan partai kecil yang penting sama halnya dengan PSI dan 2 partai Kristen.

Di sisi lain PKI merupakan partai utama yang ketiga. Dalam kampanye, ketiga partai tersebut saling melancarkan propaganda dan saling menjatuhkan lawannya. Dalam hal itu Masjumi secara relatif kurang berhasil dalam meyakinkan rakyat dan para pemimpinnya berusaha mencegah pandangan ekstrim terhadap partainya. Pada saat yang bersamaan mereka didesak untuk bertoleransi

dengan partai Islam lainnya dan janjinya untuk memberikan kebebasan pada non-Islam untuk menjalankan kepercayaan mereka. Ketika kegiatan partai Front Anti Komunis pimpinan Isa Anshary membuat Masjumi kelihatan menjadi partai Islam yang tidak toleran di beberapa tempat, maka Masjumi memutuskan untuk menghentikan aktivitas Front Anti Komunis dalam Kongres Desember 1954.<sup>12)</sup>

PNI lebih banyak mengalami kesuksesan dalam membangun antusiasme dari pengikutnya sambil menghindari tekanan menjadi ekstrimis. Dalam hal ini disebabkan karena idiologinya yang dibangun berdasarkan basis Hindu- Jawa telah berdifusi dan bersinkretis membungkus seluruh karakter pembangunan. Di samping itu juga karena PNI menjadi pimpinan pemerintahan dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Presiden yang sangat mendukung PNI. Partai pemerintah juga menggambarkan partai mereka terletak di antara Masjumi dan Komunis. PNI, NU, dan partai pemerintah lainnya berkampanye bahwa mereka menjadi penegak yang sesungguhnya atas politik Luar Negeri Indonesia yang merdeka seperti menolak pengaruh Washington yang diwakili oleh Masjumi dan pengaruh Moskow yang diwakili oleh PKI.

---

12) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm. 357.

Senjata kampanye utama mereka adalah anti kolonialisme seperti melawan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam usahanya untuk merebut kembali Irian Barat. Kesuksesan terbesar mereka adalah diselenggarakannya Konferensi Asia - Afrika di Bandung bulan April 1955, lima bulan sebelum pemilu untuk parlemen.<sup>13)</sup> PKI sebagai partai pendukung pemerintah mendapat beberapa keuntungan dari situasi PNI dan partai pemerintah lainnya. Bagi PKI masalah yang terpenting adalah membangun dirinya sebagai partai yang moderat, toleran dan nasional sejati. Partai itu dengan semangat mendukung usaha partai pemerintah untuk melukiskan bahwa partai oposisi tidak loyal. Sejauh PKI masih membawa kebijaksanaan Front Persatuan Nasional, menyebabkan ide-ide sosialis kelihatan sedikit mempengaruhi partai tersebut.

Di beberapa wilayah rakyat percaya akan janji PKI pasti terlaksana apabila PKI menang dalam pemilihan. Pada bulan Juni 1955, partai ini menulis kembali akan program partainya untuk pemilihan. Sejak itu usaha pemilihan tidak secara langsung bertujuan untuk membangun Pemerintahan Rakyat Demokratik tapi lebih kepada Pemerintah Koalisi Nasional.<sup>14)</sup> Agar tidak

---

13) Ibid., hlm. 358

14) Ibid., hlm. 358-359

kelihatan anti agama. pada bulan April 1955 menandatangani deklarasi dengan PSII yang berisi agar antara partai tidak saling menverang. Di daerah yang terbagi antara grup Islam dan Hindu dan elemen pra-Hindu yang bersintesis dalam kebudayaan-kepercayaan tradisional terutama di daerah Timur dan Jawa Tengah. PKI mengatakan bertoleransi dengan sinkritisme dan elemen Indonesia asli dalam bidang kebudayaan-keagamaan.

Persaingan dalam kampanye terutama terjadi di desa-desa, di samping penduduk yang banyak dan mereka relatif mudah untuk dipengaruhi agar memilih partai mereka. Pada saat yang sama konflik terbuka juga terjadi di luar desa dan orang-orang muda/pelajar. Tekanan-tekanan yang terjadi cukup memberi keributan di pertemuan politik, pemasangan poster-poster pemilihan, tekanan dan ancaman dari penguasa memaksa bawahannya untuk bekerjasama dan mendukung partai mereka. Tekanan pers ikut memperbesar konflik ini. Pertikaian ini memancing beberapa konflik antara grup yang berorientasi berbeda dalam bidang sosial-religius, antara pimpinan adat dan ulama, tuan tanah dan penyewa, penghutang dan pemberi hutang, juga antar klan (marga/suku).

Konflik ini semakin tajam di beberapa daerah pemukiman atau kampung dan beberapa daerah yang

dipengaruhi oleh perdagangan dan urbanisasi. Pemerintah menyadari adanya kemungkinan timbul gangguan dari pemilihan tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1953, Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pembicaraan politik dan diskusi-diskusi yang diadakan di mesjid, gereja dan tempat keagamaan lainnya. Setelah diadakan rapat umum oleh Badan Koordinasi Organisasi Islam, mereka menyimpulkan kematian Kapten TNI akibat dari demonstrasi pemilihan.

Dari hasil pertemuan itu maka perlu adanya kekuatan untuk menekan kampanye yang menimbulkan gangguan dan menahan pimpinan partai yang membuat pidato yang menghasut, membongkar lambang atau simbol dari partai yang akan ikut dalam pemilihan dan sebagainya. Langkah tersebut hanya dapat berhasil apabila ada kerja sama antara tentara, polisi, pamongpraja, kejaksaan, dan wakil Koordinasi Keamanan Daerah. Keamanan serupa juga diperlukan di tingkat propinsi dan kabupaten. Problem yang serius adalah legitimasi pemerintah sebagai wasit dalam kampanye di mana pembatasan-pembatasan yang menjatuhkan jarang menyerang partai pemerintah. Apabila terjadi penangkapan, selalu mengenai anggota Masjumi dan PKI.

PKI walaupun berada dalam pengekan tidak melawan pembatasan kampanye, tapi dalam hariannya selalu berisi keluhan tentang ini. Sedangkan Masjumi



selalu mengadakan protes dengan penuh semangat. Kebencian Masjumi terutama atas penangkapan wakil ketua II, Mr Kasman Singodimedjo di Ambon dalam bulan Mei 1954 atas pernyataan kepulauan Kristen-Muslim. Dia mengatakan bahwa idiologi Islam merupakan kreasi Tuhan, dimana idiologi lainnya termasuk Kristen merupakan kreasi dari manusia. Masjumi mempertanyakan mengapa PKI tidak bertanya atas pernyataan yang propokatif tersebut.<sup>15)</sup>

Hal ini semakin diperjelas dengan peranan Sukarno-Hatta di dalam kampanye. Dwitunggal Sukarno-Hatta telah menjadi simbol persatuan nasional lebih penting daripada kedaerahan. Hatta lebih memainkan peranan yang kecil dalam masyarakat dibanding Sukarno. Ketika ia berpidato, ia selalu menyokong pemerintah tapi dari issue politik pandangannya lebih dekat dengan Masjumi dan PSI sebagai oposisi, yang selalu bertentangan dengan topik pidato Presiden. Presiden dengan aktif mendukung kabinet Ali berbeda dengan kabinet sebelumnya. Ketika Sidik ketua PNI memperingatkan pada bulan Desember 1953 bahwa parlemen akan bubar apabila ketegangan antara kabinet dan partai oposisi bertambah besar, partai oposisi merasa ini merupakan ancaman yang serius.

---

15) Ibid., hlm.363.

Dalam kampanye Presiden gagal menjadi media pendamai karena asosiasinya dengan pemerintah. Ketika dia berusaha untuk menyatukan antara nasionalis, group keagamaan, oposisi menyangka bahwa ia berusaha menarik NU dan PSII agar berasosiasi dengan PNI. Natsir menyimpulkan posisi mereka atas pidato Sukarno di Palembang, "Presiden pada kenyataannya menghancurkan posisinya sebagai Bapak Negara dan wasit final dari segala sesuatu dengan berpihak pada salah satu partai dalam konflik".<sup>16)</sup>

Panitia Pemilihan Pusat yang didominasi oleh partai pemerintah bukannya memainkan peranan yang berat sebelah. Dalam badan yang lebih rendah partai-partai di luar kabinet mempunyai wakil lebih baik daripada dalam panitia pusat. Persiapan pemilihan umum ini tidak dapat direalisasikan oleh kabinet Ali, karena sebelum pemilihan diadakan kabinet mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

### 3) Perekonomian

Pelaksanaan program dalam negeri lainnya yang mendapat tentangan adalah kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, yang menjadi tanggungjawab Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisuryo. Kebijaksanaan Mr. Iskaq terkenal dengan semboyannya "dari ekonomi

16) Ibid., hlm. 365

kolonial menjadi ekonomi nasional". Pada hakekatnya politik ini berdasarkan gagasan untuk secepat mungkin mengalihkan penguasaan ekonomi kita, yang masih hampir seluruhnya dipegang oleh orang-orang asing kepada pengusaha-pengusaha Indonesia dalam arti kata sempit yaitu pengusaha-pengusaha pribumi. Politik demikian bisa dinamakan semacam nasionalisasi ekonomi. 17)

Nasionalisasi ekonomi, atau yang disebut Indonesianisasi, mempunyai tiga arti. Pertama diversifikasi / pembedaan produksi, kedua pembangunan ekonomi dan kemakmuran, ketiga pemindahan kontrol dan manajemen perusahaan ekonomi dari orang asing (Barat dan Cina) ke tangan orang Indonesia. 18) Latar belakang politik Indonesianisasi ditinjau dari sudut kemerdekaan politik saja bagi negara kita belum sempurna kalau ekonomi negara kita masih dikuasai oleh orang asing, terutama bangsa Cina dan Belanda. Dalam kegiatan perdagangannya bangsa Belanda selalu memakai orang Cina sebagai saluran mereka, dan menolak kerjasama dengan orang-orang pribumi Indonesia. Untuk melaksanakan programnya itu, maka dengan segera disediakan kredit, lisensi dan melindungi posisi sejumlah besar perusahaan baru Indonesia. dan ia mencapainya dengan kecepatan

---

17) Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm.324.

18) Herbert Feith, op.cit., hlm.374.



yang mengherankan.

Perkembangan nasionalisasi berjalan dengan pesat, pada bulan Nopember 1954 kurang lebih sesudah setahun jabatannya jumlah perusahaan impor pribumi di seluruh Indonesia sudah mencapai lebih kurang 2.000 buah jadi kira-kira delapan kali lebih banyak dari jumlah pada akhir tahun 1950 yang hanya berjumlah 250 buah. Begitu pula perkembangan perbankan nasional. Pada pertengahan tahun 1953 bank-bank swasta nasional sudah berjumlah 20, sedangkan bulan Desember 1949 hanya 4 dan akhir 1955 sudah berjumlah 75. Itu dimungkinkan karena bisa memperoleh kredit dari Bank Indonesia dengan mudah.

Perkembangan perusahaan perkapalan demikian juga banyak perusahaan perkapalan swasta nasional didirikan dengan kredit dari bank-bank pemerintah, tahun 1965 sudah berdiri 65 perusahaan kapal nasional, sangat besar dibanding sebelum 1953.<sup>19)</sup> Kepesatan dari tindakan Mr. Iskaq itu menyebabkan kurang telitinya di dalam memberikan lisensi-lisensi perdagangan kepada orang-orang yang belum berpengalaman di dalam perniagaan. Akibatnya banyak di antara mereka menjual lisensi kepada pengusaha bangsa asing terutama pengusaha Cina, sehingga timbullah ejekan bagi penjual lisensi itu sebagai pengusaha aktentas/perusahaan Ali-

---

19) Ibid., hlm.375; Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm.325

Baba yaitu perusahaan Indonesia-Cina dimana Ali mewakili nama Indonesia yang mempunyai lisensi dan Baba wakil nama Cina yang menjalankan usaha tersebut. Hal serupa juga terjadi di dalam perbankan dan perkapalan.

Akibat kebijaksanaan tersebut terjadi inflasi karena pengeluaran uang yang tidak terkontrol dalam pemberian kredit dan terjadi penyelundupan bahkan pimpinan tentara ikut dalam usaha tersebut. Kebijakan ekonomi dari Mr. Iskaq mendapat serangan dari oposisi. Pada tanggal 20 Oktober 1953 K.H. Tjikwan dari Masjumi mengajukan interpelasi dalam parlemen. Partai oposisi mengkritik habis-habisan politik Mr. Iskaq dan menuduhnya memberi lisensi perdagangan dengan tidak adil, karena bagian terbesar dari penerima lisensi adalah anggota PNI.

Tokoh Masjumi lainnya Mr. Jusuf Wibisono menamakan politiknya bukanlah politik me-nasionalkan-ekonomi, tetapi menjadikan ekonomi nasionalis Indonesia. Kecaman oposisi itu dibalas dengan keras oleh partai-partai pendukung pemerintah, terutama PNI. Mereka juga menuduh partai oposisi melakukan kebijaksanaan yang sama tatkala mereka memegang kekuasaan.<sup>20)</sup> Diskusi semakin sulit, pada tanggal 2 Desember 1953, Tjikwan meminta formulasi yang tepat dari pemerintah mengenai konsepsi

---

20) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.326.

ekonomi nasional. Diskusi ini ditunda sampai bulan April. Pada tanggal 29 April 1954 oposisi meningkatkan interpelasinya menjadi mosi tidak percaya kepada menteri perekonomian.

Dalam perdebatan baru itu oposisi menuduh bahwa lisensi yang diberikan menteri dengan syarat supaya penerimanya memberi sumbangan uang kepada partainya (PNI) guna pembentukan dana pembiayaan pemilu. Akibat tuduhan itu banyak partai yang melakukan oposisi terhadap kabinet termasuk anggota dari partai PIR dan NU, sehingga dalam pemungutan suara pemerintah memang memperoleh kelebihan suara 110 lawan 60 tetapi didapat dengan tidak mudah. 21)

#### B. Irian Barat

Dalam keterangan di depan DPRS, perdana menteri mengatakan bahwa soal Irian Barat adalah masalah khusus, karenanya soal Irian Barat diberi tempat tersendiri. Tuntutan terhadap Irian Barat berdasarkan sejarah, hukum, dan politik bahwa daerah tersebut satu wilayah tanah air Indonesia. Pendirian ini sesuai dengan bunyi Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 yang berbunyi " Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut". Perkataan Indonesia

---

21) Ibid., hlm.380; Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm.326

menurut pasal ini berarti daerah Hindia Belanda dulu yang kedaulatannya sudah dipulihkan tanggal 27 Desember 1949 oleh kerajaan Belanda kepada pemerintahan Indonesia.

Sejak tanggal itu persengketaan antara kedua negara berhubungan dengan kekuasaan (*gezag*) *de facto* di Keresidenan Irian Barat. Kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan sampai 27 Desember 1950. Tetapi persengketaan itu tidak selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, karena dalam pasal 2 bagian f dari piagam penyerahan kedaulatan dikatakan, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin timbul diselesaikan dengan jalan rukun, maka status quo Keresidenan Irian (*Nieuw-Guinea*) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada RIS masalah kedudukan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dengan kerajaan Nederland.<sup>22)</sup>

Lagi pula tidak ada satu kalimatpun dalam perjanjian apapun antara Indonesia-Belanda yang menyatakan kekuasaan *de facto* akan boleh terus dijalankan oleh

---

22) Notosoetardjo, *Dokumen-Dokumen Konperensi Medja Bunder* ( Jakarta: Endang, 1956), hlm. 69.

pemerintah Belanda di Irian Barat apabila perundingan mengenai daerah tersebut mengalami kegagalan. Pemerintah Indonesia berpegang teguh pada tuntutannya atas Irian Barat dan memegang kewajiban untuk menggabungkannya dengan wilayah Indonesia dengan jalan damai dan kedaulatannya tidak boleh dibagi-bagi, sehingga kekuasaan de facto harus berada dalam tangan pemerintah Indonesia.<sup>23)</sup>

Pemerintah sengaja memasukkan masalah Irian Barat ke dalam forum Internasional karena penyelesaian secara bilateral tidak mencapai hasil. Pemerintah melihat soal Irian Barat sebagai masalah kolonialisme yang harus dipecahkan dalam forum Internasional, karena pada waktu itu perjuangan anti kolonialisme sedang menghebat di seluruh dunia yang masih terjajah. Kesempatan pertama kali untuk membahas masalah ini datang ketika Indonesia diundang oleh PM Sri Lanka Sir John Kotelawala untuk menghadiri Konperensi Lima Perdana Menteri di Colombo ( Birma, India, Indonesia, Pakistan, Sri langka ) pada tanggal 28 April 1954. Atas prakarsa Indonesia konperensi tersebut memutuskan untuk mendukung tuntutan kita atas Irian Barat. Konperensi Colombo cukup menarik perhatian dunia karenanya dukungan terhadap Irian Barat adalah suatu langkah yang penting. Pada tanggal 17

---

23) Kementrian Penerangan, op.cit.,hlm.23-24.



Agustus 1954 menjelang sidang umum PBB yang ke-9 yang diadakan pada bulan September, pemerintah memberi instruksi kepada Mr. Sujarwo Tjondronegoro, perwakilan kita di PBB, untuk memasukkan soal Irian Barat dalam sidang umum PBB.

Kesempatan lain yang digunakan ialah Konperensi Lima Perdana Menteri di Bogor pada tanggal 28 Desember 1954 yang menegaskan lagi dukungan mereka atas tuntutan kita soal Irian Barat. Dalam konperensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955, para peserta juga memberi dukungan kepada Indonesia, sehingga tuntutan kita diketahui oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Hal ini sangat penting bagi posisi Indonesia di forum PBB waktu memperdebatkan masalah Irian Barat sejak sidang umum ke-9. Dalam forum tersebut Indonesia mendapat dukungan dari negara lainnya walaupun ada beberapa negara yang tidak setuju.

Negara yang mendukung adalah Burma, Uni Soviet, Syria, Thailand, dan Czechoslovakia. Delegasi mereka mengatakan apabila negosiasi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia - Belanda gagal, maka adalah salah apabila Majelis Umum PBB menolak permintaan pemerintah Indonesia agar masalahnya dimasukkan dalam agenda sidang umum, karena masalah Irian Barat termasuk konflik militer. Yang kontra adalah Australia dengan alasan etnis yang terdapat di Irian Barat berbeda dengan

rakyat Indonesia lainnya. Perancis juga tidak setuju karena berdasarkan artikel Piagam PBB no.2 maka Belanda mempunyai hak penuh atas Irian Barat. Inggris juga menolak dengan alasan berdasarkan laporan dari pemerintah Belanda mengatakan masyarakat Irian Barat tidak tertarik masuk Indonesia karena tidak adanya hubungan persaudaraan antara partai politik di Indonesia.<sup>24)</sup>

Setelah melalui perdebatan diambil pemungutan suara dalam Komite Umum dengan keputusan 7 lawan 3 dan 5 abstain, dengan perincian yang mendukung Burma, Cuba, Czechoslovakia, Equador, Syria, Thailand, USSR; yang kontra Australia, Perancis, Inggris; yang abstain China, Colombia, Iceland, USA, Presiden Sidang Umum yang ke-9 ( Van Kleffens dari Belanda). Akhirnya masalah Irian Barat untuk pertama kalinya dimasukkan dalam agenda sidang umum PBB pada tanggal 24 September 1954.<sup>25)</sup> Masalah Irian Barat ini tidak dapat diselesaikan dengan tuntas pada masa kabinet Ali I karena kabinet keburu jatuh.<sup>26)</sup>

---

24) Kementrian Luar Negeri RI, *The Question of West Irian in The United Nations, 1954-1957* ( Jakarta: Kementrian luar Negeri RI), hlm.16-19.

25) *Ibid.*, hlm.21-23.

26) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.321-322.

### C. Politik Luar Negeri

Dalam keterangannya dikatakan, politik luar negeri sebagian besar tergantung dari kekuatan dalam negeri terutama kekuatan nasional, ekonomi, dan militer, terlebih bagi negara kita yang menjalankan politik bebas dan aktif. Politik luar negeri yang bebas tidak dapat bersifat isolasi atau masa bodoh di lapangan politik internasional, oleh sebab itu kita turut sebagai anggota PBB, mendekatkan dua blok yang bersengketa ( antara Amerika dan Uni Soviet ), membuat perjanjian-perjanjian persahabatan dengan negara lainnya ( Asia dan Afrika ).

Dengan negara-negara tetangga kita mengusahakan tercapainya suatu hubungan yang berdasarkan " *good neighbour policy* " yang akan memupuk *good-will* dari kedua belah pihak untuk kerja sama di lapangan ketetanggaan itu, sesuai dengan piagam PBB. Dalam hubungan itu ada beberapa hal yang harus diusahakan selekas-lekasnya yakni merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Status Uni menjadi hubungan internasional biasa dan meninjau kembali perjanjian hasil KMB dan menghapus perjanjian yang merugikan Negara Ikatan Uni tersebut. Usaha itu sudah dicoba semenjak Desember 1949 tapi belum pernah berjalan baik, sehingga tidak ada jalan lain kalau mau memperbaiki hubungan antara Indonesia-Belanda menjadi hubungan

internasional biasa, maka bidang ekonomi, keuangan, dan sebagainya dan sisa-sisa zaman kolonialisme secepat mungkin harus dihapuskan.

Soal lainnya yaitu penukaran perwakilan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet, hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Hal tersebut di atas menjadi pokok politik luar negeri pada masa pemerintahan Ali I.<sup>27)</sup> Dalam melaksanakan pasal mengenai hubungan RI dengan kerajaan Belanda, bulan Juli 1954 Pemerintah mengirim delegasi yang diketuai oleh menteri luar negeri Mr. Sunario ke Den Haag untuk mengadakan perundingan dengan menteri luar negeri Belanda, Mr. Luns, tentang pembubaran Uni Belanda-Indonesia dan menggantinya dengan hubungan internasional biasa. Selain itu juga akan dirundingkan tentang penghapusan perjanjian KMB lainnya yang merugikan negara, yaitu perjanjian keuangan dan ekonomi yang memberi hak-hak khusus kepada pihak Belanda.

Hasil dari pertemuan ini adalah Protokol Sunario-Luns yaitu persetujuan tentang pembubaran Uni dan penghapusan beberapa perjanjian di bidang kebudayaan

---

27) Kementrian Penerangan, *op. cit.*, hlm. 24-28.

dan militer.<sup>28)</sup> Ditinjau dari keseluruhan perjanjian KMB, terutama di bidang ekonomi dan keuangan, delegasi Sunario hanya mencapai sukses yang kecil, tapi dengan pembubaran Uni Belanda-Indonesia mempunyai pengaruh psikologis atas politik kita terhadap pihak Belanda misalnya menjadi perangsang untuk memperjuangkan Irian Barat dengan lebih gigih lagi.<sup>29)</sup>

Soal penukaran diplomatik dengan Uni Soviet berdasarkan mosi Rondonuwu yang telah disetujui tahun 1952, tapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan sampai pada batas waktu yang ditetapkan, maka pemerintah memutuskan akan segera membuka perwakilan diplomatik di Moskow. Keberatan datang dari Kepala Kepolisian Negara Sukanto, karena Kedutaan Besar Uni Soviet tentu juga akan dibuka di Jakarta. Pihak Kepolisian Negara belum mempunyai petugas yang cukup untuk menjaga dan mengawasi Kedutaan Besar Uni Soviet. Alasan pihak kepolisian dianggap kurang kuat karena petugas-petugas

---

28) Yang dimaksud dengan protokol adalah pemikiran penting dalam diplomasi yang membantu para diplomat untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan tingkah laku atau perbuatan yang efektif walaupun nampak hanya merupakan peninggalan yang bersifat upacara dari zaman sebelumnya, tapi sampai sekarang masih mempunyai fungsi tertentu. Dikutip dari Jahja Muhaimin, dkk., *Kamus Istilah Politik* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1985), hlm. 225.

29) Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 322; Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 391

yang harus menjaga dan mengawasi tidak saja untuk Kedutaan Besar Uni Soviet tapi juga perwakilan asing lainnya di Jakarta, untuk itu dapat diadakan organisasi dan melatih orang-orangnya. Setelah mengadakan persiapan dan perlengkapan sebaik - baiknya, dilaksanakanlah tukar-menukar perwakilan diplomatik antara Moskow dan Jakarta bulan September 1954.<sup>30)</sup>

Soal normalisasi hubungan dengan Jepang dikatakan hubungan normal dengan Jepang akan diusahakan secepat-lekasnya dengan mencari dasar kuat yang menguntungkan Indonesia, yakni suatu perjanjian bilateral sebagai pengganti Perjanjian Perdamaian San Fransisco, dimana diatur pembayaran kerugian perang dan perikanan laut. Normalisasi hubungan ini dititikberatkan pada soal kerugian perang. Pada bulan Januari 1953 Jepang mengutus Eiji Wajima untuk menjajaki kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan tentang pampasan perang. Ia juga ditugaskan untuk mendesak pemerintah Indonesia supaya Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (PPJ) lekas diratifikasi oleh parlemen. Tapi sikap Wajima yang kaku dan keras tidak memberi harapan yang baik bahkan ia tidak bersedia memberi ketegasan apakah Jepang bersedia membayar kerugian perang dalam bentuk lain daripada dengan memberi jasa kepada Indonesia,

---

30) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 154.

demikian juga dengan besarnya jumlah kerugian perang tersebut.

Pada bulan Oktober 1953, ketika Menlu Jepang Okizaki yang disertai Wajima datang ke Jakarta, ketegasan tentang hal tersebut diperoleh. Okizaki menyatakan Jepang bersedia melepas Perjanjian Perdamaian San Fransisco dan mengadakan perjanjian bilateral dengan Indonesia. Tetapi jumlah ganti kerugian yang ditawarkan begitu rendah hanya \$ 125 juta, padahal menurut misi yang dikirim bulan Oktober 1953 untuk mengumpul fakta tentang kesanggupan Jepang dikatakan Jepang masih bisa membayar \$ 1-2 milyar. Karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi maka perundingan menjadi sulit.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut pemerintah Indonesia sudah mengurangi tuntutan dari \$ 1 milyar menjadi \$ 800 juta dengan cara pembayaran :

1. Sebagian besar dibayar dengan barang-barang modal ( capital goods ) yang sangat diperlukan seperti kapal laut, lokomotif, kereta api, dan sebagainya.
2. Sebagian dibayar dengan jasa-jasa.
3. Sebagian dibayar dengan uang tunai, termasuk jumlah yang sama besarnya dengan hutang dagang Indonesia kepada Jepang.
4. Sebagian dibayar dengan barang-barang konsumsi.
5. Pembayaran lunas rampasan perang boleh dilaksanakan

dalam waktu 10 tahun.

Meskipun Dr. Sudarsono, Mr. Asmaun dan Sukardjo Wirjopranoto, pegawai-pegawai tinggi Kemlu yang ditugaskan menghadapi Eiji Wajima berusaha meyakinkan pihak Jepang bahwa tuntutan Indonesia tidak berlebihan, namun Wajima dengan teguh mempertahankan pendirian pemerintahnya.

Pihak Jepang mempertahankan pendiriannya supaya pembayaran pampasan itu dilakukan dengan kerjasama ekonomi tidak dengan barang-barang modal atau uang tunai. Maksudnya supaya Jepang dengan kerjasama ekonomi bisa menguasai ekonomi Indonesia dengan ketrampilan dan pengalaman mereka di bidang ekonomi. Usul pemerintah Jepang ditolak oleh pemerintah, itulah sebabnya normalisasi hubungan dengan Jepang ini tidak selesai sampai pemerintah mengembalikan mandatnya.<sup>31)</sup>

Sukses besar dalam pelaksanaan politik luar negeri pada masa pemerintahan Ali I adalah pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Latar belakang kegiatan ini adalah keinginan untuk melaksanakan politik luar negeri yang aktif ke arah usaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan Timur. Keaktifan Indonesia tidak akan berhasil apabila tidak dijalankan bersama-sama dengan negara-negara yang

---

31) Ibid., hlm. 456-457



keadaan dan kedudukannya di dunia sama dengan negara kita. Dari sebab itu kerja sama di dalam hal ini dengan negara Asia-Afrika akan memperkuat usaha pemerintah ke arah tercapainya perdamaian dunia.

Sebelum diadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA), diawali dengan konferensi yang dilaksanakan di Colombo atas prakarsa dari PM Sri Lanka Sir John Kotelawala. Konferensi itu membicarakan masalah perang dingin yang telah merambat ke Asia. Karena setelah kekalahan Perancis di Indo-China, Amerika campur tangan dalam masalah Indo-China, dengan mengorganisasi SEATO ( South East Asian Treaty Organization ) yaitu suatu persekutuan militer di bawah Amerika.<sup>32)</sup> Konferensi itu dihadiri oleh 5 PM yaitu Sri Lanka, Birma, India, Indonesia, dan Pakistan dimulai pada tanggal 28 April 1954. Pada saat konferensi Colombo diadakan, konferensi tentang masalah Indo-China di Jenewa sudah berlangsung selama 2 hari, oleh sebab itu perhatian konferensi Colombo tertarik pada konferensi Jenewa yang dipandang sebagai kelanjutan dari perkembangan perang dingin di Asia.<sup>33)</sup>

---

32) Roelan Abdulgani, *The Bandung Connection Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955* ( Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 17

33) *Ibid.*, Ali Sastromidjojo, *op.cit.*, hlm. 463; Herbert Feith, *op.cit.*, hlm. 387.

Konferensi itu diakhiri pada tanggal 2 Mei dan menghasilkan pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah Indo-China yaitu usul diadakan gencatan senjata di Indo-China, supaya Perancis menyerahkan kedaulatan Indo-China secara utuh, negara-negara besar ( Inggris, USA, Uni soviet, dan RRC ) tidak lagi campur tangan di Indo-China, menyarankan supaya PBB mengawasi pelaksanaan persetujuan-persetujuan yang dicapai dalam konferensi Jenewa.

Dalam konferensi inilah Indonesia mengajukan usul untuk diadakan konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia-Afrika. Usul Indonesia ini mendapat tanggapan yang dingin dari peserta lainnya, karena tidak percaya Indonesia mampu mewujudkan gagasan tersebut, karena keadaan Indonesia pada waktu itu belum stabil dan tentram, ekonominya masih belum sehat. Untuk tidak mengecewakan Indonesia mereka menyokong gagasan tersebut dan menyerahkannya kepada Indonesia supaya ia sendiri bisa menyelidiki lebih dulu sampai berapa jauh ada kemungkinan untuk mengadakan konferensi tersebut.<sup>34)</sup>

Melihat perkembangan yang terjadi dalam pertengahan tahun 1954, Nehru merubah pendirian, pada bulan September 1954 dikeluarkan pernyataan bahwa India-

---

34) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.466-468

Indonesia setuju untuk mengadakan konferensi Asia-Afrika, demikian juga dengan PM Birma U NU. Maka diadakanlah konferensi Bogor tanggal 28-29 Desember 1954 untuk mengadakan persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika.<sup>35)</sup> Dalam konferensi Bogor akan dibicarakan tujuan konferensi Asia-Afrika, siapa sponsornya, waktu dan lamanya, tingkat delegasi yang diminta hadir, agendanya, dan negara-negara yang diundang.

Hasil dari Konferensi Bogor, menetapkan tujuan dari KAA dirumuskan dalam 4 pasal :

- a. Mengusahakan good will dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, menyelidiki dan mengusahakan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama mereka serta mengadakan dan membina hubungan-hubungan bersahabat antara mereka sebagai tetangga-tetangga yang baik.
- b. Membicarakan soal-soal sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- c. Membicarakan soal-soal kepentingan-kepentingan khusus bagi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mempengaruhi kedaulatan nasional mereka, serta soal rasialisme dan kolonialisme.

---

35) Ibid., hlm.477 ; Herbert Feith, op.cit., hlm.338; Roeslan Abdulgani, op.cit., hlm.20.

d. Meninjau kedudukan Asia Afrika dan rakyat mereka di dunia pada waktu itu, serta sumbangan apakah yang dapat mereka berikan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Mengenai sponsor ditetapkan Indonesia yang akan menjadi sponsor utama dan akan mengorganisasikan seluruh jalannya KAA atas permintaan negara Colombo. Akan dibentuk Sekretariat Bersama yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani dari Indonesia sedangkan 4 negara Colombo lainnya akan duduk sebagai wakilnya.

Tentang tingkat delegasi disepakati tingkat menteri dengan penegasan yang dikirim adalah PM dan atau Menlu. Mengenai agenda konferensi berdasarkan pada 4 pokok tujuan KAA. KAA disetujui akan dilaksanakan di Indonesia pada akhir April 1955. Setelah melalui perundingan yang cukup seru akhirnya diputuskan akan diundang 29 negara.<sup>36)</sup> Setelah mendapat jawaban dari semua pemerintah yang diundang, maka Sekretariat Bersama mulai bekerja untuk mempersiapkan konferensi tersebut. Konferensi Asia Afrika secara resmi dibuka tanggal 18 April 1955 yang diawali dengan pidato pembukaan oleh Presiden Soekarno yang dilanjutkan dengan pidato Ali Sastroamidjojo sebagai ketua

---

36) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.478-479 ; Herbert Feith, *loc.cit.* ; Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, hlm.22-38.

konferensi.

Konferensi berlangsung selama 1 minggu dan berakhir pada tanggal 24 April 1955. Hasil konferensi ini yang terpenting adalah 10 pasal yang menjadi dasar untuk memajukan perdamaian dan kerja sama di dunia yang terkenal sebagai Dasa Sila Bandung. Sepuluh asas itu adalah:<sup>37)</sup>

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap negara untuk memepertahankan diri baik sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan piagam PBB.
6. a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar.  
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain

---

37) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.505; Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.157; " Konperensi Asia-Afrika" dalam *Harian Merdeka*, tgl.25 April 1955.hlm.1 klm.1-2.

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara manapun.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti dengan perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hakim ataupun lain-lain cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuaidengan piagam PBB.
9. memajukan kepentingan bersama dan kerja sama secara timbal balik.
10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Selama konferensi Asia Afrika berlangsung, antara Indonesia-Cina ditandatangani suatu persetujuan mengenai dwi kewarganegaraan. Penandatanganan itu dilakukan pada tanggal 22 April 1955 antara Sunario ( Menlu RI ) dengan Chou En Lai ( PM RRC ). Bunyi perjanjiannya, orang dengan dua kewarganegaraan dan ingin meninggalkan salah satunya dapat membuat pilihan menjadi warga negara Indonesia atau Cina yang keabsahannya diakui oleh kedua negara tersebut. Demikianlah KAA telah menimbulkan rasa kebanggaan nasional dan kekuatan politik Luar negeri Indonesia diperhitungkan oleh kementerian luar negeri dunia.<sup>38)</sup>

---

38) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm. 390-394

D. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembagian Tanah di Sumatera Timur dan Tambang Minyak di Sumatera Utara

Dalam usaha menyelesaikan segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet maka keputusannya diserahkan kepada parlemen. Hal ini dapat dilaksanakan karena kita memakai sistem demokrasi Parlementer dimana pemerintah wajib melaksanakan segala keputusan DPR.<sup>39)</sup> Beberapa persoalan penting yang dihadapi oleh pemerintah adalah:

1. Soal penukaran perwakilan diplomatik antara RI dengan Uni Soviet.
2. Soal hubungan Indonesia dengan Jepang.
3. Soal pembagian tanah di Sumatera Timur.
4. Soal tambang minyak di Sumatera Utara.

Untuk persoalan nomor 1 dan 2 pemerintah Ali I telah mengambil kebijakan seperti yang telah diuraikan di depan. Soal pembagian tanah di Sumatera Timur Kabinet Ali mengambil tindakan dengan mengirim kawat ke Gubernur Medan agar menghentikan pemerataan pemukiman penghuni liar pada tanggal 27 Agustus 1953. Pada kabinet sebelumnya ( Kabinet Wilopo ), Gubernur Medan mengambil tindakan dengan pentraktorasi pemukiman bagi para petani yang menentang pemerintah ( Peristiwa Tanjung Morawa). Pada bulan Maret 1954 didirikan Komisi

---

<sup>39)</sup> Kempen RI, op.cit., hlm.28

Negara Urusan Pembagian Tanah Pemukiman di Sumatera Timur, dan Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, pada saat yang sama mengeluarkan peraturan agar penghuni liar yang telah mempunyai kediaman sejak tanggal 27 Agustus 1953 dapat pindah dalam minggu tersebut.

Pada bulan Juni 1954 peraturan darurat tentang pemindahan untuk penghuni liar di tanah kontrakan asing telah berlalu. Pada tanggal 12 Juni seluruhnya sudah mendapat pemukiman tetapi disana juga terjadi pengusiran dan denda atau penjara bagi yang mempunyai pemukiman setelah tanggal itu. 40)

Masalah penambangan minyak di Sumatera Utara banyak menimbulkan konflik terutama dari grup yang berbeda politiknya dan bertindak sebagai oposisi, dengan mengeluarkan issue perjanjian baru dan issue tentang pengembalian tambang kepada Belanda. Pemerintah tidak dapat melakukan apapun untuk memecahkan jalan buntu, apakah penambangan tersebut akan dikembalikan kepada Belanda atau tidak. Pemerintah mencapai persetujuan penting dengan Standard Vacuum dan perusahaan minyak California Texas yang menanam investasi yang besar dalam rencana mereka melebihi tahun sebelumnya. 41)

Melihat pelaksanaan program kerja yang dilakukan

---

40) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.410

41) *Ibid.*, hlm.411



oleh kabinet Ali I ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Keberhasilan dan kegagalan tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendorong keberhasilan kabinet Ali I terutama adalah sokongan yang kuat dari Presiden sehingga rakyat mendukung semua program kerja yang ditetapkan, disamping itu susunan Kabinet Ali terdiri dari orang-orang yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing terutama Ali sendiri yang telah berpengalaman di bidang internasional sehingga program luar negerinya berhasil dengan baik. Faktor penting lainnya pada awal pemerintahannya situasi kalangan militer relatif stabil sehingga program dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor penghambat keberhasilan program adalah tidak ikut sertanya Masjumi dalam kabinet memperlemah kabinet, karena Masjumi pada waktu itu termasuk partai besar selain PNI, akibatnya kabinet tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari partai lain terutama dari golongan Islam yang memihak Masjumi. Sehingga mereka lebih sering melakukan oposisi terhadap kebijaksanaan yang diambil kabinet Ali. Di samping itu kabinet Ali lebih memusatkan pembangunan di Jawa daripada di luar Jawa yang menyebabkan terpolarisasinya pembangunan di Jawa. Dengan demikian penduduk di luar Jawa semakin merasa dirugikan oleh pemerintah akibatnya sering terjadi pergolakan di luar Pulau Jawa yang mengganggu

jalannya program.

Dari segi etnik komposisi kabinet sebenarnya telah memperburuk masalah etnik karena para menteri yang duduk dalam kabinet umumnya suku Jawa dan banyak yang berasal dari PNI sehingga sering menimbulkan rasa iri dari suku non Jawa dan non PNI. Selama pemerintahan kabinet Ali banyak kemudahan yang didapat oleh partai PNI sehingga menimbulkan pergolakan dari partai lainnya yang menyebabkan semakin tidak stabilnya keadaan baik dari segi keamanan maupun dari segi ekonomi. Akibat keadaan tersebut maka kabinet Ali mengalami kegoncangan ditambah dengan adanya konflik dengan militer menyebabkan kabinet Ali terpaksa mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955 kepada Wakil Presiden karena Presiden sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Demikianlah Kabinet Ali melaksanakan program kerja yang telah mereka tetapkan. Untuk selanjutnya akan dibahas masalah-masalah yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali I.

## BAB IV

### JATUHNYA KABINET ALI I

Kegoncangan yang dirasakan oleh kabinet Ali I, sebenarnya sudah dirasakan sejak dilancarkan oposisi terhadap kebijaksanaan menteri perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisuryo oleh partai oposisi, terutama oleh Masjumi, yang diajukan oleh K.H. Tjikwan dan Mr. Jusuf Wibisono. Dalam pemungutan suara di parlemen, memang kabinet memperoleh kemenangan suara tetapi didapat dengan susah payah. Tuduhan yang dilancarkan oposisi terhadap kebijaksanaan Mr. Iskaq membawa akibat buruk di luar parlemen. Perdebatan dalam parlemen membawa perpecahan dalam tubuh PIR yang akan melemahkan kabinet, ditambah dengan masalah yang terjadi dalam tubuh AD, menyebabkan kabinet Ali I mengembalikan mandatnya. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebab utama yang membuat kabinet Ali I jatuh.

#### A. Perpecahan dalam PIR

Seperti yang telah dijelaskan di depan, pembentukan kabinet Ali I dilakukan oleh Wongsonegoro (sebagai formatur) dari PIR. Otomatis PIR menjadi partai utama yang mendukung susunan kabinet. Walaupun Wongsonegoro tidak menjadi perdana menteri, tapi suara dari PIR tetap mendapat perhatian dalam kabinet. Perpecahan dalam tubuh PIR berawal dari kecaman



oposisi terhadap kebijaksanaan menteri perekonomian Mr. Iskaq, dengan mengatakan pemberian lisensi oleh menteri perekonomian dengan syarat supaya penerimanya memberikan sumbangan uang kepada partai Mr. Iskaq (PNI), guna pembentukan dana pembiayaan pemilihan umum.

Perdebatan di DPR mengenai masalah tersebut menyebabkan perpecahan dalam PIR, yang kemudian terkenal sebagai pertentangan antara Prof. Hazairin dan Mr. Wongsonegoro. Di dalam rapat DPP PIR dan anggota fraksinya di parlemen, pada tanggal 21 Juli 1954, anggota fraksi menuntut supaya menteri - menteri dari PIR ditarik dari kabinet. Kebanyakan dari anggota-anggota fraksi itu adalah penganut Hazairin. 1)

Pada tanggal 17 Oktober 1954 PIR yang dipelopori Mr. Tajuddin Nur (bekas perdana menteri NIT), menuntut agar kabinet Ali I menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. 2) Tuntutan penarikan menteri dan penyerahan mandat ini ditentang oleh Wongsonegoro yang mempunyai dukungan kuat terutama

---

1) Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* (Jakarta:PT. Kinta, 1974), hlm. 326

2) Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 159

dari cabang-cabang partainya di Pulau Jawa. Perpecahan tidak dapat dihindari lagi, pada tanggal 22 Oktober 1954 PIR pecah menjadi dua partai yaitu PIR-RIN (Hazairin) dan PIR-Wong (Wongsonegoro).<sup>3)</sup> Perpecahan itu agak menyulitkan pemerintah, karena dari 20 suara PIR di parlemen terbanyak menganut politik Hazairin, dan mereka mengundurkan diri dari parlemen.

Kesulitan ini diatasi dengan UJ no.37 tanggal 29 Desember 1954 dengan diangkat 23 orang anggota baru parlemen oleh partai dan kabinet untuk mengisi lowongan keanggotaan di DPRS dari fraksi non-partai. Dari 23 anggota partai itu hanya 7 orang yang tidak mendukung pemerintah. Pada bulan Juli 1954, partai NU menyampaikan nota politik yang berisi desakan supaya diadakan reshuffle di dalam kabinet. NU menginginkan perubahan dalam kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, kepegawaian, dan keamanan. NU mendesak supaya menteri perekonomian, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri diganti dengan orang lain, NU juga menuntut supaya bidang keamanan yang dipegang oleh Wakil Perdana Menteri I, Wongsonegoro, dialihkan kepada Wakil Perdana Menteri

---

3) Ibid., hlm.160

II, Zainul Arifin.<sup>4)</sup>

Pada tanggal 17 November 1954, menteri-menteri dari PIR-Wongso mengundurkan diri dari kabinet, akibatnya pada tanggal 18 November 1954 diadakan reshuffle besar-besaran di mana menteri PIR tidak ada lagi kecuali Prof. Ir. Rooseno yang tidak mau mengikuti jejak Hazairin ataupun Wongsonegoro. Kabinet Ali-Wongso-Arifin menjadi kabinet Ali-Arifin dengan susunan kabinet sebagai berikut:<sup>5)</sup>

1. Perdana Menteri	: Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)
2. Wakil Perdana Menteri	: K.H. Zainul Arifin (NU)
3. Menteri Luar Negeri	: Mr. Sunario (PNI)
4. Menteri Dalam Negeri	: Mr. Sunaryo (NU)
5. Menteri Perekonomian	: Prof. Ir. Rooseno (PIR)
6. Menteri Keuangan	: Dr. Ong Eng Die (PNI)
7. Menteri Perlahanan	: Mr. Iwa Kusumasumantri (Progresif)
8. Menteri Kehakiman	: Mr. Djody Gondokusumo (PKN)
9. Menteri Penerangan	: Dr. F.L. Tobing (SKI)
10. Menteri Perhubungan	: Dr. A.K. Gani (PNI)
11. Menteri PU & Tenaga	: Muhammad Hasan (NU)
12. Menteri PP&K	: Mr. Moh. Yamin (Tanpa partai)

---

4) Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm. 327

5) Ibid.; Bibit Suprpto, op.cit., hlm. 161

13.Menteri Perburuhan	: SM. Abidin (Partai Buruh)
14.Menteri Pertanian	: Sujarwo (BTI)
15.Menteri Agama	: K.H. Masjkur (NU)
16.Menteri Kesehatan	: Dr.Muh.Ali/Lie Kiat Teng(PSII)
17.Menteri Sosial	: R.P.Suroso ( Parindra )
18.Menteri Neg.Urusan Kesej. Uum	: K.H.Sirajuddin Abbas (Perti)
19.Menteri Neg.Urusan Agraria	: Gde Rake (PRN)

Pada akhir November 1954. pemerintah menghadapi tantangan baru. Mr. Jusuf Wibisono dari Masjumi mengajukan mosi tidak percaya kepada seluruh kabinet. Mosi itu diajukan tepat sekali pada waktu kabinet baru saja bisa mengatasi krisis berat dengan mengadakan reshuffle besar-besaran. Menurut perhitungan oposisi tentunya kabinet masih dalam keadaan lemah, karena baru melewati masa krisis. Perhitungan oposisi ini meleset, karena ketika diadakan pemungutan suara pada tanggal 14 Desember 1954, mosi Masjumi ditolak dengan suara 115 lawan 92.<sup>6)</sup> Perpecahan dalam tubuh PIR dapat diatasi oleh pemerintah walaupun melalui masa krisis yang berat. Tapi kemenangan tersebut tidak dapat dirasakan dalam waktu yang lama karena menyusul dengan adanya masalah dalam tubuh AD yang membuat kabinet benar-

---

6) Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm.328

benar jatuh.

**B. Masalah Angkatan Darat**

Sejak bulan Juli 1953, kabinet Ali berhasil mempertahankan status quo dalam tubuh TNI. Seperti yang kita ketahui akibat peristiwa 17 Oktober 1952, TNI pecah menjadi 2 golongan yaitu golongan yang pro dan kontra peristiwa 17 Oktober 1952. Golongan yang pro peristiwa 17 Oktober 1952 dibebastugaskan oleh pemerintah, tanggal 4 November 1953, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menghapus pos Kepala Staf Angkatan Perang yang dipegang oleh Mayor Jenderal T.B.Simatupang. Tindakan ini merupakan pelaksanaan "Gentlement Agreement" yang dicapai antara Presiden Soekarno dan Wongsonegoro pada waktu penyusunan formasi kabinet Ali di bulan Juli 1953.<sup>7)</sup>

Peraturan pemerintah tersebut secara tidak langsung merupakan upaya untuk menyingkirkan T.B.Simatupang, yang merupakan orang terakhir yang selamat dari empat serangkai ( Sultan Yogyakarta, Ali Budiardjo, Simatupang, dan Nasution ), yang mempunyai kekuasaan di Kementrian Pertahanan sebelum 17 Okto-

---

<sup>7)</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* ( New york:Ithaca,1962),hlm.395, lihat juga Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966* ( Yogyakarta:UGM,1971),hlm.73; Ali Sastroamidjojo,*op.cit.*,hlm.329; Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* ( Jakarta:LP3ES,1986),hlm.137



ber 1952.<sup>8)</sup> Dalam bulan Desember 1953 Iwa Kusumasumantri ( Menteri Pertahanan ) mengambil kebijaksanaan, tanpa konsultasi dengan KSAD Kolonel Bambang Sugeng, mengangkat Kolonel Zulkifli Lubis, pimpinan golongan anti 17 Oktober, menjadi Wakil KSAD. Pada saat yang bersamaan ia mengangkat dua anggota lainnya dari golongan ini, Letkol Sapari dan Abimanju menjadi perwira tinggi dalam MBAD. Tindakan itu tidak hanya menghina kekuasaan Bambang Sugeng tapi juga prinsip-prinsip yang dituntut sebelumnya pada peristiwa 17 Oktober, tidak adanya campur tangan di luar tentara karena pengangkatan perwira anti 17 Oktober tidak akan mendorong pemulihan AD.

Sejak Iwa diangkat jadi menteri pertahanan, ia tidak mendapat kepercayaan dari pimpinan TNI. Ketidakpercayaan itu berubah menjadi kecurigaan dengan dikeluarkannya pernyataan tentang persetujuan atas usul Perbebpsi ( Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia ) untuk memberikan persenjataan kepada organisasi-organisasi laskar. Umum mengetahui bahwa Perbebpsi itu adalah organisasi yang dikuasai kaum komunis. Ketika Menteri Pertahanan mengajukan

---

8) Herbert Feith, op.cit., hlm.396

usul itu kepada sidang kabinet, segera mendapat tentangan dari semua menteri, sehingga usul Iwa ditolak dengan suara bulat.<sup>9)</sup>

Karena adanya tindakan yang terus dilakukan oleh pemerintah terutama menteri pertahanan, dengan kecenderungan memperlebar keretakan tubuh militer, maka atas inisiatif dan usaha beberapa perwira TNI baik yang pro maupun yang anti 17 Oktober, diadakanlah serangkaian pertemuan guna menciptakan kembali persatuan TNI yang retak sejak 17 Oktober 1952. Usaha ini mendapat dukungan dan dorongan besar dari Bambang Sugeng yang akhir-akhir itu otoritasnya banyak dilangkahi oleh Iwa Kusumasumantri dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut persoalan interen TNI.

Pada tanggal 17 - 25 Februari 1955 diadakan pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri sekitar 270 perwira dari ke dua belah pihak. Dalam pertemuan itu akan dibahas keutuhan dan persoalan AD, penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952, dan pembangunan AD. Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang diterima oleh seluruh perwira yang hadir, kemudian disahkan oleh KSAD Bambang Sugeng. Resolusi yang

---

<sup>9)</sup> Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 330.

dihasilkan terkenal dengan sebutan Piagam Yogyakarta atau Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia. Dalam piagam ditetapkan bahwa di dalam tubuh TNI-AD tidak dibenarkan campur tangan politik di dalam masalah militer, terutama dalam urusan pengangkatan pada suatu jabatan militer yang harus didasarkan pada senioritas dan kecakapan. Dalam hubungannya dengan pemerintah serta Presiden sebagai Panglima Tertinggi, dikatakan TNI-AD akan mematuhi segala keputusan yang diambil pemerintah bersama-sama dengan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Selain itu juga ditegaskan agar peristiwa 17 Oktober dianggap tidak pernah ada.<sup>10)</sup>

Sesudah pertemuan para perwira di Yogya, keadaan agak tentram sehingga pemerintah dengan tekun dapat memusatkan pikiran dan kegiatan pada persiapan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Seminggu sesudah KAA, pada tanggal 2 Mei 1955 KSAD Bambang Sugeng mengajukan kepada kabinet Ali untuk berhenti dari jabatannya sebagai KSAD, selama tiga bulan kurang mampu melaksanakan resolusi "Piagam Yogya". Pada tanggal 11 Mei kabinet menerima permintaan itu, dan Bambang Sugeng berhenti sebagai KSAD. Untuk

---

10) Jahja Muhaimin, *op.cit.*, hlm.74; A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm.275-276.; Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.397-398.

sementara wakil KSAD, Kolonel Zulkifli Lubis, memimpin Angkatan Darat.

Untuk menduduki jabatan KSAD, kabinet berketetapan akan mengangkat salah seorang perwira dari kelompok anti peristiwa 17 Oktober. Kabinet mengajukan calon-calonnya kepada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yaitu Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Sudirman (Komandan Teritorium Jawa Timur), Kolonel Bambang Utojo (Sumatera Selatan). Menjelang akhir Mei, pimpinan TNI menegaskan bahwa pengisian dan pengangkatan KSAD harus didasarkan pada senioritas dan kecakapan sejalan dengan kepentingan militer (Piagam Yogya).<sup>11)</sup> Pernyataan pimpinan TNI berarti bahwa Kolonel A.H.Nasution, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Gatot Subroto merupakan calon yang paling besar kemungkinannya diajukan.

Pada tanggal 10 Juni 1955, Menteri Pertahanan mengajukan Kolonel Bambang Utojo, dengan alasan disamping mempunyai pengalaman di dalam memimpin divisi TNI di Sumatera Selatan, Bambang juga tergolong perwira senior, tidak terdengar pula bahwa ia tergolong perwira yang pro atau anti 17 Oktober.

---

11) Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.398-399 ; Jahja Muhaimin, *op.cit.*, hlm.75; A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm.280; "Tjalon KSAD yang Baru Sudah Disetujui Dwi Tunggal", *Merdeka*, 18 Mei 1955, hlm.1, klm.2-3.

Pengangkatan itu mendapat tentangan hebat dari pihak Kolonel Lubis, yang berhasil mendapat dukungan kuat dari kalangan TNI. Alasan yang paling ditonjolkan adalah Bambang Utojo mempunyai cacat (tangannya kanannya hilang karena dipotong akibat kena granat). Pada tanggal 25 Juni Kolonel Lubis memberi tahu Presiden bahwa ia akan memboikot pengangkatan Bambang Utojo sekiranya keputusan kabinet tetap akan dilakukan.

Pada tanggal 27 Juni tatkala pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Bambang Utojo dengan suatu upacara pelantikan sebagai KSAD dengan pangkat Mayor Jenderal, para perwira tidak menghadiri upacara itu kecuali 5 atau 6 pegawai. Upacara pelantikan itu diboikot oleh Kolonel Lubis dan perwira-perwira pendukungnya, sampai-sampai pasukan musik tentarapun tidak hadir, sehingga terpaksa didatangkan korp musik dari Jawatan Pemadam Kebakaran dari Kotapraja Jakarta Raya.<sup>12)</sup> Pada saat yang sama Kolonel Lubis menyatakan kepada pemerintah bahwa ia menolak untuk menyerahkan kekuasaannya sebagai pimpinan AD kepada Mayor Jenderal Bambang Utojo.<sup>13)</sup> Pemerintah tidak

---

12) Herbert Feith, *Ibid.*

13) "Angkatan Darat Menolak Pengangkatan KSAD Bambang Utojo", dalam *Merdeka*, 28 Juni 1955, hlm.1, klm.1-2.

punya jalan lain kecuali menskors Kolonel Lubis dari jabatannya. Akibat pemboikotan itu, pada tanggal 29 Juni 1955 ketua Seksi Pertahanan di DPRS, Zainul Baharuddin melontarkan mosi tidak percaya kepada menteri pertahanan.

Pada tanggal 29 Juni - 2 Juli diadakan rapat di markas besar dengan keputusan keharusan adanya garis pemisah yang tegas antara pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban teknis, adanya ketentuan dari pemerintah sebagai pedoman bagi AD untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka pembelaan negara, pengawasan/pembelian material/finansial secara jujur untuk memelihara dan membangun organisasi AD.<sup>14)</sup> Pada tanggal 3 Juni Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI) yang diketuai oleh Kolonel Rudi Pirngadi mengeluarkan statemen yang berisi permintaan agar pengangkatan Bambang Utojo dibatalkan dan kemudian diganti dengan seorang perwira yang diangkat berdasarkan senioritas dan kapabilitas.

Dukungan terhadap Bambang Utojo hanya didapat dari Kolonel Ibnu Sutowo yang mengganti Bambang di Sumatera Selatan, namun para perwira di daerah itu tidak mendukung pendirian Ibnu Sutowo. Pada tanggal

---

14) A.H.Nasution.op.cit.,.hlm.281-282.

12 Juli Parindra menyerukan supaya menterinya ( R.P. Suroso) ditarik keluar dari kabinet, sedangkan PSII tanggal 13 Juli menuntut supaya kabinet dibubarkan saja. Dengan tekanan yang begitu berat pemerintah meminta supaya Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dan ia menyetujuinya. Pada tanggal 13 Juli 1955 ia meletakkan jabatannya sebagai menteri pertahanan.

Dengan pengunduran diri tersebut, kabinet mempunyai harapan bahwa perselisihan antara Kolonel Lubis dan kawan-kawan dengan pemerintah akan dapat diselesaikan. Pemerintah menyampaikan usul kepada pihak Kolonel Lubis untuk mengakui pengangkatan Bambang Utojo sebagai KSAD dan sebagai imbalannya pemerintah akan memberhentikan Bambang Utojo dengan memberikan pensiun. Dengan kompromi itu Kolonel Lubis dan kawan-kawan akan mencapai tujuannya yaitu meniadakan pengangkatan Kolonel Bambang Utojo sebagai pimpinan AD dan pemerintah mencapai tujuannya yaitu memulihkan kehilangan muka. Tapi usul pemerintah ini ditolak mentah-mentah oleh Kolonel Lubis.

Pada tanggal 18 Juli Presiden menunaikan ibadah haji, meninggalkan negara dalam keadaan krisis politik setelah ia gagal menyelamatkan kabinet. Pada tanggal 20 Juli 1955 Partai NU mendesak supaya kabinet dibubarkan. Kedudukan kabinet sudah begitu

parah sehingga tidak ada artinya lagi untuk dipertahankan. Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden.<sup>15)</sup> Dengan demikian berakhirilah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo setelah menjalankan pemerintahan sekitar 2 tahun. Pada bab berikutnya akan dibuat kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

---

15) Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm.335; Herbert Feith, *op.cit.* hlm.402; A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm.284; Jahja Muhaimin, *op.cit.*, hlm.77; "Hatta Tadi Malam Terima Penyerahan Mandat Kabinet Ali", dalam *Merdeka*, 25 Juli 1955, hlm.1, klm.1-2.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan kabinet Ali I dapat dikatakan tidak selancar pembentukan kabinet sebelumnya. Kabinet Ali I baru dapat dibentuk setelah melewati masa krisis selama 58 hari dan pergantian formatur sebanyak lima kali. Penunjukan pertama ditujukan kepada Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Mr. Mohammad Roem (Masjumi), setelah gagal digantikan oleh Mukarto Notowidigdo (PNI) yang ditunjuk sampai dua kali, kemudiar Burhanuddin Harahap (Masjumi), dan terakhir Wongsonegoro (PIR) yang berhasil membentuk kabinet yang berkoalisi dengan PNI, NU, dan Partai Nasional kecil lainnya. Kabinet baru tersebut memulai tugasnya pada tanggal 1 Agustus 1953.
2. Pelaksanaan program kerja Kabinet Ali I ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil/hasilnya kurang memuaskan. Misalnya dalam bidang keamanan dihadapkan dengan pemberontakan PUSA di Aceh pimpinan Daud Beureueh, demikian juga dengan program pemilu dan perekonomian juga mendapat tentangan dari pihak oposisi. Sukses terbesar adalah pelaksanaan politik luar negeri dengan diselenggarakannya KAA di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri oleh 29

negara dan menghasilkan Dasa Sila Bandung. Untuk masalah Irian Barat dan Kebijakan Pemerintah mengenai masalah penambangan minyak di Sumatera Utara dan pembagian tanah di Sumatera Timur hasilnya kurang memuaskan.

3. Kegoncangan dalam Kabinet Ali I mulai dirasakan sejak serangan oposisi terhadap kebijaksanaan menteri perekonomian dengan program Indonesianisasinya. Tapi masalah yang benar-benar menyebabkan kabinet jatuh adalah masalah Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat tidak dapat menerima KSAD yang baru pilihan pemerintah, maka mereka mengadakan pemboikotan terhadap pengangkatan KSAD baru tersebut. Pemboikotan itu diikuti oleh oposisi dari partai lainnya, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan kabinet dan terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 24 Juli 1955.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sastroamidjojo  
1974 *Tonggak - Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT Kinta.
- Anderson, Ben  
1988 *Revolusi Pemuda*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Ariwiadi  
1971 *Ichtisar Sejarah Nasional Indonesia ( Awal - Sekarang )*. Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Berkhofer, Robert F.  
1969 *A Behavioral Approach To Historical Analysis*. New York : The Free Press
- Bibit Suprpto  
1981 *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Daniel Dhakidae , " Partai Politik dan Sistem Kepartaian".  
*Prisma* , 12 Desember 1981.
- Departemen Penerangan  
1970 *Susunan dan Program Kabinet RI Selama 25 Tahun 1945 - 1970*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Feith, Herbert  
1962 *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York : Ithaca.
- Feith, Herbert & Lance Castles ( ED )  
1988 *Pemikiran Politik Indonesia 1945 - 1965*. Jakarta: LP3ES.
- Finch, Susan and Daniel S. Lev  
1965 *Republic of Indonesia Cabinets 1945 - 1965* .  
New York : Ithaca.
- Gottschalk, Louis  
1975 *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hadari Nawawi  
1985 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gama University Press.
- Hasan Saleh  
1980 *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta : Grafiti.
- I Gusti Ngurah Agung  
1992 *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis*. Jakarta : PT Gramedia.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jahja Muhaimin,dkk.  
1985 *Kamus Istilah Politik*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahin, George McTurnan  
1956 *The Asian - African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955* . New York: Ithaca.
- Kementrian Penerangan RI  
1954 *Keterangan Pemerintah Atas Program Kabinet Ali Sastroamidjojo di DPR Jakarta*. Jakarta : Kementrian Penerangan.
- Kementrian Luar Negeri RI  
*The Question of West in The United Nations 1954-1957*. Jakarta : Kementrian Luar Negeri.
- Leifer, Michael  
1989 *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto  
1984 *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo  
1993 *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Moedjanto,G  
1993 *Indonesia Abad Ke-20 jilid 2*. Yogyakarta : Kanisius
- Mohammad Hatta  
1979 *Mohammad Hatta Memoir* . Jakarta : PT Tintamas.
- Moh. Mahfud MD  
1993 *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nasution, A.H  
1983 *Memenuhi Panggilan Tugas jilid 3*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Nazaruddin Sjamsuddin  
1989 *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- 1990 *Pemberontakan Kaum Republik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Notosoetardjo  
1956 *Dokumen-Dokumen Konperensi Medja Bundar*. Jakarta : Endang.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ramlan Surbakti  
1992 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Ricklefs, M.C  
1993 *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Roeslan Abdulgani  
1975 *Sejarah, Cita-Cita, dan Pengaruh KAA Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- 1980 *The Bandung Connection Konperensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*. Jakarta : Gunung Agung.
- Rusadi Kantaprawira  
1983 *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung : Sinar Baru.
- Smelser, Neil J.  
1962 *Theory of Collective Behavior*. New York : The Free Press.
- Subadhi ( ED )  
1995 *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi Koperasi dan Kebudayaan*. Yogyakarta : Yayasan Widya Patria.
- Sundhaussen, Ulf  
1986 *Politik Militer Indonesia 1945 - 1967*. Jakarta : LP3ES
- Supomo, " Tiap-Tiap Kabinet Bertanggung Jawab Pada Parlemen", *Kedaulatan Rakyat*, 9 Juni 1953
- Suseno, F.M.  
1987 *Etika Politik* . Jakarta : PT Gramedia
- Syamsuddin Haris  
1995 *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta : LP3ES.
- Yahya A. Muhaimin  
1982 *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945 - 1966* . Yogyakarta: Gama Press.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat , 4 Juni 1953

Kedaulatan Rakyat , 9 Juni 1953

Kedaulatan Rakyat , 15 Juni 1953

Kedaulatan Rakyat , 9 Juli 1953

Kedaulatan Rakyat , 21 Juli 1953

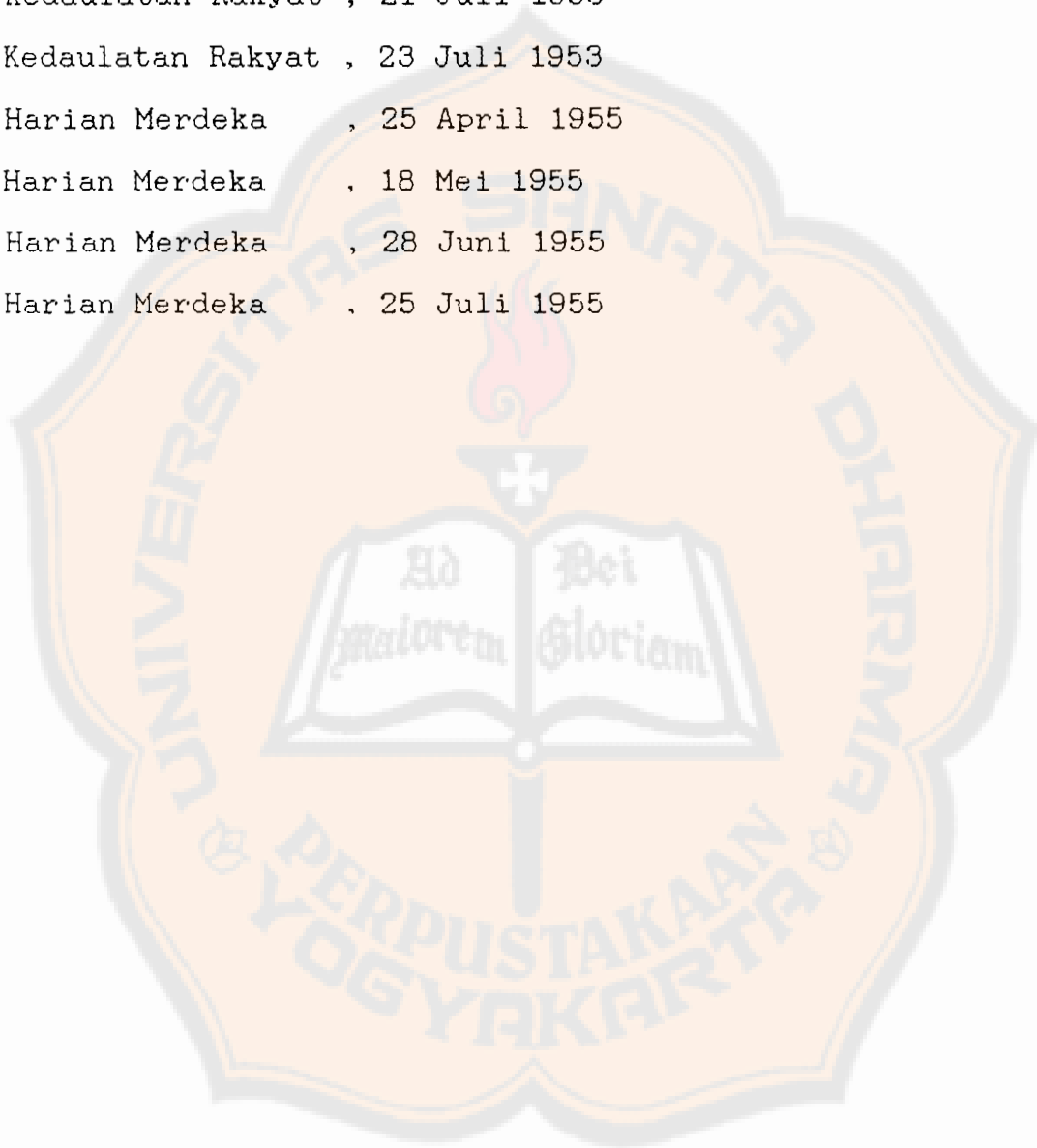
Kedaulatan Rakyat , 23 Juli 1953

Harian Merdeka , 25 April 1955

Harian Merdeka , 18 Mei 1955

Harian Merdeka , 28 Juni 1955

Harian Merdeka , 25 Juli 1955





**Reaksi thd dituhnja kabinet Wilopo :**

**Formateurs baiknja diusulkan Parlemen**

**ZAKEN KABINET LEBIH UTAMA**

**D**JATUHNJA Kabinet Wilopo yang terjadi. Sekali-kali ini jang lalu oleh kalangan politis di Jogjakarta dan sekitarnya dengan dingin. Pada umumnya mereka menyetujui pemerintahan tersebut tidak mengherankan, karena sebelumnya politis di Jogjakarta kedudukan Kabinet Wilopo sudah sedjak berkali-kali. Di kalangan politis terkenal itu:

Situasi masih terkatung-katung. Orang akan menduga semula, bahwa Kabinet jang akan dibentuk nanti seharusnya dipegang oleh Masjumi karena dituhnja Kabinet Wilopo itu akibat maksud penarikan kembali Menteri Masjumi. Tetapi beberapa waktu setelah stjnjata bahwa P.M. Wilopo menstulul menjerahkan mandatnya kembali, sebelum Masjumi bisa ambil tindakan. Suatu waktu kemudian menjadi twer dan sukar untuk mendapatkan kesatuan kepastian dan tetap merupakan suatu teka-teki.

**Formateurs baiknja diusulkan Parlemen**

Berhubung kita sekarang ini menghadapi pemilihan umum dan pula masih banyak masalah2 jang harus diselesaikan, maka kalangan itu berpendapat, bahwa untuk mengatasi kesukaran2 itu, kita harus membentuk Kabinet jang sungguh2 mendapat backing dari Parlemen. Salah satu djalan untuk menjapai atau paling sedikit mendekati, maka menurut kalangan itu sebaiknya formateurs ditundjuk oleh Presiden atau anggota Parlemen. Dengan demikian maka Kabinet baru nanti dalam usahanya menyelesaikan masalah2 jang dihadapi bisa dapat sokongan penuh dari Parlemen.

**Zaken kabinet**

Sementara itu beberapa kalangan menjatakan bahwa pada waktu ini sebaiknya dibentuk sebuah zakenkabinet jang tidak berapa terikat kepada Partai. Kabinet semacam ini

dimaksudkan untuk menajaskan soal2 sulit jang tidak dapat sebagai wakil2 orang-orang Kabinet Wilopo ini. Inisiatif ini pada Oktober, jang sampai kini terkatung-katung antara lain karena:

Dalam hubungan ini, kalangan supra-zakenkabinet dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Mohamad Hatta. Untuk ini, akan sulit jang dihadapi karena sebagai wakil2 supra-zakenkabinet jang dihadapi negara, maka tidaklah usah terlalu dibicarakan kepada pimpinan2 partai.





dak menjokongnja, kabinet tsb. tidak dapat stabil pula.

Perlu kabinet kuat, mempunyai gezag dan didukung oleh partai.

Ditanya, kabinet yang bagaimanakah yang menurut pendapatnya paling baik, Prof. Setiono menyatakan, bahwa dalam keadaan yang serba suhi, baik internasional maupun didalam negeri seperti sekarang ini, dalam waktu kita menghadapi pembangunan negara dan masyarakat kita disegala lapangan, Indonesia sungguh membutuhkan suatu kabinet yang kuat dan mempunyai gezag, ini dapat dijamin, apabila partai yang akan mendukung pemerintahan yang baru itu nanti dapat menajagai dahulu perseludjian bangsa, suatu program yang konkret, yaitu yang bukan hanya berisi pokok-pokok tetapi juga mengenai ijazat pelaksanaan pokok-pokok tersebut. Yang akan duduk didalam kabinet itu perlu orang yang berhadapan masyarakat. Mempunyai gezag dan dapat pula didukung oleh partai.

Dengan demikian maka pembagian jabatan menteri tidaklah harus dititik beratkan kepada sesuatu partai, melainkan kepada "the right man in the right place" dengan mempertimbangan & gezag yang terdapat masyarakat dan dukungan partai kepadanya, sebab yang akan melaksanakan adalah pokok-pokok dalam program bersama-sama dan dirajutnya yang tetap dan utuh. Jadi partai yang akan akan berikhtir perseludjian bangsa itu adalah partai yang akan harusnya yang menajagai sendiri hal-hal dalam perseludjian.

Demikian menurut Prof. Setiono. — A.M.

# Presiden dan Ali Sastroamidjojo bitjarakan soal krisis kabinet

## ALI BISA DITERIMA OLEH PSI DAN MASJUMI

**D**UTA BESAR Indonesia di Amerika Serikat Mr. Ali Sastroamidjojo tg. 13-6 pukul 17.00 diterima oleh Presiden di Istana Merdeka kira-kira 1½ jam setelah ia tiba di Djakarta dengan pesawat terbang. Pembbitjaraan Mr. Ali Sastroamidjojo dengan Presiden berlangsung 1 — ¼ jam lamanya.

Atas pertanyaan pers, Mr. Ali Sastroamidjojo menerangkan, bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden itu telah dibbitjarkan pula soal krisis Kabinet dewasa ini. Atas pertanyaan, apakah Presiden telah memintanya untuk menjadi formateur, didjawab oleh Mr. Ali, bahwa soalnya belum sempat dititit.

Mr. Ali Sastroamidjojo tidak bersedia menjawab pertanyaan lain yang dimajukan kepadanya. Saja menjelas belum dapat memberi keterangan apa2 tentang pertemuannya dengan Presiden. Saja sudah lama di luar negeri dan perhemenindjau dulu keadaan di tanah air" kata Mr. Ali.

Ditambahkannya, bahwa ia telah memberi laporan kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat dan selain itu ia telah mengundjungi Presiden sebagai seorang sahabatnya yang lama.

Sebelum itu dilapangan terbang Kemajoran atas pertanyaan pers Mr. Ali Sastroamidjojo menerangkan, bahwa ia datang ke Indonesia atas panggilan Menteri Luar Negeri untuk mengadakan pembbitjaraan umum dan kedatangannya tidak ada hubungannya dengan krisis kabinet sekarang.

**Ali Sastroamidjojo formateur?**

Malam ini Mr. Ali Sastroamidjojo memberi laporan kepada rapat Dewan Partai PNI tentang pembbitjaraannya dengan Presiden tadi.

Berhubung dengan kedatangannya Mr. Ali Sastroamidjojo setara tiba2 dari Amerika Serikat pada waktu Indonesia mengalami krisis kabinet, tersiar kabar2 tentang kemungkinan ia menjadi formateur, atau kalau tidak menjadi formateur ia akan diminta duduk sebagai Perdana Menteri dalam kabinet baru nanti.

Diantara lain harian Indonesia Raya telah mengemukakan tentang kemungkinan Mr. Ali Sastroamidjojo ditundjuk menjadi formateur.

Menurut kabar2 dari pentanjoran Mr. Ali Sastroamidjojo menjadi formateur oleh Perdana Menteri akan mendapat sambutan yang baik dikalangan PNI dan Masjumi.

Seperti telah dikemukakan tadi, PNI untuk formateur ialah Sukarto, Mr. Hasan Hadjiardjo dan Mangunsumarto.

Tentang kemungkinan Mr. Ali Sastroamidjojo akan diminta menjadi formateur Perdana

menteri dalam kabinet baru akan ditetapkannya oleh Presiden dan Dewan PNI.

Amerika Serikat dan kemungkinan bahwa hal itu akan membawa pengaruh politik baginya dan juga pendiriannya terhadap perdjandjian San Francisco, telah mendapat perhatian pula dikalangan Dewan Pimpinan PNI.

Seperti diketahui, Mr. Ali Sastroamidjojo termasuk orang yang menjetudjul perdjandjian San Francisco sedang PNI menolaknya.

Diantara yang menjambut kedatangan Mr. Ali Sastroamidjojo tampak Duta Besar Canada untuk Indonesia, Heasman dan Kuasa Usaha Amerika Hobental.

PNI tetap menjalankan Mukarto, Iskak dan Mangunsarkoro.

Suatu panitia yang dibentuk oleh PNI guna meninjau lebih lanjut kemungkinan pembentukan kabinet dan menentukan garis-garis pokok program kabinet telah beradang. Hasil peninjauan dan pokok-pokok program itu telah diajukan kepada Dewan Pimpinan Partai guna dimintakan persetujuan. Pokok-pokok program itu akan menjadi bekal bagi formateur, itupun djika PNI diserahi mandat oleh Presiden untuk membentuk kabinet.

Dalam sidang Dewan Partai dihadiri juga Mr. Ali Sastroamijoyo anggota PNI yang mendjabat duta besar Indonesia di Washington dan Canada.

Sidik Djosukarto, sebelum menghadiri rapat panitia tsb, atas pertanyaan pers menerangkan bahwa peninjauan panitia mengenai pembentukan kabinet itu yang terutama ialah mengenai kemungkinan apabila Presiden menunjuk 1 orang saja sebagai formateur, ataupun apabila Presiden menunjuk 2 orang formateur yakni satu dari PNI dan satu dari partai lain, misalnya Masjumi.

Diceritakan pula oleh Sidik bahwa pokok-pokok program yang disusun oleh panitia harus tidak menimpang daripada statement PNI sehari sesudah dijatuhkannya kabinet Wilopo yang sebagaimana telah kita kabarkan memiliki beratnya pada pembelaan dan pendjagaan kepentingan nasional dan keselamatan negara dengan menitikkan perhatian sebagai kesulitan yang dihadapi PNI selama kabinet Wilopo menjabat suatu hal yang berkaitan dengan politik luar negeri.

djandjian Frisco, b. pembukaan kedutaan Indonesia di Moscow, 3. peninjauan tanah di Sumatera Timur dan 4. usaha kejuruan dalam negeri.

P.N.I. menanti Mr. Rum?

Mengenai kemungkinan Masjumi menundjuk Mr. Rum sebagai formateur, Sidik berpendapat bahwa djika pembentukan kabinet dilakukan oleh PNI dan Masjumi, maka terlepas dari pendirian PNI yang sanggup bekerjasama dengan Masjumi, djuga dan ulian apakah Masjumi penundjukan terhadap Mr. Rum menurut Sidik ini didasarkan pada kebiasaan, kebiasaan kabinet Wilopo djatuh karena pelaksanaan Menteri Dalam Negeri (Rum) mendapat tanggapan hebat dari pihak Parlemen.

Atas pertanyaan, apakah ada kemungkinan bahwa dengan datangnya Mr. Ali Sastroamijoyo lalu timbul perkembangan baru disekitar penundjukan formateur, Sidik menjawab, bahwa djika formateur PNI ialah Mukarto, Iskak dan Mangunsarkoro, dan djika terwujud perkembangan lain, maka itu tentulah harus terjadi melalui partai.

# LEMARI ES TETAP SULIT

## Goodwill ada antara P.N.I. & Masjumi?

PAGI kemarin, formateur menerima memorandum tentang sikap Masjumi dalam menghadapi pembentukan kabinet dan telah dikemukakan Mukarto dalam sidang Dewan Pimpinan PNI yang bersidang siang itu. Menurut keterangan formateur sore kemarin ia mengadakan pembicaraan untuk kedua kalinya dengan wakil2 Masjumi Mr. Jusuf Wibisono dan Mr. Roem.

Mukarto tidak sedia memberi pendjelasan bagaimana pendapatnya mengenai sikap Masjumi itu. Ia hanya menerangkan bahwa sekarang tampaknya ada goodwill dari kedua pihak yakni PNI dan Masjumi dalam menghadapi perkembangan2 usahanya untuk membentuk kabinet. Goodwill ini diharapkannya pula dari partai2 lain.

Tentang sidang dewan pimpinan Masjumi kemarin dulu sidang mendengarkan laporan Mr. Jusuf Wibisono dan Mr. Rum mengenai pembicaraan2 mereka dengan formateur Mukarto lebih jauh menurut keterangan yang didapat dari Mr. Moh. Rum sidang tersebut berhasil menjusun suatu memorandum yang akan dikirim kepada formateur Mukarto.

Menurut Rum memorandum tersebut berisikan sikap Masjumi terhadap pembentukan kabinet yang kini sedang diusahakan Mukarto antara lain mengenai program dan komposisi kabinet. Kemarin pagi memorandum tsb. disampaikan kepada formateur sedang pertemuan kedua antara formateur dengan wakil2 dari Masjumi itu baru dilangsungkan kemarin petang.

Sementara itu menurut kalangan pimpinan Masjumi bagi Masjumi yang terpenting bukan mengenai bentuk kabinet akan tetapi yang terpenting bagaimana menyelesaikan soal2 yang kini masih teranting2 umpamanya tentang perampasan2 aset pembukaan kedutaan di Moscow tambang minyak Sumatera dan soal pembagian tanah di Sumatera Utara.

Menurut pendapat Masjumi diantara soal2 tersebut ada yg bisa ditanggguhkan tapi ada pula yang harus dijarikan penyelesaian sekarang juga sebab kalau tidak maka soal2 itu akan tetap mengganggu kelangsungan hidup kabinet yang akan dibentuk.



# BURHANUDDIN HARAHAP FORMATEUR

## Tidak dikatakan koalisi atau zaken-kabinet

EMARIN, DJAM 17-25 PRESIDEN SUKARNO TELAH MEMUNDJUK MR. BURHANUDDIN HARAHAP DARI MASJUMI SEBAGAI FORMATEUR KABINET BARU. SESUDAH DIADAKAN PERUNDINGAN ANTARA KEDUA NYA JANG DIMULAI DJAM 5 SOREDI ISTANA MERDEKA MR. BURHANUDDIN DIMINTA DATANG DI ISTANA. SETELAH SIANGNYA DR. SUKIMAN & MOHAMAD NATSIR MENJAMPAIKAN PUTUSAN SIDANG DP MASJUMI KEPADA PRESIDEN SUKARNO

**Tanpa bentuk**  
Kepada pers Sukarno menjatakan: „Saja telah meminta kepada saudara Burhanuddin Harahap utk membentuk kabinet dengan dukungan jang tjukup dari Parlemen”.

Waktu hendak meninggalkan Istana Merdeka, Sukarno mendjabat tangan Mr. Burhanuddin Harahap dengan kata „Bismillah”.

Kepada jang diberikan tempo satu minggu sampai hari Rebo jang akan datang djam 17.00

Presiden Sukarno tidak menjebutkan bentuk kabinet jang akan dibentuk ini. Sama sekali tidak dikatakan, apakah koalisi atau zakenkabinet. Hanya jang mendapat dukungan tjukup dari parlemen”.

Formateur Burhanuddin Harahap mengatakan kepada para wartawan bahwa pekerdjaan jg lalu dilakukan oleh bekas formateur merupakan bahan jang penting baginja.

### Riwayat singkat

Mr. Burhanuddin Harahap adalah ketua fraksi Masjumi dalam Parlemen. Sedjak permulaan duduk dalam Badan Pekerdja KNIP dulu di Purworedjo dan Jogja.

Sebelum perang sudah kandi dat juris. Tanggal 1 Djuni 1951 lulus dari Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.

### Partai2 ketjil bentuk konsentrasi nasional

Atas inisiatip PIR telah diusahakan adanya kerdjasama antara partai2 ketjil, yakni: PIR, Parkindo, SKI, Partai Buruh dan fraksi progressif dalam Parlemen. Dasar2 daripada kerdjasama adalah usaha tertjapainya perdamaian nasional.

Pengambil inisiatip Sutardjo Hadikusumo (PIR) mengenai usaha tsb menerangkan bahwa usaha mengadakan kerdjasama diantara partai2 ketjil sudah agak sedjak lama djadkan dan menurut Sutardjo lepas dari soal pembentukan kabinet sekarang. Jang mendjadi pokok menurut Sutardjo, bagaimana menjari djalan untuk menjapai perdamaian nasional.

Dalam pada itu dari Prof. Abidin (Partai Buruh) didapat keterangan bahwa sampai kini masih sedang ditjari dasar-dasar guna mendjadi pedoman utk melaksanakan kerdja sama antara partai2 itu dan soalnya menurut Abidin ialah bagaimana mengatasi perbedaan pendirian politis diantara partai2 ketjil itu terhadap masalah jang kini masih tergantung dan mendjadi pertentangan antara partai2 besar. Menurut Abidin usaha kearah kerdja sama terus akan didjalankan selagi sedapat mungkin kelak terdjapai suatu „konsentrasi nasional”. — Ant.

# Mr. Wongsonegoro formateur

**H**ANJA 15 MENIT KEMARIN SORE, PRESIDEN SUKARNO MENGADAKAN PEMBITJARAAN DENGAN MR. WONGSONEGORO DI ISTANA MERDEKA. DAN DJAM 7 PETANG IA DITUNDIJK MENDJADI FORMATEUR KABINET BARU DENGAN BATAS WAKTU 1 MINGGU. SUKARNO MINTA SUPAJA DIBENTUK SUATU KABINET JANG MENDAPAT DUKUNGAN TJUKUP DARI PARLEMEN.

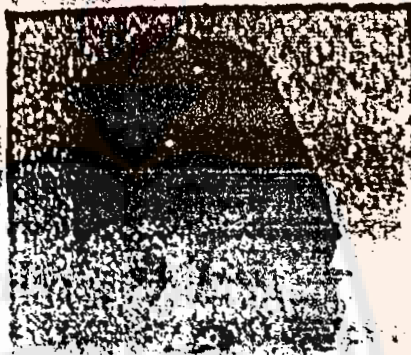
Mr. Wongsonegoro Ketua Umum PIR menjatakan kepada pers: „Saja dengan hadi beruabar2 menerima tugas ini. Daritidak lain saja akan berusaha sekeras tenaga untuk menjelesaikannja”.

Mr. Wongsonegoro mengatakan, bahwa dalam melakukartugas nasional ia hendak mengadakan pembitjaraan & perundingan dengan semua partai & golongan jang punya wakil dalam parlemen untuk mentjapa perdamaian national.

Kemarin malam ia terus malai mengadakan pembitjaraan dengan Dewan Partainya.

Ia sama sekali tidak menerangkan, apakah ia mengampoper rentjana program jang dibuat oleh Mukarto dan dibawakan serta dirobah samadengan Burhanuddin Harahap.

Demikian wartawan K.R. Djakarta.



MR. WONGSONEGORO, formateur baru harapan

## Reaksi pertama.

Pada umumnja penundjukan Mr. Wongsonegoro disambut dengan agak lega di Ibu Kota. Kalangan politik berpendapat, bahwa ia berhasil djika PIR tidak menuntut kursi perdana menteri.

Sidik Djojokusarto menjatakan, bahwa ia setuju dengan penundjukan itu dan mengharapakan Mr. Wongsonegoro berhasil melakukan tugasnja. Sidik berharap dibentuk suatu kabinet jang progressief.

Mr. Tambunan dari Parkindo mengharapakan Mr. Wongsonegoro mentjapa hasil dalam membentuk kabinet baru, hingga keadaan demisioner ini bisa lekas berakhir.

## Riwayat pendek.

Mr. Wongsonegoro dilahirkan di Solo kira2 50 tahun jang lalu. Sedjak dulu mendjadi pegawai pamong prodjo sampai bupati Sragen. Djaman Djepang djadi Fuku Sjuutjo di Semarang. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia mendjadi gubernur Djawa Tengah, kemudian menteri Dalam Negeri sesudah pemerintah Republik kembali ke Jogja. Dalam djaman RIS ia djadi Sekdjen Kementerian Dalam Negeri, dalam kabinet Natsir Mr. Wongsonegoro menduduki kursi menteri kehakiman dan dalam kabinet Sukiman djadi menteri PPK.

# P. MIDISERAHKAN P.N.I.?

**S**EBAGAI HASIL RAPAT PARTAI2 KETJIL JANG TERGABUNG DI DALAM KERDJA SAMA POLITIK MALAM REBO JANG DALU DIPUTUSKAN PROGRAM KABINET JANG AKAN DIBENTUK OLEH FORMATEUR PROGRAM ITU TERDIRI ATAS 8 PASAL JAKNI MENGENAI KEAMANAN, KEMAKMURAN, KEUANGAN, PERUNDANGAN, ORGANISASI NEGARA, PERBURUHAN, POLITIK LUAR NEGERI, IRIAN BARAT DAN KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAHAN.

Diputuskan djuga procedure tjara formateur bekerdja, jakni mula2 mengadakan pertemuan dengan wakil2 semua fraksi di parlemen guna memberikan penjelasan mengenai program tsb., kemudian kepada wakil2 fraksi diberikan kesempatan melaporkan kepada dewan pimpinan masing2 dengan eventueel memajukan usul2 amandemennja.

Pertemuan antara formateur dengan wakil2 fraksi diadakan mulai hari ini. -- Ant

## 8. pokok program.

Mengenai 8 pokok program tersebut wartawan "K.I." kawatikan dari Djakarta sbb.

1. **KEAMANAN:** membasmi D.I. serta gerombolan2 apa sadja jang sifatnja hendak membentuk negara dalam negara. Tindakan2 akan lebih tegas daripada jang telah diambil oleh Pemerintah hingga sekarang.

2. **KEMAKMURAN DAN KEUANGAN:** melakukan politik kemakmuran dan keuangan jang diarahkan kepada membela kepentingan rakyat; mentjegah kenaikan harga barang2 kebutuhan pokok sehari-hari; mengusahakan meerproduksi dar industri-

3. **PEMILIHAN UMUM:** tindakan2 akan diambil agar pemilihan umum dapat dilaksanakan setjepat-tjepatnja.

4. **ORGANISASI AENEGARAAN:** akan dilakukan usaha2 agar mesin pemerintahan dapat berjalan lebih efficient, antara lain dengan mengadakan herschikking didalam alat2 negara; memberantas korupsi, dalam mana telah termasuk pengertian memperbaiki organisasi alat2 negara seperti tentera dan polisi. Djuga akan diambil tindakan2 agar lekas dapat tertjapai penjelesaian soal peristiwa 17 Oktober. Lebih djauh akan memperbaiki perundang-undangan pada umumnya, chususnya perundang-undangan otonomi serta perundang-undangan perundang-undangan pertambangan.

5. **PERBURUHAN:** Akan mengadakan sjarat2 kegemblaraan bekerdja bagi kaum buruh. Mengenai itu akan diadakan perundang-undangan dan system baru, sedang P4 Pusat akan dihapuskan.

6. **POLITIK LUAR NEGERI:** Pemerintah akan tetap menjalankan politik luar negerijang bebas dan aktif. Akan diusahakan penggantian K.M.B. dengan perdjandjian internasional biasa. Persetujuan internasional seperti TCA dan COLOMBO-PLAN tetap berlaku. Politik bebas dan aktif didalamnja termasuk perhubungan diplomatik dengan SEMUA negara.

7. **IRIAN BARAT:** Mengusahakan, agar Irian Barat

lekas masuk kedalam wilayah R.I.

8. **KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH:** Pemerintah tidak kenal apa jang dinamakan vrieskamerartikeien. Parlemen adalah kekuasaan jang tertinggi. Semua putusannya harus dijalankan. Apabila didalam kabine ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu soal, kabine tidak boleh segera mengadakan pemungutan suara, tetapi terlebih dulu parlemen harus mengambil keputusan. Keputusan ini maka harus dijalankan.



P.N.I. akan pegang jabatan P.M. Selanjutnya mengenai persoalan jabatan P.M. wartawan K.R. menginterlokalkan dari Djakarta, bahwa ada kemungkinan besar P.N.I. yang akan diserahkan. P.N.I. sendiri memang tidak memandangi sja rat mutlak, tetapi kabarnya Masjumi tidak suka apabila PIR yang pegang jabatan itu. Masjumi lebih suka jabatan P.N. dipegang oleh Masjumi atau PNL.

Dalam pada itu, oleh karena nampaknya Masjumi tidak menundukkan gelagat akan dapat menjeludul program, maka ada kemungkinan partai itu tidak ikut serta dsu jabatan P.M. akan diserahkan kepada PNL.

Lebih lanjut formateur menyatakan bahwa party2 yang tidak menjeludul program itu tidak akan diadjak ikut serta dalam kabinet. Hari Djumaat yang akan datang ini Party2 harus sudah memberikan jawabannja.

Demikian wartawan „K.R.“ dari Djakarta.

Keterangan prof. Abidin tentang program.

Mengenai program itu, ketua umum Partai Buruh prof Abidin yang menjadi anggota KSP, menerangkan bahwa dalam soal keamanan supaya diadakan tindakan yang tegas terhadap gangguan2; mengenai kemakmuran keuangan akan dijalankan politik yang menguntungkan rakyat jelata; mengenai soal perundangan2 akan dilakukan penggantian undang2 kolonial setepat mungkin dengan undang2 nasional; mengenai organisasi negara dikatakan akan menitikberatkan terutama kepada pemberian otonomi kepada daerah2; mengenai perburuhan diterangkan akan diusahakan sjarat2 yang menjamin kegemilangan kerja bagi buruh; mengenai politik luar negeri, ditegaskan terutama akan mengubah perdjandjian2 KMB dengan perdjandjian2 Internasional biasa dan hal2 lain dari KMB ja merugikan rakyat Indonesia seljepatnya akan dihapuskan; mengenai Irian Barat, diterangkan selajaks mungkin diusahakan supaya masuk wilayah Indonesia; mengenai kebijaksanaan pemerintahan yang diartikan bahwa segala keputusan parlemen harus dilaksanakan pemerintah.

Djika sesuatu tindakan pemerintah mengakibatkan pertentangan dalam kabinet, misalnja mengenai sumber2 minyak Sumatera atau perditian Irian, soalnja akan dibawa ke parlemen utk dimintakan nitspraak.

Dengan begitu menurut Abidin menteri yang mungkin akan mengundurkan diri dari kabinet ataupun partai dari menteri itu moral akan terpengaruh oleh putusan parlemen.

Pokoknja kebijaksanaan pemerintahan seperti tsb didalam program itu menurut Abidin tidak dikehendaki adanya yriekamer-artikelen.

Dan mengenai premiership Abidin berpendapat bagi Masjumi tidak ada alasan untuk memintanja sebagai sjarat mutlak karena formateur bukan dari Masjumi, sedang dari PNI demikian djuga, karena program bukan program PNI — Ant.

# Bandung seminggu mendjadi "kota Asia-Afrika"

Oleh : Koresponden Kita Sendiri

Bandung, 25 April.  
DENGAN dihadiri oleh 29 ketua delegasi negara2 Asia-Afrika, pembesar2 setempat dan beberapa menteri kemarin pada djam 18.40 telah dibuka rapat pleno penutup Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka di Bandung. Seyogianya pertemuan ini telah dirantjangkan oleh Sekretariat bersama untuk diadakan pada djam 15.00 sore hari Minggu, akan tetapi 2 atjara yang sangat penting masih belum dapat diselesaikan sampai waktu yang ditetapkan untuk mengadakan rapat pleno.

Masalah2 jg. sangat berat itu ialah mengenai bangsa yang belum merdeka atau jg. terkenal dengan masalah kolonialisme, kedua masalah memajukan perdamaian dunia.

Achirnja sebelum djam 18.00 tertjapai djuga penyelesaian mengenai dua soal terahir ini.

Garis2 besar daripada keterangan bersama dari 29 negara Asia-Afrika mengenai masalah bangsa yang belum merdeka ialah: 1. kolonialisme harus dihentikan, 2. menempatkan bangsa lain dibawah kekuasaan bangsa lain bertentangan dengan hak2 dan azasi manusia, 3. bersemitu agar memberikan kemerdekaan kepada bangsa yang terdjajah guna mendjamin perdamaian dunia.

Tentang memajukan perdamaian dunia dinjatakan dalam keterangan bersama itu antara lain2 bhv: 1. Kemerdekaan seliap negara dihormati, 2. Persamaan penghargaan atas segala bangsa di dunia baik besar maupun kecil, 3. Tidak melakukan pertjampuran dalam urusan lain bangsa, 4. Hak melakukan persetudjuan kolektif untuk kepentingan keamanan, 5. Mendjauhkan dari gabungan kolektif untuk kepentingan negara besar lain, 6. Hak membe'ar diri terhadap antjaraan agresi, 7. Menjelesaikan segala perselisihan dengan

djalan perdamaian dan saling hormat-menghormati.

Keterangan bersama ini adalah dimaksudkan sebagai sumbangan yang efektif buat mendjamin perdamaian dunia.

Semua putusan diterima dengan suara bulat Ruslan Abdulgani sebagai sekretaris djenderal Joint Sekretariat dari konp. A-A membatjakan seluruh putusan2 yang telah diambil dengan suara bulat.

Ketika ketua konperensi PM Ali Sastroamidjojo menanyakan apakah ada yang tidak setuju dengan putusan ini tidak mendjawab, maka ketua menganggap bahwa putusan2 itu telah diterima dengan suara bulat. Tepukan riuh memenuhi Gedung Merdeka setelah dinjatakan keterangan ini.

Sambutan ketua2 delegasi

Setelah itu ketua Konperensi PM Ali Sastroamidjojo mengundang wakil2 delegasi untuk menjatakan sambutannja terhadap konperensi. Afghanistan disusul oleh Burma, Tiongkok, Mesir, dan India membuka barisan pembitjara. Selain dari mereka Indonesia, Irak, Iran, Lebanon, Pilipina, Pakistan, Sudan, Turki djuga angkat bitjara.

(Sambungan dihal 2 kol 3-5)

## Konp. AA berachir -

(Sambungan dari halaman 1)

Perdana Menteri AA sebagai ketua konperensi menjajaki segala atjara dan penghargaan yang telah djambil pada djam 21.40 ini mengenai konperensi yang beresdjajah, dan yang telah berachir pada tj. 18 sampai 24 April 1955 di kota Bandung.

# Tjalon KSAD jang baru sudah disetudjui Dwitunggal

## Kolonel Bambang Utoyo kans paling besar

Oleh: Koresponden Kita Sendiri

Djakarta, 18 Mei.

UNTUK membitjarakan 3 tjalon untuk penggantian KSAD, jang diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan jang telah disetudjui oleh Kabinet, maka kemaren hari Selasa tanggal 17 Mei selama satu djam, dari djam 9 sampai 10 pagi, Presiden dan Wakil-Presiden telah mengadakan pertemuan di Istana.

Kabar jang kita peroleh me-  
njatakan, bahwa tjalon2 jang  
disampaikan kepada Presiden  
itu adalah Kol. Sudirman,  
Kol. Z. Lubis dan Kol. Bam-  
bang Utoyo. Semua soal2 jang  
bersangkut paut dengan peng-  
gantian KSAD ini telah ditin-  
djaui dengan seksama dan me-  
nurut keterangan, Dwitunggal  
telah mengambil keputusan me-  
ngenai soal penggantian KSAD  
ini. Keputusan itu, demikian  
kabar lebih djauh jang kita  
peroleh, pada hari kemaren  
telah disampaikan kepa-

Dalam hubungan ini maka  
putusan mengenai penganta-  
tan KSAD baru ini dalam wak-  
tu jang singkat telah dapat di-  
umumkan.

Kalangan2 jang mengikuti  
persoalan disekitar penggantian  
KSAD ini dengan memperhati-  
kan segala fakto2 jang ber-  
sangkut paut dengan pergantian  
KSAD ini didasarkan  
kepada pertimbangan2 kemil-  
teran dan untuk kepentingan  
keutuhan Angkatan Darat, se-

bagaimana jang diinginkan oleh  
keputusan Permusjawaratan pa-  
ra Perwira Tinggi di Jogjakar-  
ta baru2 ini, dapat meraba2  
bahwa keputusan itu kemung-  
kinannya djatuh pada Kolonel  
Bambang Utoyo.

# Angkatan Darat menolak pengangkatan KSAD

## Wk. KSAD Lubis tak sedia lakukan timbang-terima

Oleh: Koresponden Kita Sendiri

Djakarta, 28 Djuni :

WAKIL KSAD Zulkifli Lubis dalam konperensi persnja yang diadakan kemarin djam 11.30 mengaku tentang pemboikotan atas instruksi-nja untuk menghadiri pelantikan KSAD baru Bambang Utoyo bagi semua Panglima2 Territorium.

Diterangkannja selandjutnja, bahwa djalan ini ditempuhnja adalah dengan pengertian bahwa djalan inilah yang sebaiknja setelah usulnja selaku Wk. KSAD untuk mendjaga djangan prestigenja (nama baik) Pemerintah hilang karena pengangkatan ini.

Sebagai pedoman untuk pengangkatan KSAD baru itu dikatakannja jumbuh sebagaimana yang telah diikrarkan oleh rapat perwira Angkatan Darat di Jogjakarta, bahwa pimpinan dalam angkatan darat itu harus mengutamakan ketinggian watak dan ketjakaan pimpinan.

Dalam pada itu utantaraan diterangkannja bahwa ia mengandjurkan pada Pemerintah utk tidak adakan timbang-terima antara njaku selaku wk. KSAD dengan KSAD yang baru, sebelum diadakan perundingan terlebih dulu yang dapat mentjapai persesuaian dalam hal ini.

Dengan tegas ia katakan, bahwa ia selaku wakil KSAD buat sementara bertanggung djawab penuh atas segala hal yang terdjadi atas kegagalan pelantikan KSAD baru di Istana „Merdeka“.

Sementara itu dikatakan-



Zulkifli Lubis

... bahwa dalam waktu singkat akan diadakan rapat panglima2 T.T. dengan staf MB Angkatan Darat.

Tapi bagaimanapun djuga

dikatakannja bahwa ia tetap pertjaja hal ini akan dapat diselesaikan, dan mengenai personalia yang akan ditjalonkannja sebagai KSAD, diterangkannja bahwa orangnja sewaktu2 dapat dimadjukan.

Mengenai Bambang Utojo, dikatakannja bahwa ia tidak menolak pribadi Bambang Utojo untuk djadi KSAD, tetapi karena Bambang Utojo sendiri telah pernah menolak pengangkatan itu, maka dengan sendiri merupakan pengangkatan jg tidak dapat dipertanggung djawabkan.

Tentang pertemuannja dengan Presiden Sukarno pada hari Sabtu, ia tidak dapat memberika ... an2.

# Hatta tadi malam terima penjerahan mandat kabinet Ali

Hearing dengan partai-partai akan dimulai Selasa besok

Oleh: Koresponden Kita Sendiri

WAKIL Presiden Moh. Hatta tadi malam dengan resmi telah menerima penjerahan kembali mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang berlangsung selama 30 menit bertempat kediaman Wk. Presiden di "Merdeka Selatan".

Sebagaimana telah diberitahukan semula, penjerahan mandat itu akan dilakukan pada hari Sabtu malam setelah keterangan Pemerintah di depan sidang Parlemen, tetapi karena dengan Wk. Presiden pada waktu itu masih berada di tempat istirahat di Megu Mendung maka direncanakan kemarin hari Minggu pagi. Inipun tidak dapat dilaksanakan berhubungan dengan sesuatu soal dan baru tadi malam penjerahan tersebut berlangsung sebagai mana tersebut diatas.

Selesai penjerahan tadi malam atas pertanyaan pers Wk. Presiden menyatakan bahwa baru pada hari Selasa akan dilakukan hearing dengan partai-partai di kantornya di Merdeka Utara oleh karena besok ia akan ke Bandung.

Menurut rencana demikian Wk. Presiden seterusnya hearing itu akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut dan mengenai jumlah partai yang akan diadjak ber-hearing itu ada sebanyak 20 partai.

Mengenai bentuk kabinet, diterangkannya bahwa hal itu tergantung kepada hasil hearing nanti dan hearing pertama akan dilakukan dgn partai yang terbesar dalam urutan partai di Parlemen sekarang ini.

Dalam hubungan ini oleh Wk. Presiden seterusnya diterangkan bahwa ia mengharapkan kabinet baru akan dapat dibentuk dalam waktu selanjutnya.

Dalam hubungan ini, Jusuf Wibisono sebagai anggota DP, Masjumi dan Wk. Ketua KSO menyatakan atas suatu pertanyaan koresponden, Merdeka apakah degan jatuhnya kabinet Ali-Affin yang disebabkan penolakan AD itu dapat diselesaikan dengan mudah, dinyatakan bahwa soalnya "bersahadja" sekali, yaitu dengan meluluskan semua tuntutan AD dan menjerahkan kepada pihak AD sekali lagi untuk memilih seorang KSAD baru.

Wakil KSAD kundersungi Wakil Presiden.

Sebelum kunjungan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo guna menjerahkan kembali mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta, terlebih dahulu pada hari Minggu petang lebih kurang jam 18.45 Wakil Presiden menerima kedatangan Wakil KSAD Z. Lubis disertai oleh Kolonel Dr. Azis Saleh dan Overste Mokoginta.

Pembicaraan antara Wakil KSAD tersebut dengan Wakil Presiden berlangsung selama lebih kurang 45 menit. Apa yang dibicarakan tidak diperoleh keterangan, tapi diduga besar kemungkinan berkisar pada persoalan mengenai Angkatan Darat dewasa ini.

Pendapat Masjumi Sedjak keterangan Pemerintah di depan sidang Parlemen Sabtu malam dan penjerahan kembali mandat tadi

malam, maka beberapa partai politik telah mememukakan pendapatnya mengenai kabinet yang akan dibentuk nanti.

